



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

EKONOMI BIRU MINISTER  
INDONESIA EMAS **KKP**  
2025

# LAPORAN KINERJA

---

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR  
TRIWULAN I  
TAHUN 2025





## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karunia dan Rahmat-Nya kegiatan Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2025 dapat terlaksana dan tersusun dengan baik. Laporan Kinerja ini sebagai pertanggungjawaban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan misi organisasi yang dituangkan dalam program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKj ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi tentang pencapaian kinerja operasional perkarantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang ditetapkan untuk periode triwulan I tahun 2025 yang disusun dengan pendekatan *Balance Scorecard* ( BSC ). LKj menyajikan realisasi IKU yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan termasuk hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Kami menyadari bahwa LKj masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Makassar, 15 April 2025

Pt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar



*Rahayu Setyaningsih*

Rahayu Setyaningsih



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	v
I. PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi .....	2
3. Arah Kebijakan dan Strategis .....	3
4. Sistematika dan Penyajian .....	4
II. PERENCANAAN KINERJA .....	6
1. Visi dan Misi .....	6
2. Tujuan Strategis .....	7
3. Sasaran , Indikator dan Kinerja .....	8
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
1. Capaian Kinerja .....	10
2. Analisis dan evaluasi .....	12
IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%) .....	13
IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produk produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%) .....	23
IK3 Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Lokasi)	31
IK4. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Lokasi)	35
IK5. Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%) .....	40
IK6. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%) .....	48
IK7. Nilsu kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar .....	52
IK8. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai) .....	58
IK9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai) .....	64
IK10. Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar .....	70



IK11. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Indeks) .....	74
IK12. Penilaian Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai) .....	84
IK13. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%) .....	89
IK14. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	92
IK15. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berprediksi menuju wilayah bebas	96
IK16. Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar...	102
IK17. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Nilai) .....	109
IV. PENUTUP	
1. Kesimpulan .....	118
2. Rekomendasi .....	118
3. Tindaklanjut.....	119

**LAMPIRAN**

**Lampiran Capaian Kinerja ( LCK )**

IK1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%) .....	1
IK2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produk produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%) .....	11
IK3	Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Lokasi)	20
IK4.	Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Lokasi)	23
IK5.	Rasio Eksport ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan eksport lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%) .....	27
IK6.	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%) .....	35
IK7.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar .....	39
IK8.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai) .....	43
IK9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai) .....	48
IK10.	Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar .....	53
IK11.	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Indeks) .....	56
IK12.	Penilaian Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai) .....	63
IK13.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%) .....	66
IK14.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	69
IK15.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berprediksi menuju wilayah bebas	77
IK16.	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar...	82
IK17.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Nilai) .....	87



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis ( NPSS) Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebesar 112,41 (istimewa) Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis ( SS ) dan target Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

- A. Dari 17 (Tujuh belas) IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK Tahun 2025 ada 4 Indikator Kinerja yang baru yaitu : 1) Lokasi Pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 2). Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar , 3). Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 4). Inovasi pelayanan publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
- B. Uraian Indikator Kinerja Utama KU yang capainnya memenuhi atau melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu :
  1. Persentase hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)





2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)
3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, (%)
4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Nilai)
5. Nilai kinerja Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Nilai)
6. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar .(%)
7. Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Nilai)

Kinerja Keuangan Balai Besar KIPM Makassar Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp 11,879,526,000 dan realisasi Rp 2,637,863,723 atau 22,21%



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja

SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instrument pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Dalam peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di Kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja . Laporan Kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj Interim) maupun tahunan (LKj Tahunan ) Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah mengukur kinerja evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil capaian target kinerja.



Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), dalam melaksanakan tugas dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP.

## **1.2. Tugas dan Struktur Organisasi Latar Belakang**

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai Besar KIPM) Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Balai Besar KIPM Makassar terdiri dari (1). Sub bagian Umum, (2) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksanaan teknis pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



Struktur organisasi Balai Besar KIPM Makassar dapat dilihat pada struktur organisasi dibawah ini.



### 1.3. Arah Kebijakan dan Strategis

Arah kebijakan dan strategis pembangunan Balai Besar KIPM Makassar disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka sasaran strategis Balai Besar KIPM Makassar adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan Perikanan dengan didukung 1). Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi Primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 2). Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 3). Lokasi Pengawasan Mutu hasil eklautan dan perikanan sektor prosuksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 4). Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan sektor produksi pasca panen lingkup UPT



- Balai Besar KIPM Makassar, 5) Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai Besar KIPM Makassar
2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar yang didukung 1). Nilai kualitas penerapan sistem mutu laboratorium lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 2) . Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar.
  3. Tata kelola pemerintahan yang efektif , lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang di dukung 1). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 2). Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 3). Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 4). Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 5). Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 6). Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 7). Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 8). Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 9). Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM, 10). Survey Kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar.

#### **1.4 Sistematika dan penyajian**

Sistematika dan penyajian LKj Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Bab I. Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi;



- b. Bab II. Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III. Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Bab IV. Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan hal-hal lainnya.

## II. PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Visi dan Misi

Visi Presiden 2025-2029 mengusung komitmen "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045", yang melanjutkan fondasi yang telah dibangun dan mendorong Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Visi ini mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu dan berkolaborasi demi meraih tujuan bersama, dan diwujudkan dalam 8 (delapan) Misi yang dikenal dengan Asta Cita, yaitu:

1. Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta meningkatkan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat keharmonisan kehidupan dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

## 2.2 Tujuan Strategis

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2025 – 2029 maka sasaran strategis ( SS ) dan kondisi *output/impact* yang diinginkan dapat dicapai BPPMHKP dari program yang dilaksanakan , maka Balai Besar KIPM Makassar telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

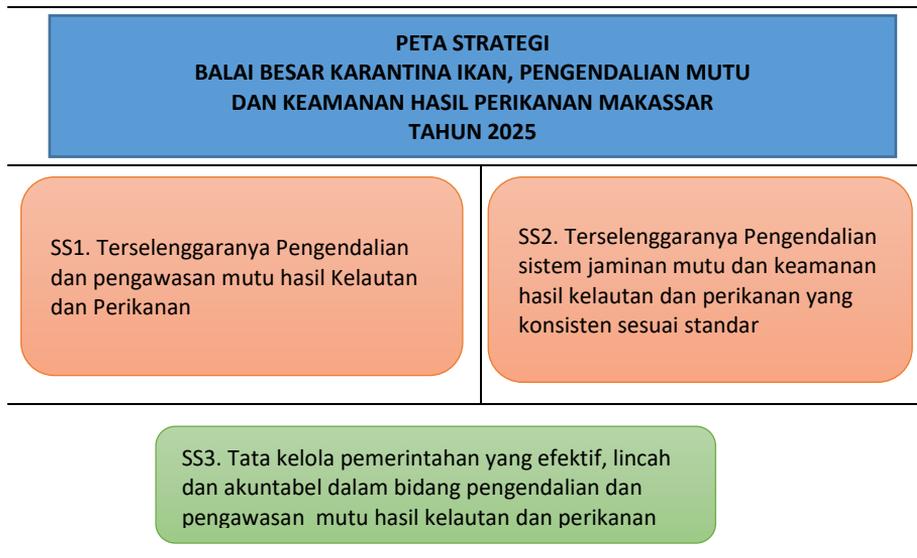
- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Sasaran Strategis | 1. Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu hasil Kelautan dan Perikanan   |
| 2. Sasaran Strategis | 2. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar              |
| 3. Sasaran Strategis | 3. Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan |

### 3.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran strategis Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar merupakan penjabaran operasional dari visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran strategis ini menggambarkan hasil yang hendak dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi dan Penyusunan IKU pada KKP mampu membangun sistem mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.

Peta Strategis adalah suatu dashboard yang memetakan sasaran organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi nasional. Dari Peta Strategi tersebut, dijabarkan indikator dan target kinerja yang akan dicapai Balai Besar KIPM Makassar pada tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BKIPM.



Gambar 1. Peta Strategi Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanan.



### III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian indikator kinerja Balai Besar KIPM Makassar dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2025. Selanjutnya dilakukan pembahasan dan analisis lebih mendalam terutama terhadap indikator kinerja yang realisasinya tidak mencapai target. Hal ini perlu dilakukan untuk mengenali faktor penyebabnya selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan strategi untuk peningkatan kinerja (*performance improvement*) di tahun-tahun selanjutnya.

Hasil capaian indikator kinerja Balai Besar KIPM Makassar untuk triwulan I tahun 2025 yang menunjukkan capaian sasaran strategis secara ringkas disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel : 2.1

Capaian Kinerja Balai Besar KIPM Makassar Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025				
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi terhadap Target TW I 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1. Persentase hasil kelautan dan Perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	-	125	70	70	100	142,86	142,86
	2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	-	98,1	70	70	115	164,29	164,29
	3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar						1	0	0	0,00	0,00
	4. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	5	4	4	100	1	1	1	100,00	100,00
	5. Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	99,99	99,99	101,99	100	99	99	100	101,01	101,01



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2025				
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi terhadap Target TW I 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025
Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	6					83,1	75	0	0	0,00	0,00
	7					-	75	0	0	0,00	0,00
Terselenggaranya Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	8	88	89	98,44	96,38	97,16	92	92	100	108,70	108,70
	9		86	87,87	86,2	98,37	71,5	71,5	100	139,86	139,86
	10				100	100	100	100	100	100,00	100,00
	11	68,01	81,44	82,23	90,27	90,78	87	0	0	0,00	0,00
	12	91,93	98	95,3	87,13	83,8	86	0	0	0,00	0,00
	13	82	65	100	100	100	85	85	100	117,65	117,65
	14			79,56	78,26	84,34	76	0	0	0,00	0,00
	15						75	0	0	0,00	0,00
	16						1	0	0	0,00	0,00
17			89,8	91,12	3,77	88	88	93,32	106,05	106,05	



### 3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Elaborasi capain kinerja berdasarkan sasaran strategi secara lebih detail menurut indikator kerjanya dijelaskan sebagai berikut :

#### Sasaran Kegiatan 1

#### **Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan**

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan diperlukan dukungan 5 indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan pencapaian 5 indikator kinerja tersebut disajikan pada table dibawah ini :

Indikator Kinerja	Target
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan :	
1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	1. 70 %
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	2. 70 %
3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	3. 1 Lokasi
4. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	4. 1 Lokasi
5. Rasio Eksport ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	5. 99 %



**IK. 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja ( IK )	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025- 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi terhadap Target TW I 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target Renstra
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1 Persentase hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamaann pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	-	125	70	70	100	142,86	142,86	-	-

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

BPPMHKP Makassar saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan



upaya peningkatan kualitas layanan, optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
- b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
- c. Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB);
- d. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
- e. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
- f. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan.

Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan.

melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan.



Cara Pembuatan pakan ikan yang baik yang selanjutnya disingkat CPPIB adalah serangkaian proses pembuatan Pakan Ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan.

Cara Distribusi Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut CDOIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh proses distribusi Obat Ikan sehingga pengguna mendapatkan jaminan konsistensi mutu, keamanan, dan khasiat Obat Ikan.

Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh produksi yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku, produk antara, dan/atau produk ruahan dan pengawasan mutu guna menghasilkan yang aman bermutu dan berkhasiat.

Capaian iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

- %X = Jumlah hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer
- A = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CBIB
- B = Jumlah Unit menerapkan CPIB
- C = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CPPIB
- D = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB
- E = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
- F = Jumlah Unit Usaha menerapkkn CPIB Kapal
- Xn = Jumlah dari Unsur Pembentuk



Adapun target sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer pada tahun 2025 adalah sebanyak 14 sertifikat. Untuk memudahkan pencapaian target tersebut dibagi sebagai berikut :

No	Kegiatan	Target Capaian Per Triwulan			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Sertifikasi CPIB Kapal	0	3	2	0
2	Sertifikasi CBIB	1	1	1	0
3	Sertifikasi CPIB	0	1	1	1
4	Sertifikasi CPPIB	0	0	0	2

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi sertifikasi CBIB sebanyak 1 sertifikat dari target 3 sertifikat. Sedangkan realisasi sertifikasi CPIB Kapal, CPIB Pembenuhan dan CPPIB Pakan pada triwulan I tahun 2025 sebanyak 0 sertifikat dari total target sebanyak 10 sertifikat. Dengan demikian persentase dapat dilihat pada rumus dibawah ini :

$$A = \frac{1}{3} \times 100\% = 33,33\%$$
$$\%X = \frac{A}{xn} \times 100\%$$
$$= \frac{33,33}{100} \times 100\% = 33,33\%$$

Sertifikat CBIB ditriwulan I tahun 2025

No.	Nama UPR	Produk	Grade	No. Sertifikat
1	CV SENADA HORTA	Udang vannamei (Litopenaeus vannamei)	B	ID-CBIB-P-73-250012 Tanggal 07 Februari 2025



**Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaotu :**

- Pada tanggal 17 Januari 2025 telah dilakukan koordinasi dengan Direktur Pelabuhan dan Penanggung jawab PP Untia terkait dengan percepatan sertifikasi CPIB Kapal
- Pada Triwulan I tahun 2025 BPPMHKP Makassar telah melakukan sertifikasi terhadap 1 jenis sertifikasi yaitu : Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB). Kegiatan CBIB dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025 di CV. Senada Horta Jl. RAJAWALI NO. 37, Desa/Kelurahan Panambungan, Kec. Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Inspeksi CBIB ini dilaksanakan oleh inspektur Mutu BPPMHKP Makassar. Adapun ruang lingkup yang diinspeksi adalah pembesaran Udang Vannamei (*Litopenaeus vannamei*) sesuai dengan kode KBLI 03254 yaitu komoditi Udang Vannamei (*Litopenaeus vannamei*).
- Pada tanggal 19 Februari 2025 telah dilakukan kegiatan Sosialisasi terhadap seluruh UPT BPPMKHP terkait SOP Pelaksanaan Sertifikasi pada Sektor Produksi Primer yang dilaksanakan oleh Pusat Mutu Produksi Primer secara daring.
- Pada tanggal 5 Maret 2025 telah dilaksanakan sharing session dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran B.233/BPPMHKP/OT.310/2025 tentang Pedoman Teknis Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk meningkatkan pemahaman dan optimalisasi pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan di BPPMHKP Makassar, sharing session ini menjadi wadah bagi setiap penanggung jawab kegiatan teknis untuk memaparkan pedoman teknis yang relevan, sejalan dengan amanat peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 8/PERMEN-KP/2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan



serta peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16/PERMEN-KP/2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian.

- Pada tanggal 17 – 18 Maret 2025 telah dilaksanakan monitoring pelaksanaan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Kapal oleh Pusat Mutu Produksi Primer, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap UPT BPPMHKP Makassar diperoleh nilai total atas konsistensi pemenuhan Penerapan Persyaratan Teknis dengan jumlah 97,44 % dengan peringkat sangat baik, kegiatan dilanjutkan dengan bincang inspiratif tentang Strategi Keberhasilan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi CPIB Kapal diharapkan seluruh peserta dapat berbagai pengalaman, tantangan serta solusi yang implementasi kebijakan terkait sehingga tercipta harmonisasi dalam pengendalian dan pengawasan mutu perikanan yang lebih baik.
- Pada tanggal 18 Maret 2025 telah dilakukan kegiatan pemantapan persiapan pelaksanaan inspeksi dan surveilan tahun 2025 khususnya dalam rangka penerbitan sertifikat cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB) dan sertifikat cara distribusi obat yang baik (CDOIB) terhadap seluruh UPT BPPMKHP yang dilaksanakan oleh Pusat Mutu Produksi Primer secara daring.

Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Inspeksi CBIB pada TW I sebanyak 2 orang yang terdiri dari 2 Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar.

Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran awal sebesar Rp. 95.000.000 kemudian direvisi menjadi Rp 18.820.000 yang digunakan untuk Inspeksi penerapan sertifikasi produksi primer Rp. 18.820.000.



Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).

- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.
- Pemanfaatan realisasi anggaran sampai dengan TW I Tahun 2025 sebesar Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	SISA (RP)
1.	Inspeksi penerapan sertifikasi produksi primer	18.820.000	-	18.820.000
JUMLAH		18.820.000	-	18.820.000



#### Akar masalah

- Unit Pembenihan Rakyat dan Unit Pembesaran Rakyat belum familiar dengan aplikasi OSS sehingga berdampak dalam melakukan permohonan pengajuan sertifikasi.
- Sebagian besar awak kapal perikanan belum memiliki sertifikat Bimbingan Teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal perikanan yang merupakan salah satu persyaratan untuk permohonan Sertifikasi CPIB Kapal perikanan.
- Sehubungan dengan tindak lanjut Plan of Action dan rekomendasi hasil audit DG SANTE – Uni Eropa BPPMHKP Makassar mendapatkan target 133 kapal yang harus disertifikasi paling lambat minggu kedua bulan juni tahun 2025 namun sebanyak 88 kapal belum memiliki bimtek CPIB, 3 kapal yang mensuplai ke PT. Prima Indo Tuna sudah memiliki bimtek namun berdasarkan informasi kapal tersebut akan melakukan pembongkaran ikan kembali di PPI Lappa sinjai pada bulan 12 tahun 2025 – bulan Maret tahun 2026, sebanyak 42 kapal PT. Ocean Champ Seafood yang merupakan kumulatif dibawah 5 GT berdasarkan informasi dari pusat primer belum bisa dilakukan inspeksi dikarenakan Permen KP terkait CPIB Kapal belum terbit.

#### Rekomendasi rencana aksi :

- Berkoordinasi dengan penyuluh perikanan yang ada di propinsi sulawesi selatan dan para penyuluh yang ada di kabupaten dalam rangka pendampingan ke UPR yang akan mengajukan sertifikasi melalui OSS;
- Melakukan koordinasi dengan PP Untia DJPT terkait akselerasi Sertifikasi awak kapal sebagai bagian dari upaya pembinaan dari Dirjen Teknis;
- Melakukan penundaan sertifikasi terhadap 42 kapal yang mensuplai ke OCS dimana kapal tersebut berukuran  $\leq 5$  GT sampai menunggu Permen KP terkait CPIB Kapal diterbitkan.



**Hasil tindak lanjut rekomendasi rencana aksi**

Telah dilakukan koordinasi dengan Direktur Pelabuhan dan Penanggung jawab PP Untia terkait dengan percepatan sertifikasi CPIB Kapal



Kegiatan Koordinasi dengan Direktur Pelabuhan dan Penanggungjawab PP Untia





Kegiatan Inspeksi Cara Budidaya Ikan yang baik dengan CV. Senada Horta



Kegiatan Sharing Sesiom Pedoman teknis pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hail perikanan



Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik ( CPIB) Kapal

**IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja ( IK )	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025- 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi terhadap Target TW I 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target Renstra
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	-	98,1	70	70	115	164,29	164,29	-	-





Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Keamanan hasil perikanan merupakan persyaratan utama dan terpenting dari seluruh parameter mutu pangan mengingat dewasa ini konsumen semakin menyadari bahwa mutu pangan khususnya keamanan pangan tidak dapat hanya dijamin dengan hasil uji produk akhir dari laboratorium. Produk yang aman didapat dari bahan baku yang ditangani dengan baik, diolah dan didistribusikan dengan baik sehingga akan menghasilkan produk akhir yang memenuhi standar mutu;

Langkah untuk mengantisipasi hal tersebut serta adanya tuntutan dalam pasar bebas, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan suatu sistem jaminan mutu berdasarkan konsep HACCP yang harus diterapkan oleh pelaku usaha perikanan mulai bahan baku hingga produk akhir. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengolahan ikan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) melalui Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen Pada triwulan I 2025 melaksanakan 2 (dua) kegiatan dalam Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Produk)



2. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Produk)

Indikator Kinerja ini mendukung kegiatan prioritas kedua KKP yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas ketiga KKP yaitu pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua yaitu menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan tangkap yang di terima oleh Unit Pengolahan Ikan (UPI) melalui sertifikasi HACCP, sertifikasi SKP yang merupakan persyaratan utama ekspor produk perikanan ke negara tujuan. Produk hasil perikanan Indonesia menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan yang semakin kompleks diantaranya; ketatnya persyaratan jaminan mutu (quality) dan keamanan (safety) pangan, kemampuan telusur (traceability), ramah lingkungan (environmental friendly) dan keberlanjutan (sustainability). Untuk itu diperlukan upaya tindakan penguatan penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMHP) mulai dari hulu sampai hilir. Agar traceability dapat diterapkan secara konsisten, maka semua pihak yang terlibat dalam rantai suplai dan produksi harus melakukan pencatatan (informasi dan koleksi data) tentang hal-hal yang telah ditentukan terhadap input produksi atau produk yang dikelolanya.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga yaitu mendukung peningkatan produksi lima komoditas ekspor yaitu udang, kepiting, rumput laut, lobster dan tilapia. Di Sulawesi Selatan terdapat dua komoditas budidaya yaitu udang dan rumput laut yang dijamin mutu dan keamanan hasil perikanan melalui sertifikasi HACCP dan SKP yang merupakan persyaratan utama ekspor produk perikanan ke negara tujuan.



**CARA PENGUKURAN**

Perhitungan berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2025 yaitu :

$$\%X = \frac{A+B}{xn} X 100\%$$

Dimana

- %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
- A = Persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
- B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP
- xn = Total dari unsur pembentuk (2)

Adapun target sertifikasi HACCP pada tahun 2025 sebanyak 272 sertifikat sedangkan target sertifikasi SKP pada tahun 2025 sebanyak 319 sertifikat. Pada rumus perhitungan di atas belum dijelaskan rumus perhitungan untuk memperoleh A dan B. Untuk memudahkan perhitungan maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$A = \frac{\text{Jumlah sertifikat HACCP yang terbit (realisasi)}}{\text{Jumlah sertifikat yang expired (target)}} X 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sertifikat SKP yang terbit (realisasi)}}{\text{Jumlah rekomendasi yang masuk}} X 100\%$$

Persyaratan dalam penerbitan SKP mengacu pada Permen KP No. 17 Tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan SKP. Pencapaian IKU ini dapat dilihat pada matriks berikut :

No	Kegiatan	TW I 2025		
		target/Rekomendasi	Realisasi	Persentase
1	Sertifikasi HACCP (A)	49	83	169,38%
2	Sertifikasi SKP (B)	102	62	60,78%



Catatan :

1. Realisasi sertifikasi HACCP mencapai 169,38% karena terdapat permohonan baru dan penambahan ruang lingkup produk.
2. Realisasi sertifikasi SKP hanya mencapai 60,78% karena terdapat 40 rekomendasi SKP dari Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang belum memenuhi persyaratan dan memerlukan revisi.

$$\begin{aligned} \%X &= \frac{169,38 + 60,78}{2} \\ &= 115,08 \% \end{aligned}$$

Realisasi persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sebesar 115,08 %, dari target 70 %. Dengan demikian capaian IKU ini adalah sebesar 164,40 %.

Adapun kegiatan pendukung pada IKU pasca panen adalah kegiatan sertifikasi Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan, sertifikat SPDI (Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan) diberikan kepada pelaku usaha yang melaksanakan penyimpanan, pengadaan, sortasi dan grading serta yang melakukan kegiatan distribusi ikan dan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai KBLI terkait, menerapkan cara distribusi ikan yang baik (CDIB) dan memenuhi persyaratan pembinaan dari Direktorat Teknis.

Sehubungan tindak lanjut dari Plan of Action (PoA) dan rekomendasi hasil audit DG SANTE – Uni Eropa (UE), Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) – KKP akan segera melakukansertifikasi terhadap pemasok yang mensuplai bahan baku ke UPI Approval Number UE. Sertifikasi tersebut sebagai



bentuk komitmen pemerintah Indonesia bahwa pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan di tahap hulu hingga hilir, sehingga permasalahan ekspor ke UE bisa terselesaikan. UPT Balai Mutu Makassar diberikan target sebanyak 18 (delapan belas) unit pemasok yang termasuk dalam pemasok ke UPI approval number Uni Eropa.

Output dari kegiatan ini berupa sertifikat SKP dan HACCP serta didukung oleh sertifikasi SPDI atau CPIB supplier. Dengan adanya sertifikasi SKP dan HACCP ini, Unit Pengolahan Ikan atau UMKM dapat melakukan kegiatan ekspor produk perikanan dengan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terjamin serta memenuhi standar negara tujuan ekspor. Hal ini didukung dengan adanya sertifikasi SPDI atau CPIB supplier yang dapat menjamin mutu dan keamanan pasokan bahan baku yang masuk ke unit pengolahan dan UMKM.

Kegiatan ekspor ini melibatkan seluruh pejabat fungsional inspektur mutu dengan total sebanyak 16 orang dan didukung oleh tenaga PPNPM sebanyak 24 orang yang penempatannya meliputi kegiatan pengujian laboratorium, pengendalian dan pengawasan mutu serta pelayanan sertifikasi mutu hasil perikanan.

Anggaran awal kegiatan pasca panen pada tahun 2025 sebesar Rp. 210.000.000,- di blokir sebesar Rp. 151.804.000,- dan pagu revisi sebesar Rp. 58.196.000,- realisasi ditriwulan I sebesar Rp.22.365.000,- atau sebesar (38,43% ).

#### **Akar masalah**

- Dalam rangka mendukung kebijakan efisiensi anggaran, sebagian kegiatan sertifikasi SKP harus dilakukan dengan mekanisme virtual. Hal ini berpotensi terhadap kurang optimalnya hasil inspeksi mengingat lokasi unit pengolahan masih baru dan belum ada gambaran kondisi yang sebenarnya secara langsung.



- Pelaksanaan Sertifikasi SPDI akan dilaksanakan jika pihak pemasok/supplier harus terlebih dahulu menerapkan cara distribusi ikan yang baik (CDIB) dan memenuhi persyaratan pembinaan dari Direktorat Teknis yaitu Direktorat Penguatan Daya Saing (PDSKP) sehingga untuk melaksanakan kegiatan SPDI harus menunggu penilaian CDIB terlebih dahulu;

#### **Rekomendasi rencana aksi**

- Inspektur Mutu mengoptimalkan kegiatan desk audit dengan lebih detail untuk mendapatkan gambaran kondisi yang sebenarnya pada unit pengolahan dengan lebih baik.
- Melakukan komunikasi secara intensif dengan calon pemasok dan Direktorat teknis (PDSKP) sebagai pelaksana penilaian CDIB dalam rangka percepatan sertifikasi SPDI;

#### **Hasil tindak lanjut rekomendasi rencana aksi**

- Berkolaborasi dengan petugas verifikasi SKP pada dinas perikanan tingkat satu agar persyaratan sebelum penerbitan rekomendasi dinas sudah terpenuhi terlebih dahulu mulai dari awal tahun 2025.
- Telah dilakukan Rapat Koordinasi Verifikasi Verifikator Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) pada tanggal 10 Maret 2025 secara daring oleh Pusat Mutu Pasca Panen;
- Telah dilakukan Rapat Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Mutu Domestik dan Sertifikasi SPDI Pasca Efisiensi anggaran 18 Februari 2025 secara daring oleh Pusat Mutu Pasca Panen;



- Sosialisasi pembinaan CDIB dan Penerbitan SPDI yang dilaksanakan oleh Direktorat Logistic DITJEN PDSPKP secara during pada tanggal 13 maret 2025.



Kegiatan Inspeksi Konsistensi penerapan HACCP di UPI



Kegiatan Inspksi Konsistensi Sertifikat Kelayakan Pengolahan di UPI

### IK.3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025- 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi terhadap Target TW I 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target Renstra
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	3 Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar						1	0	0	0,00	0,00	-	-



Pada tahun 2025 terdapat penambahan IKU baru yaitu Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi), yang ditahun sebelum hanya berupa IKU pendukung.

Balai Besar KIPM Makassar adalah salah satu unit kerja yang mendapatkan target lokasi monitoring cemaran perairan dari Kepala Pusat Mutu Produksi Primer BPPMHKP pada, tahun 2025 lokasi monitoring 1 lokasi yaitu perairan wilayah Takalar yang terdiri dari 1 titik monitoring yaitu TPI Beba.

Tujuan dari kegiatan ini adalah mengetahui apakah komoditi perikanan yang diperoleh dari perairan terpapar racun hayati laut dan logam berat serta mendapatkan data dan informasi pengujian kandungan racun hayati laut dan logam berat pada ikan sebagai bahan rekomendasi kepada Otoritas Kompeten.

Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali dalam setahun yaitu pada setiap semester dengan sasaran titik pendaratan ikan yang ditangkap di perairan Takalar atau di Wilayah

Pengelolaan Perikanan (WPP) 713. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan adanya data monitoring yang mutakhir sehingga menjadi bahan rekomendasi pengelolaan perikanan di perairan Makassar.

Adapun rencana kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan monitoring cemaran perairan meliputi :

1. Sarana dan Prasarana : Penerapan standar sanitasi dan higienis pada TPI/PPI merupakan indikator jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipasarkan sehat dan aman untuk konsumsi
2. Pengambilan Contoh uji yang diambil kemudian dibawa ke Laboratorium Balai Besar KIPM Makassar untuk pengujian parameter logam berat (*Pb, Cd, Hg*) dan pengujian mikrobiologi untuk parameter *E.Coli, Salmonella* dan dikirim ke Laboratorium BUSKIPM untuk pengujian racun hayati laut parameter *ciguatoksin* dikarenakan



pengujian racun hayati belum masuk ruang lingkup di laboratorium Balai Besar KIPM Makassar.

Pada triwulan I tahun 2025 kegiatan monitoring cemaran perairan belum dilaksanakan oleh BPPMHKP makassar. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah mengikuti rapat koordinasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu produksi primer pada tanggal 19 Februari 2025 yang dilaksanakan secara daring oleh Pusat Mutu Produksi Primer BPPMHKP. Pada kegiatan tersebut Pusat Mutu Produksi Primer menyampaikan target lokasi monitoring cemaran perairan untuk BPPMHKP Makassar sebanyak 1 (satu) lokasi, yaitu Perairan Makassar.

SDM yang terlibat dalam kegiatan monitoring cemaran perairan tahun 2025 adalah 8 orang yang terdiri atas 6 orang Inspektur Mutu dan 2 orang Asisten Inspektur Mutu.

Kegiatan monitoring cemaran perairan merupakan salah IKU yang mendukung program prioritas KKP. Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa setiap hasil tangkapan yang dikonsumsi bebas dari cemaran perairan termasuk racun hayati laut dan logam berat.

Anggaran awal kegiatan monitoring cemaran perairan pada tahun 2025 sebesar Rp. 10.000.000,- di blokir sebesar Rp. 5.340.000,- dan pagu revisi sebesar Rp. 4.660.000,- realisasi ditriwulan I sebesar Rp.380.000,- atau sebesar (8.15% ) yang digunakan untuk pembelian sampel pada kegiatan pengawasan mutu domestik sisa anggaran sebesar Rp. 4.280.000,-

Sebagai perbandingan, anggaran pada Anggaran kegiatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 92.000.000,- yang terealisasi pada Triwulan I tahun 2024 sebesar Rp. 1.090.000 atau sebesar (1,18 %) yang terdiri dari pembelian sampel uji.



Dari jumlah pagu anggaran Tahun 2025 terjadi penurunan anggaran, sedangkan dari realisasi anggaran jika dibandingkan antara triwulan I tahun 2025 dan triwulan I tahun 2024 terjadi peningkatan realisasi anggaran disebabkan nilai anggaran tahun 2024 lebih besar dari anggaran tahun 2025 dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

#### **Akar Masalah**

Potensi masalah petugas/pelaksana kurang memahami ketentuan yang berlaku terkait monitoring cemaran perairan.

#### **Rekomendasi rencana aksi**

Melakukan Sosialisasi / Refresment/Sharing session peningkatan kompetensi inspektur mutu melalui bincang inspiratif.

#### **Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi**

Tidak ada indikator kinerja ini pada triwulan sebelumnya



Kegiatan Rapat koordinasi Pengendalian dan Pengendalian Mutu Produksi Primer  
Pada tanggal 19 Februari 2025



**IK 4. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025- 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi terhadap Target TW I 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target Renstra
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4 Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	5	4	4	100	1	1	1	100,00	100,00	-	-

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berkewajiban untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat, penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pengendalian mutu di pasar/sentra produksi ikan sehat; penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan pengendalian ikan sehat dan aman untuk dikonsumsi.

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) memiliki peran penting dalam mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), antara lain:

1. Pengawasan Mutu: BPPMHKP melakukan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan.



2. Pengendalian Mutu: BPPMHKP melakukan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan untuk mencegah terjadinya penyimpangan kualitas dan keamanan pangan.

Dengan demikian BPPMHKP juga dapat membantu meningkatkan kualitas dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar domestik dan internasional.

Balai Besar KIPM Makassar mengikuti kegiatan rapat pembahasan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Pengawasan Mutu Domestik dan sertifikasi SPDI Pasca Efisiensi Anggaran yang dilaksanakan oleh Pusat Mutu Pascapanen pada tanggal 18 Februari 2025 yang dihadiri oleh UPT BPPMHKP secara virtual. Pusat Mutu Pascapanen melakukan pembahasan kegiatan tahun 2025, yang bertujuan untuk berkoordinasi, berdiskusi, persamaan persepsi antara Pusat dan UPT BPPMHKP dalam pelaksanaan tugas.

Pada tahun 2025, Balai Besar KIPM Makassar menjadi salah satu unit kerja yang diberikan target sebanyak 1 lokasi yaitu kota Makassar dengan jumlah 1 lokus. Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu setiap semester. Adapun lokasi pengawasan sentra penyedia pangan sehat yaitu pasar tradisional.

Pada triwulan I tahun 2025 target pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik yaitu di Kota Makassar dengan lokus pengawasan yaitu Pasar Tradisional Daya.

Adapun agenda kegiatan yang dilakukan pada saat pengawasan mutu hasil perikanan domestik (lokasi) Triwulan I tahun 2025 yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan ke kepala UPTD Pasar Tradisional Daya.



2. Melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pasar tradisional serta mengisi checklist Pengamatan Kondisi sarana Prasarana dan Sanitasi Higiene.
3. Pengambilan sampel untuk dilakukan pengujian di laboratorium.

Rangkaian kegiatan terdapat pengambilan sampel yang dilakukan di Pasar Tradisional Daya, terdapat 5 sampel yaitu cumi-cumi segar, ikan bandeng segar, ikan katamba segar, ikan kerapu segar dan udang vannamei segar. Telah dilakukan pengujian dilaboratorium Balai Besar KIPM Makassar dengan target pengujian Organoleptik, ALT, *Echerichia coli*, *Salmonella spp*, dan Formalin. Dari hasil pengujian organoleptik, mikrobiologi dan kimia yang dilakukan terhadap sampel uji menunjukkan hasil negatif atau sesuai dengan persyaratan mutu.

Inspektur mutu juga melakukan pengamatan kondisi sarana prasarana dan sanitasi hygiene pada pasar tradisional Daya. Setelah dilakukan pengamatan pasar tradisional Daya memperoleh nilai dengan kriteria **BAIK** dimana lokasi berada ditempat bebas pencemaran dan mudah dijangkau, bangunan terawat, dibersihkan dan terawat, saluran pembuangan air memiliki kemiringan yang cukup, fasilitas sanitasi tersedia, pasokan air cukup, penerangan yang cukup baik alami maupun menggunakan lampu, transportasi pengangkutan produk cukup memadai namun masih perlu perhatian terkait cara penanganan ikan yang baik sehingga mutu produk yang dipasarkan tetap terjaga.

Adapun alokasi anggaran untuk kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik tahun 2025 sebesar Rp. 31.500.000,- Anggaran indikator kinerja ini masih belum terealisasi karena adanya kebijakan pemerintah untuk efisiensi anggaran. Namun kebijakan pemerintah tersebut tidak menjadi penghalang pada kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik.



Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 77.240.000,- yang terealisasi pada TW I tahun 2024 sebesar Rp. 10.671.929,- atau 13,82%.

Pada triwulan I tahun 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memastikan ketersediaan ikan selama Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H. Berbagai upaya dilaksanakan antara lain turun langsung ke lapangan memantau stok ikan di sentra penyedia pangan sehat, melakukan diskusi dengan pelaku utama yang melakukan aktivitas jual beli ikan serta melakukan pengawasan mutu produk perikanan untuk memastikan produk yang dikonsumsi masyarakat aman dan bermutu.

Jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan tersebut selama Triwulan I tahun 2024 adalah 10 orang yang terdiri atas Inspektur Mutu, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar, Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (MPHPI), BPPSDMKP Maros dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.

#### **Akar masalah**

Potensi masalah: Berupa pemahaman pelaku usaha terkait cara penanganan ikan yang baik serta sanitasi dan hygiene masih kurang yang memungkinkan penurunan mutu ikan yang di pasarkan.

#### **Rekomendasi rencana aksi**

Melakukan koordinasi dengan pihak pengelola pasar untuk dilakukan sosialisasi cara penanganan ikan yang baik serta sanitasi dan hygiene, pada pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu semester II.



### Hasil tindak lanjut rekomendasi rencana aksi

Telah dilakukan koordinasi dengan TIM pengelola anggaran sehingga pelaksanaan pengawasan mutu domestik masih bisa dilakukan pada triwulan I tahun 2025.

1. Telah dilakukan sosialisasi ke pelaku usaha pada saat kunjungan lapangan di sentra penyedia pangan sehat untuk selalu menjaga mutu ikan agar tetap aman dan laik untuk konsumsi



Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik Triwulan I Tahun 2025 di Pasar Tradisional Daya Kota Makassar



**IK 5. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan Ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025- 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi terhadap Target TW I 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target Renstra
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	5 Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	-	99,99	99,99	101,99	99	99	100	101,01	101,01	-	-

Sistem Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tumbuh seiring dengan perkembangan tuntutan akan jaminan mutu dan keamanan pangan di tataran internasional yang semakin ketat, dan tidak hanya fokus pada mutu dan keamanan dari produk akhir. Sistem jaminan mutu dan keamanan terhadap proses merupakan tuntutan dan penerimaan masyarakat dunia (internasional) akan keberterimaan pangan, termasuk hasil perikanan. Implementasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipersyaratkan oleh internasional, harus dipenuhi oleh seluruh negara pengekspor, yang dinyatakan pada sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan yang menyertai setiap produk yang dipasarkan, baik untuk pasar dalam negeri maupun tujuan ekspor.

Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) merupakan bukti bahwa hasil perikanan yang dipasarkan telah diproses berdasarkan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diterbitkan apabila suatu produk/hasil perikanan telah memenuhi persyaratan atau standar yang berlaku sehingga aman untuk dikonsumsi manusia. Dengan berkembangnya sistem manajemen mutu, maka



penerbitan SMKHP didasarkan pada hasil pengawasan mutu terhadap efektifitas penerapan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada Unit Usaha Pembenihan, Pembesaran dan Unit Pengolahan Ikan serta hasil pengujian contoh.

Peningkatan ekspor perikanan ke negara tujuan merupakan salah satu program prioritas nasional yang tergambar dalam misi Asta Cita ke 5 yaitu melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan

sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pada Asta Cita ke 5 terdapat tiga kegiatan utama yaitu peningkatan ekspor produk perikanan tangkap, pembangunan industri hilir dan industri penangkapan ikan serta penjaminan mutu dan keamanan pangan akuatik komoditas perikanan budi daya.

Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas kedua KKP yaitu kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dimana BPPMHKP memastikan bahwa setiap hasil tangkapan yang diekspor ke negara tujuan telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan melalui pengujian mutu di laboratorium dan penyiapan sertifikasi mutu untuk menjaga kredibilitas produk perikanan. Selain itu, dalam mendukung program prioritas kedua KKP, BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu hulu hilir.

Balai Besar KIPM Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dengan salah satu tugasnya adalah melakukan pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Atas dasar hasil pengendalian tersebut, Balai Besar KIPM Makassar memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap ikan dan produk perikanan yang akan di lalulintaskan ke negara tujuan.



Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan rasio kegiatan pengiriman ikan dan hasil perikanan ke luar wilayah Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak ada penolakan oleh negara tujuan ekspor. Hal ini dibuktikan diterimanya SMKHP di negara tujuan ekspor dan tidak ada notifikasi penolakan dari negara tujuan.

Perhitungan IKU ini berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2025 yaitu :

$$X = \frac{A + B}{A}$$

X : Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A : SMKHP yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B : Jumlah SMKHP yang ditolak oleh negara tujuan

A :  $\frac{\text{Jumlah HC ekspor (K1-D1) yang memenuhi syarat kesehatan} - \text{penolakan oleh negara tujuan}}{\text{Jumlah HC karantina ekspor yang diterbitkan}} \times 100\%$

Pada triwulan I tahun 2025 tercatat volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 45,04 ton senilai Rp. 1,53 T dengan jumlah sertifikat ekspor (SMKHP) yang diterbitkan sebanyak 2.798 sertifikat. Adapun pada triwulan I tahun 2024 tercatat volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 47,932 ton senilai Rp. 1,68 T dengan jumlah sertifikat ekspor (HC) yang diterbitkan sebanyak 2.444 sertifikat. Jika dibandingkan triwulan I tahun 2025 dan triwulan I tahun 2024 terdapat peningkatan jumlah sertifikat ekspor sebesar 12,65 % di triwulan I tahun 2025. Hal ini berbanding terbalik dengan volume ekspor yang mengalami penurunan di triwulan I tahun 2025 jika dibandingkan triwulan I tahun 2024 sebesar 6,03%.



Data pada triwulan I Tahun 2025 menunjukkan tidak terdapat kasus penolakan produk perikanan yang dikirim ke negara tujuan. Jika dibandingkan dengan triwulan I Tahun 2024 terdapat 1 kasus penolakan produk perikanan berupa *Frozen Flying Fish Roe* sebanyak 1 container dengan volume 12.000 Kg/1200 carton tujuan negara Taiwan. Penolakan disebabkan karena ketidaksesuaian jenis produk dengan permintaan buyer. Penolakan ini tidak masuk dalam kategori kasus penurunan mutu dan keamanan hasil perikanan sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Berdasarkan formula penghitungan IKU, Komponen A tidak dapat dimasukkan ke dalam perhitungan disebabkan sejak awal tahun 2024, terjadi perubahan nomenklatur organisasi, dimana sertifikat Kesehatan ikan bukan lagi menjadi bagian tugas dari BPPMHKP Makassar, sehingga

B : Jumlah SMKHP ekspor yang memenuhi syarat mutu - penolakan oleh negara tujuan  
x 100%

Jumlah SMKHP mutu ekspor yang diterbitkan

$$\frac{2.798 - 0}{2.798} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian realisasi IKU ini di triwulan I tahun 2025 adalah 100%. Jika dilihat dari aspek keberterimaan di negara tujuan didapatkan nilai yang sama antara Triwulan I tahun 2025 dan triwulan I tahun 2025 yaitu 100 %;

Kegiatan sertifikasi ekspor ini melibatkan seluruh pejabat fungsional inspektur mutu sebanyak 18 orang serta didukung oleh tenaga PPNPN sebanyak 12 orang dan PJLP sebanyak 12 orang yang penempatannya meliputi kegiatan pengujian laboratorium, pengawasan, dan pelayanan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan.



Sejalan dengan peningkatan pelayanan sertifikasi ekspor produk perikanan, pada triwulan I tahun 2025 telah dilakukan peralihan aplikasi pelayanan sertifikasi dari Sisterkaroline (Sistem Komputerisasi Karantina Ikan dan Mutu Online) ke aplikasi SIAP MUTU (Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Mutu). Aplikasi SIAP MUTU telah diberlakukan pada tanggal 1 Maret 2025 dan diharapkan dapat mengakomodir pelayanan sertifikasi mutu dan penjaminan mutu hulu hilir. Selain itu, telah dilakukan kegiatan piloting dan sosialisasi aplikasi SIAP MUTU kepada pelaku usaha.

Kegiatan peningkatan kompetensi untuk mendukung IKU ini telah diikuti oleh petugas pelayanan maupun inspektur mutu antara lain sebaga berikut :

No	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Waktu Kegiatan
1.	Briefing Pagi Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu	BPPMHKP Makassar	5 Januari 2025
2.	Sosialisasi Penerbitan SMKHP Melalui Aplikasi SIAP MUTU	Sekretariat BPPMHKP	22 Januari 2025
3.	Launching dan Sosialisasi Aplikasi SIAP MUTU	Sekretariat BPPMHKP	27 Februari 2025
3.	Sosialisasi Aplikasi SIAP MUTU dan PMK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	BPPMHKP Makassar	28 Februari 2025

Indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu :

1. Monitoring dan evaluasi nomor registrasi negara mitra.
2. Evaluasi kesesuaian penerbitan HC
3. Investigasi kasus penolakan ekspor di negara tujuan.



Kegiatan yang mendukung IKU ini beserta pagu anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Lock Pagu	Realisasi Anggaran TW I 2025	Persentase Realisasi
1	7010.ABR.001 Harmonisasi Persyaratan/Ketentuan Negara Mitra dan Negara Tujuan Ekspor	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	0	0
2	3989.QIC.002 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	0	0
3	3989.BIA.001 Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	0	0

Alokasi anggaran untuk mendukung IKU ini pada tahun 2025 sebesar Rp. 45.000.000. Adapun anggaran untuk indikator kinerja ini masih belum terealisasi karena adanya kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 terdapat alokasi anggaran untuk mendukung IKU ini sebesar Rp. 60.000.000 dimana terjadi penurunan pagu anggaran sebesar 25% dan realisasi pada triwulan I tahun 2024 sebesar Rp. 15.793.000. Diharapkan dengan adanya kebijakan buka blokir kegiatan yang mendukung IKU ini dapat terealisasi di triwulan selanjutnya.

#### Akar masalah

- Masih relatif tingginya permintaan revisi SMKHP oleh pengguna jasa.
- Terdapat kegiatan pendukung IKU berupa evaluasi kesesuaian penerbitan HC yang masih baru dan belum dilakukan sosialisasi pelaksanaannya.



### **Rekomendasi rencana aksi**

- Melakukan penyadartahuan/edukasi/sosialisasi tentang ketentuan revisi SMKHP melalui penilaian kepatuhan pelaku usaha.
- Akan melaksanakan sharing session/brainstorming tentang kegiatan evaluasi kesesuaian penerbitan HC dan detail pelaksanaannya.

### **Hasil Tindak lanjut rekomendasi rencana aksi**

- 1) Telah dilakukan sosialisasi kepada inspektur mutu dan stakeholder/pelaku usaha pada triwulan I tahun 2025 yaitu sebagai berikut :
  - a. Sharing Session Pedoman Teknis Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang salah satu agendanya membahas Sosialisasi Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 44 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada tanggal 5 Maret 2025.
  - b. Sosialisasi Aplikasi SIAP MUTU dan PMK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 28 Februari 2025.
  - c. Rapat Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi SIAP MUTU bersama pelaku usaha/eksportir produk perikanan tujuan China pada tanggal 25 Maret 2025.
- 2) Telah dilakukan kordinasi dengan tim pengelola anggaran terkait dengan blokir anggaran pada tanggal 22 Januari 2025 pasca kegiatan Rapat Relokasi Blokir oleh Sekretariat BPPMHKP.



Sharing Session Pedoman Teknis Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Tanggal 5 Maret 2025

## Sasaran Kegiatan 2

### **Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsistensi sesuai standar**

Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsistensi sesuai standar di dukung 1 Indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan pencapaian 2 indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja	Target
<p>Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsistensi sesuai standar</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar</li><li>2. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 75 Nilai</li><li>2. 75 Nilai</li></ol>



**IK6. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi terhadap Target TW I 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	6 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu Laboratorium lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	-	-	75	0	0	0,00	0,00	-	-

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga Inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi (ISO 17020).

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17020 yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi adalah kegiatan surveilan penerapan Hazard Analysis and Critical





Control Points (HACCP). Selama Triwulan I Tahun 2025, terdapat 94 kali pelaksanaan surveilan penerapan HACCP.

Pada Triwulan I Tahun 2025 telah pula dilakukan Sharing Session pedoman teknis pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 44 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada tanggal 5 Maret 2025 di Aula Balai Besar KIPM Makassar yang diikuti oleh inspektur mutu Balai Besar KIPM Makassar untuk meningkatkan pemahaman inspektur mutu dalam pelaksanaan kegiatan surveilan HACCP.

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

dimana :

$$\begin{aligned} \bar{X} &= \text{Rata rata} \\ x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n &= \text{Nilai tingkat pemenuhan ke } - 1, 2, 3, \dots, n \\ n &= \text{Banyaknya nilai tingkat pemenuhan} \end{aligned}$$

Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini dilaksanakan oleh 21 orang mulai dari Manager Puncak hingga inspektur mutu hasil perikanan yang telah memiliki nomor registrasi inspektur mutu dan/atau telah mengikuti pelatihan HACCP dasar.

Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi ini mendukung program prioritas nasional yaitu swasembada pangan melalui ekonomi biru. Pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi memberikan jaminan kepada negara-negara importir akan pangan yang sehat dan aman konsumsi berupa komoditi perikanan dari Sulawesi



Selatan. Pemenuhan sistem manajemen mutu juga memberikan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

Anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu bersumber dari DIPA Balai Besar KIPM Makassar tahun 2025 sebesar Rp. 3.500.000,-. Bila dibandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya, maka anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 20.000.000,- atau menurun sebesar 82,5% dari anggaran tahun sebelumnya.

Pada Triwulan I Tahun 2025, anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu belum direalisasikan sama sekali. Anggaran sebesar Rp. 3.500.000,- rencananya akan direalisasikan pada Triwulan II berupa iuran tahunan sebanyak Rp. 1.500.000,- dan sisanya sebanyak Rp. 2.000.000,- berupa anggaran pertanggunggugatan jika terdapat kesalahan dalam kegiatan surveilan yang mengakibatkan kerugian pada auditi.

Pada Triwulan I Tahun 2025, belum dilakukan penilaian Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi oleh Pusat Manajemen Mutu. Untuk itu pada Triwulan I Tahun 2025 ini Balai Besar KIPM Makassar belum memperoleh nilai penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi.

#### **Akar masalah**

Potensi masalah dalam penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi adalah tidak konsistennya pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

#### **Rekomendasi rencana aksi**

Dilakukan monitoring terhadap konsistensi pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium



### Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi

Status akreditasi sistem manajemen mutu lembaga inspeksi SNI ISO/IEC 17020:2012 tetap dipertahankan dengan melakukan penerapan SNI ISO/IEC 17020:2012 pada kegiatan operasional Balai Besar KIPM Makassar.



Kegiatan Surveilan penerapan SNI ISO/IEC 17020:2012



**IK7. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi terhadap Target TW I 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan	7 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM	-	-	-	-	-	75	0	0	0,00	0,00	-	-

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri.

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:



1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

dimana :

$\bar{X}$	= Rata rata
$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$	= Nilai tingkat pemenuhan ke - 1, 2, 3, ..., n
$n$	= Banyaknya nilai tingkat pemenuhan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian adalah kegiatan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan di laboratorium Balai Besar KIPM Makassar. Selama Triwulan I Tahun 2025, terdapat 3.751 kali pengujian laboratorium yang terdiri dari :

1. Pengujian Organoleptik sebanyak 1.056 kali
2. Pengujian Mikrobiologi sebanyak 1.790 kali
3. Pengujian Kimia sebanyak 683 kali
4. Pengujian Air dan Es sebanyak 222 kali

Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini dilaksanakan oleh 18 orang mulai dari Manager Puncak hingga analis dan staf laboratorium yang kompeten dalam melaksanakan sistem manajemen mutu laboratorium.



Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini mendukung program prioritas nasional yaitu swasembada pangan melalui ekonomi biru. Pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini memberikan jaminan kepada negara-negara importir akan pangan yang sehat dan aman konsumsi berupa komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan. Pemenuhan sistem manajemen mutu juga memberikan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

Anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu bersumber dari DIPA Balai Besar KIPM Makassar tahun 2025 sebesar 36.537.000,-. Bila dibandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya, maka anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 70.000.000,- atau menurun sebesar 47,8% dari anggaran tahun sebelumnya.

Pada Triwulan I Tahun 2025, anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu telah direalisasikan sebesar Rp. 1.500.000,- atau sebesar 4,1 % dari anggaran tahun 2025. Sisa anggaran sebesar Rp. 35.037.000,- rencananya akan direalisasikan pada Triwulan II, III, dan IV sesuai dengan jadwal penerapan sistem manajemen mutu laboratorium untuk kegiatan kalibrasi alat, uji profisiensi, uji banding, dan biaya assesmen.

Pada Triwulan I Tahun 2025, telah dilakukan penilaian Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium pada tanggal 20 Maret 2025 oleh Pusat Manajemen Mutu. Dari kegiatan verifikasi tersebut, Balai Besar KIPM Makassar memperoleh nilai sebesar 91,23 dari target sebesar 75. Sehingga output kegiatan penerapan sistem manajemen mutu telah terealisasi sebesar 121,64 %.



### **Akar masalah**

Potensi masalah dalam penerapan sistem manajemen mutu laboratorium adalah tidak konsistennya pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

### **Rekomendasi rencana aksi**

Dilakukan monitoring terhadap konsistensi pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium

### **Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi**

Status akreditasi sistem manajemen mutu laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017 tetap dipertahankan dengan melakukan surveilan penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017 dari KAN. Rencana pelaksanaan surveilan tersebut adalah di bulan Mei 2025.



Kegiatan pengujian Laboratorium



Kegiatan Verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium

### Sasaran Kegiatan 3

#### **Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan**

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, untuk mencapai sasaran kegiatan ini diperlukan dukungan 10 indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan . adapun penjelasan pencapaian 10 indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :



Indikator Kinerja	Target
<p>Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan</p>	
1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) UPT Lingkup Balai Besar KIPM Makassar )	1. 92 Nilai
2. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	2. 71,5 Nilai
3. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	3. 100 %
4. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	4. 87 Indeks
5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	5. 86 Nilai
6. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	6. 85 persen
7. Tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	7. 76 Persen
8. Nilai minimal yang di persyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	8. 75 Nilai
9. Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	9. 1 Unit
10. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	10. 88 Nilai



**IK8. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi terhadap Target TW I 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2026	% Capaian terhadap Target Renstra
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	8 Nilai Indikator pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai Besar KIPM Makassar	88	89	98,44	96,38	97,16	92	92	100	108,70	108,70	-	-

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dan belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini terintegrasi dengan Aplikasi OM-SPAN. Penilaian IKPA diatur pada Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

xxx  
x x x  
x x x  
Ruang lingkup :  
PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 mengatur mengenai pengukuran dan penilaian secara sistematis dan objektif atas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dengan menggunakan IKPA dan menggunakan aplikasi yang dikelola oleh DJPB.

xxx  
x x x  
x x x  
Aspek Pengukuran dan Indikator Kinerja  
Pengukuran IKPA meliputi 3 aspek :



- Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini terdiri dari:
  - a. Revisi DIPA bobot 10 %
  - b. Deviasi halaman 3 DIPA bobot 15%
- Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini terdiri dari:
  - a. Penyerapan anggaran bobot 20%
  - b. Belanja Kontraktual bobot 10%
  - c. Penyelesaian Tagihan bobot 10%
  - d. Pengelolaan UP dan TUP bobot 10%
  - e. Dispensasi Surat Perintah Membayar bobot 0%
- Kualitas hasil pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini adalah capaian output. Bobot capaian output adalah 25%.

Capaian nilai IKPA Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 100 persen dari target 92. Hal ini berdasarkan surat dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran Nomor:S-50/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Penyesuaian data dan perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025. hal-hal yang mendasari adanya pemberian nilai IKPA dengan nilai sempurna atau 100 persen adalah:



- Adanya efisiensi atas anggaran belanja TA 2025 yang berdampak pada pelaksanaan anggaran Kementerian Lembaga dan pada akhirnya mempengaruhi penilaian indikator kinerja pada IKPA;
- Berdasarkan informasi dari Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, terdapat pengembangan Aplikasi SAKTI yang berdampak terhadap layanan keuangan kepada Satker pada periode Februari 2025 yang mempengaruhi penilaian indikator kinerja pada IKPA.

Sehingga untuk menindaklanjuti kondisi di atas dan dinamika pelaksanaan anggaran pada awal tahun anggaran, serta dalam rangka menerapkan prinsip fairness treatment dalam penilaian IKPA, dilakukan penyesuaian data dan perhitungan penilaian dengan memberikan nilai 100 untuk seluruh indikator penilaian IKPA selama Triwulan I TA 2025.

Tabel perbandingan capaian kinerja indikator pelaksanaan anggaran TW I 2025 dan TW I 2024

Indikator kinerja	Bobot	Periode		Kenaikan /Penurunan
		TW I 2024	TW I 2025	
Kualitas Perencanaan Anggaran				
Revisi DIPA	10	10	10	0,00
Deviasi Hal III DIPA	15	10	15	0,50
Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
Penyerapan Anggaran	20	20	20	0,00
Belanja Kontraktual	10	10	10	0,00
Penyelesaian Tagihan	10	10	10	0,00
Pengelolaan UP dan TUP	10	9,91	10	0,01
Dispensasi SPM	0	5	0	0,00
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				
Capaian Output	25	0	25	100,00
<b>Nilai Total</b>	<b>100</b>	<b>74,91</b>	<b>100</b>	<b>0,335</b>

Pada tabel diatas terlihat adanya kenaikan nilai IKPA pada TW I 2025 dibandingkan TW I 2024 sebesar 0,335. Kenaikan TW I 2025 dipengaruhi oleh terbitnya surat dari Direktorat



Pelaksanaan Anggaran Nomor:S-50/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang penyesuaian data dan perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025.

Tabel perbandingan capaian kinerja pelaksanaan anggaran TW I 2025 dan TW IV 2024

Indikator kinerja	Bobot	Periode		Kenaikan /Penurunan
		TW IV 2024	TW I 2025	
Kualitas Perencanaan Anggaran				
Revisi DIPA	10	10	10	0,00
Deviasi Hal III DIPA	15	13,82	15	0,09
Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
Penyerapan Anggaran	20	19,2	20	0,04
Belanja Kontraktual	10	9,2	10	0,09
Penyelesaian Tagihan	10	10	10	0,00
Pengelolaan UP dan TUP	10	9,93	10	0,01
Dispensasi SPM	0	0	0	0,00
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				
Capaian Output	25	25	25	0,00
<b>Nilai Total</b>	<b>100</b>	<b>97,16</b>	<b>100</b>	<b>0,029</b>

Pada tabel diatas terlihat adanya kenaikan nilai IKPA pada TW I 2025 dibandingkan TW IV 2024 sebesar 0,029. Kenaikan TW I 2025 dipengaruhi oleh terbitnya surat dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran Nomor:S-50/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang penyesuaian data dan perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025.

Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja pelaksanaan anggaran, Balai Besar KIPM Makassar membentuk sebuah tim pengelola anggaran yang terdiri dari 10 pegawai yang dituangkan pada :

- Surat Perintah Tugas Pengelola Anggaran Nomor: B.329/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 yang merupakan revisi dari Surat Perintah Tugas Nomor: B.009/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 karena adanya perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar KIPM Makassar. Tim ini terdiri dari 9 orang yaitu:
  - 1 Orang Kuasa Pengguna Anggaran;
  - 1 Orang Pejabat Pembuat Komitmen;





- 1 Orang Pejabat Penandatanganan SPM;
  - 1 Orang Bendahara Pengeluaran;
  - 3 Orang Staf KPA dan;
  - 2 Orang Staf PPK
- Surat Perintah Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor: B.005/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2025 tgl 2 Januari 2025 dengan beranggotakan 1 Pegawai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran pada kegiatan layanan manajemen keuangan dan layanan perkantoran gaji dan tunjangan. Berikut adalah masing masing penjelasan pagu dari realisasi anggarannya.

- Layanan manajemen keuangan  
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp23.450.000. Pada TW I 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar 0 persen. Pagu kegiatan ini masih terblokir seluruhnya. Output dari layanan manajemen keuangan adalah mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan untuk perbendaharaan dan administrasi keuangan.
- Layanan perkantoran gaji dan tunjangan  
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp6.983.259.000. Pada TW I 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar 1.997.000.161 atau 28,60 persen. Output dari layanan perkantoran gaji dan tunjangan adalah pembayaran gaji dan tunjangan seluruh pegawai Balai Besar KIPM Makassar.

Total pagu anggaran untuk mendukung capaian kinerja pelaksanaan anggaran adalah sebesar Rp7.006.709.000 dengan realisasi anggaran 1.997.000.161 atau 28,50 persen. sedangkan jika dibandingkan dengan triwulan I 2024, kegiatan pada indikator kinerja ini hanya didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp10.632.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.076.000 atau 47,74 persen. terdapat penurunan realisasi



anggaran pada Triwulan I 2025. Hal ini disebabkan pada Triwulan I 2025 pagu anggaran kegiatan layanan manajemen keuangan masih terblokir seluruhnya.

Pada indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar tidak terdapat kegiatan yang menjadi Program Nasional pada tahun 2025. Namun kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh presiden melalui INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asta Cita.

#### **Akar masalah**

Operator komitmen belum menyelesaikan pengisian target dan capaian output pada aplikasi SAKTI karena aplikasi SAKTI belum siap digunakan (dalam penyempurnaan).

#### **Rekomendasi rencana aksi**

- Setiap penanggungjawab kegiatan agar melaporkan target dan capaian output setiap bulan paling lambat tgl 3 bulan berikutnya dengan mengisi link yang telah disiapkan.
- Operator komitmen melakukan penginputan data target dan capaian output satker pada aplikasi SAKTI maupun modul komitmen

#### **Hasil Tindak lanjut rekomendasi rencana aksi**

PPK dan Tim pada TW I 2025 telah menyelesaikan kontrak :

- Pengadaan jasa internet PT Indonesia Comnet Plus sampai pada tahap penandatanganan kontrak. Dan akan direalisasikan pengerjaan sampai pada tahap pembayaran pada TW II 2025



- Pengadaan penyedia jasa lainnya perorangan 12 orang (sekretaris, pramubakti, petugas kebersihan, petugas keamanan, penyiap bahan uji mutu, dan petugas



pelayanan informasi)

**IK9. Nilai Kinerja Perencanaan anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi terhadap Target TW I 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	9 Nilai kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Balai Besar KIPM Makassar		86	87,87	86,2	98,37	71,5	71	100	140,85	140,85	-	-

Menteri keuangan melaksanakan evaluasi kinerja anggaran sebagai salah satu instrument penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan



fungsi peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara professional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/lembaga, unit eselon I / dan / satuan kerja bersangkutan. Sedangkan fungsi peningkatan kualitas dimaksud bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor- faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA- K/L dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan sebagai salah satu dasar untuk:

- Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan;
- Penyusunan reviu angka dasar;
- Penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahun berkenan; dan
- Pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran, Menteri Keuangan dapat melibatkan Kementerian/Lembaga; dan/atau pihak-pihak lain, yang antara lain meliputi akademisi, pakar dan praktisi.

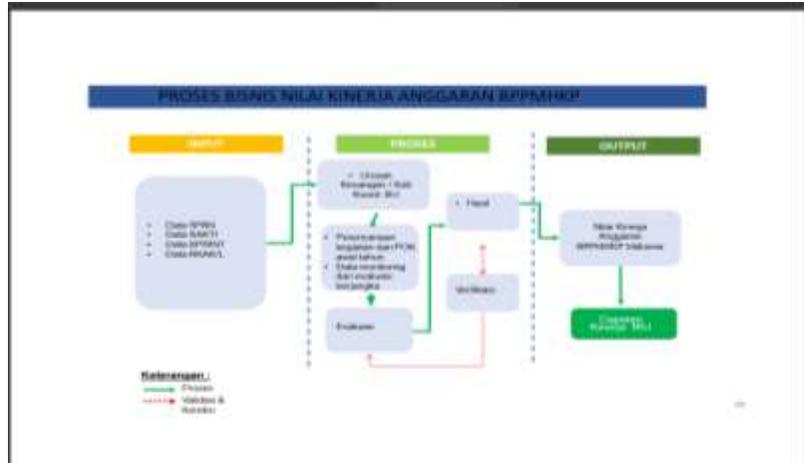
Untuk memantau Nilai Kinerja Anggaran, Kementerian Keuangan telah membuat suatu aplikasi yaitu Aplikasi Monev Kementerian Keuangan. Hal ini dimaksudkan agar setiap organisasi dapat selalu memantau dashboard kinerja anggaran dan melakukan peningkatan pada aspek-aspek penunjang Nilai Kinerja Anggaran tersebut.

Pada triwulan I tahun 2025 telah dilakukan serangkaian kegiatan untuk mendukung tercapainya target kinerja ini antara lain :

- Penyusunan revisi anggaran
- Rapat pembahasan penyusunan rencana aksi pelaksanaan anggaran tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 di BPPMHKP Makassar
- Rapat relokasi blokir anggaran tanggal 22 Januari 2025 yang dilaksanakan Sekretariat BPPMHKP

Aplikasi Monev Kementerian Keuangan pengukuran Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan pada 2 kategori yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Sedangkan untuk tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya Nilai Kinerja Anggaran didasarkan dari 4 aspek yaitu Aspek Penyerapan, Konsistensi, Capaian realisasi Output, dan Nilai Efisiensi.

Berikut adalah proses bisnis terbentuknya data pada dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu



Dasboard Aplikasi Monev Kemenkeu



1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 65,62 %
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 34,38 %

Berdasarkan tampilan dashboard diatas, total Nilai Kinerja Anggaran TW.I Tahun 2025 adalah sebesar 100 atau “Sangat Baik”.

Capaian nilai perencanaan anggaran Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 100 persen dari target 71,5, dimana nilai perencanaan juga berintegrasi dengan nilai IKPA. Nilai tersebut tidak menggambarkan nilai sebenarnya, hal ini disebabkan karena adanya surat dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran Nomor:S-50/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025.

Untuk mendukung tercapainya IKU ini, Balai Besar KIPM Makassar membentuk sebuah tim pengelola anggaran yang terdiri dari 9 pegawai yang dituangkan pada :

- Surat Perintah Tugas Pengelola Anggaran Nomor: B.329/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 yang merupakan revisi dari Surat Perintah Tugas Nomor: B.009/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 karena adanya perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar KIPM Makassar. Tim ini terdiri dari 9 orang yaitu:



- 1 Orang Kuasa Pengguna Anggaran;
- 1 Orang Pejabat Pembuat Komitmen;
- 1 Orang Pejabat Penandatanganan SPM;
- 1 Orang Bendahara Pengeluaran;
- 3 Orang Staf KPA dan;
- 2 Orang Staf PPK

Komitmen untuk terus meningkatkan kinerja berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara menjadi prioritas Balai Besar KIPM Makassar.

Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran pada kegiatan layanan perencanaan dan penganggaran dan layanan perkantoran, perawatan, Gedung dan Bangunan. Berikut adalah masing masing penjelasan pagu dari realisasi anggarannya.

- Layanan Perencanaan dan penganggaran  
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 57.675.000,-. Pada TW I 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 17.406.459,- Pagu kegiatan ini masih terblokir sebesar Rp. 40.268.000,-. Output dari layanan perencanaan dan penganggaran adalah mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan untuk perbendaharaan dan administrasi keuangan.
- Layanan perkantoran, perawatan, Gedung dan Bangunan  
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 295.884.000,-. Pada TW I 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 1.052.000,- Pagu kegiatan ini masih terblokir sebesar Rp. 142.480.000,-. Output dari layanan perencanaan dan penganggaran adalah mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan untuk perbendaharaan dan administrasi keuangan.

Pada Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar tidak terdapat kegiatan yang menjadi Program Nasional pada tahun 2025. Namun



kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh presiden melalui INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asa cita.

#### **Akar Masalah**

Belum terinputnya capaian output karena pada aplikasi SAKTI belum siap digunakan (dalam penyempurnaan).

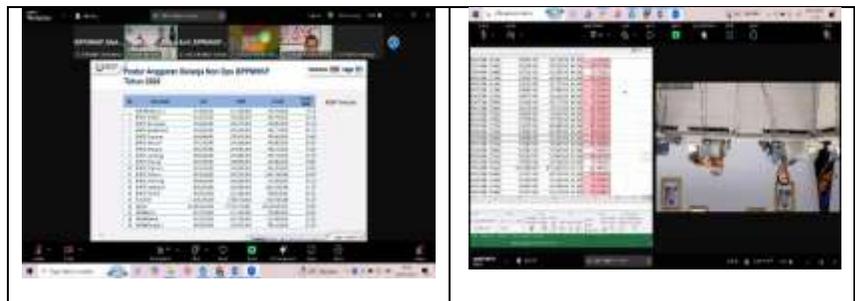
#### **Rekomendasi rencana aksi**

- Melakukan penginputan target dan capaian output bulan Januari sampai Maret 2025 melalui aplikasi SAKTI modul komitmen;
- Mengoptimalkan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2025;
- Menindaklanjuti hasil monitoring tersebut dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

#### **Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Rencana Aksi**

Telah melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2025;

- Telah menindaklanjuti hasil monitoring dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran.





**IK 10. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi terhadap Target TW I 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	10 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	100	100	100	100	100	100,00	100,00	-	-



Dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan kegiatan dan anggaran oleh Satuan Kerja, maka secara periodik dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal (Inspektorat Jenderal) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan). Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh obyek pemeriksaan (Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah), dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir;

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Satker BKIPM merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektifitas sistem pengendalian intern;

Indikator kinerja “Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)” dihitung berdasarkan dokumen formal yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK dan dokumen bukti tindak lanjut penyelesaiannya. Formulasi perhitungannya menggunakan pendekatan sebagai berikut :

$$\% P = (A/B) \times 100\%$$

Keterangan :



# LAPORAN KINERJA 2025

% P = Persentase penyelesaian temuan;

A = Jumlah nilai temuan atas laporan keuangan tahun anggaran 2024 yang diselesaikan pada LHP atas kepatuhan;

B = Nilai temuan BPK tahun 2024;

Pada tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2024 pada Balai Besar KIPM Makassar oleh BPK RI. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan temuan sebagai berikut :

No.	Uraian Penyetoran	Nomor dan Tanggal NTPN
1	Penyetoran kelebihan pembayaran tunjangan kinerja pegawai sebesar Rp. 6.770.700,-	No. 100F61QV3RROBMS Tanggal 23 April 2024
2	Penyetoran kelebihan pembayaran tunjangan fungsional tertentu sebesar Rp. 5.280.000,-	No. C1C023CIFK4LPCAN Tanggal 23 April 2024
3	Penyetoran kelebihan pembayaran tunjangan fungsional umum sebesar Rp. 5.040.000,-	No. 9871D2G4VPI9CBJ2 Tanggal 23 April 2024

Dengan demikian capaian indikator kinerja ini adalah :

$$\begin{aligned} \% P &= (A/B) \times 100\% \\ &= (17.090.700/17.090.700) \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2024, maka capaiannya sama yaitu 100%;

Pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh pengelola anggaran sebanyak 11 orang, yang terdiri dari :

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran;
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen;
- (3) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
- (4) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- (5) Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;
- (6) Bendahara Penerimaan;
- (7) Bendahara Pengeluaran;
- (8) Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai;
- (9) Verifikator Keuangan (3 orang);



Alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kinerja adalah sebesar Rp. 144.310.000,- yang terdiri dari :

- Layanan Perkantoran, Perawatan Kendaraan Bermotor Rp. 135.310.000,-;
- Layanan perkantoran, pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu Rp. 9.000.000,-;

Sampai dengan triwulan I tahun 2025 telah direalisasikan anggaran Rp. 20.622.161,- atau 17,41% yang digunakan untuk Layanan perkantoran, Perawatan kendaraan bermotor sebesar Rp. 12.906.110,- dan Layanan perkantoran, pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu sebesar Rp. 7.716.051,-

#### **Akar masalah**

Potensi terjadinya tuntutan ganti rugi (kelebihan belanja) dikarenakan pengelola anggaran kurang cermat dalam melakukan verifikasi dokumen tagihan pembayaran belanja;

#### **Rekomendasi rencana aksi**

Memastikan kecermatan verifikasi keuangan secara berjenjang (Verifikator Keuangan/Analisis Keuangan, PPK dan Bendahara) dengan penggunaan lembar checklist

#### **Hasil Tindak lanjut rekomendasi rencana aksi**

Telah dilakukan internalisasi Kepmen KP Nomor 56 tahun 2024 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran APBN dilingkungan KKP pada tanggal 22 Januari 2025



Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan internalisasi Kepmen KP Nomor 56 tahun 2024 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran APBN di lingkungan KKP pada tanggal 22 Januari 2025 BPPMHKP Makassar

### IK 11. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi terhadap Target TW I 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	11 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Makassar	68,01	81,44	82,23	90,27	90,78	87	86	0	0,00	0,00	-	-

Menurut UU No 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu



bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada:
  - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
  - b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan



- c. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN.

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

Nilai Realisasi IP ASN Tahun 2024 adalah 90,78, Target Tahunan IP ASN Tahun 2025 adalah 87 dengan periode pelaporan Semester I nilai target 81 dan Semester II nilai target 87.

Nilai IP ASN dicapai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
  - a. Kualifikasi;
  - b. Kompetensi;
  - c. Kinerja; dan
  - d. Disiplin.



2. Indikator dimensi kualifikasi yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN BBKIPM Makassar, meliputi:
  - a. Pendidikan S-3 = -
  - b. Pendidikan S-2 :
    - S2 Keahlian : 7 orang
  - c. Pendidikan S-1 /D-IV :
    - S-1 /D-IV Keahlian : 12 orang
    - S-1 /D-IV Pengawas : 1 orang
    - S-1 /D-IV Pelaksana : 4 orang
  - d. Pendidikan D-III ;
    - D-III Keterampilan : 4 orang
    - D-III Pelaksana : 1 orang
  - e. SLTA :
    - SLTA Keterampilan : 1 orang
    - SLTA Pelaksana : 4 orang
3. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:
  1. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
  2. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan



3. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).
4. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi kompetensi yang digunakan, terdiri dari:
  - a. Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
  - b. Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:
    - 1) Diklat Kepemimpinan (khusus bagi Jabatan Manajerial);
    - 2) Diklat Fungsional (khusus bagi Jabatan Fungsional);
    - 3) Diklat Teknis bagi (khusus bagi Jabatan Pelaksana); dan

Pengembangan Kompetensi 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 (dua puluh empat) JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

Pengukuran dimensi kompetensi adalah sebagai berikut:

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Non manajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	<b>Hasil Penilaian Kinerja</b>					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
2.	<b>Diklat Kepemimpinan</b>					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	<b>Diklat Fungsional</b>					
	- Sudah	-	-	-	10	-
4.	<b>Diklat Teknis</b>					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	<b>Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun</b>					
	<b>PNS</b>					
	≥ 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	<b>PPPK</b>					
	≥ 24 JP	5	5	5	5	5
<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	



5. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai		
		Maksimal	Perolehan	
Kinerja	Sangat Baik	30	30	
	Baik		25	
	Butuh Perbaikan		20	
	Kurang/ <i>Miscellaneous</i>		15	
	Sangat Kurang		10	

Predikat Kinerja yang diperoleh ASN BBKIPM Makassar pada tahun 2024 adalah BAIK

6. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup:
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
  - Hukuman disiplin ringan;
  - Hukuman disiplin sedang; dan
  - Hukuman disiplin berat,

Pengukuran dimensi disiplin adalah sebagai berikut:

7. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi, meliputi:
- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK



- Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN;
- b. Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari aplikasi SIASN BKN sesuai pemukhtahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN;
  - c. Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN / rekonsiliasi data laporan kinerja ke SIASN BKN / data riwayat Kinerja pada SIASN BKN dengan nilai Kinerja dari Kategori; dan
8. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, terdiri atas:
- a. Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
  - b. Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
  - c. Kinerja memiliki bobot 30% (tiga puluh persen); dan
  - d. Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).
9. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} \times R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} \times R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} \times R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} \times R_{4m}$$

Berdasarkan Aplikasi <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>

*Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin*

$$IP\ ASN\ BBKIPM\ Makassar = \frac{Total\ nilai\ IP\ ASN\ seluruh\ pegawai\ ASN\ BBKIPM\ Makassar}{Jumlah\ pegawai\ ASN\ BBKIPM\ Makassar}$$



10. Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN, antara lain:

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

11. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai aktif yang berkedudukan hukum sebagai ASN, meliputi:

- a. PNS; dan
- b. PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN.

12. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- a. Calon PNS (CPNS);
- b. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- c. Dipekerjakan (DPK); dan
- d. Tugas Belajar dibiayai

Capaian IP ASN Individu Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan 1 Tahun 2025 belum terupdate pada aplikasi <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>

Capaian IP ASN Instansi Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan 1 Tahun 2025 belum terupdate pada aplikasi <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>



Sebagai perbandingan nilai IP ASN dengan beberapa UPT lain di Kementerian Kelautan dan Perikanan belum dapat disajikan pada Triwulan 1 Tahun 2025 belum terupdate pada aplikasi <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>

Sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang kompeten dan berkualitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan indeks profesionalitas ASN

Balai Besar KIPM Makassar, mempunyai SDM Aparatur Sipil Negara sebanyak 34 Pegawai yang sebelumnya 37 pegawai yang pensiun ( Hasbullah, S. St ) , mutasi ke Biro umum (Abdul Mubarak Azis, S.T, dan Poltek Bone (Ir Anwar, M. Si)

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Subbagian Umum	1
2.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya	4
3.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	9
4.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	2
5.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia	1
6.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	2
7.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	1
8.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	2
9.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
10.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	1
11.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	1
12.	Pelaksana	9
	Total	34

Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, Dukungan Manajerial, 3987.EBA.962.A Layanan Umum , Perencanaan dan Pengembangan SDM AparaturTahun 2024 :

- Anggaran Awal sebesar Rp. 77.285.000
- Anggaran Setelah revisi sebesar Rp. 73.833.000
- Realisasi Rp. 73.434.365 ( 99.46%)



Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, Dukungan Manajerial, 3987.EBA.962.A Layanan Umum , Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Tahun 2025 :

- Anggaran Awal sebesar Rp. 18.064.000
- Anggaran Setelah Blokir sebesar Rp. 0

Pada indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar Lingkup Balai Besar KIPM Makassar memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asta Cita, dengan meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara akan meningkatkan kualitas Sumber daya manusia dalam pelayanan publik.

Kompetensi ASN Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar bermanfaat bagi kemajuan organisasi dan individu, IP ASN merupakan area pengembangan diri dalam Upaya peningkatan profesionalitas sebagai ASN dan IP ASN sebagai kontrol sosial agar ASN bertindak profesional dalam kaitan pelayanan publik.

#### **Akar Masalah**

- Aplikasi My ASN dan SIASN di Triwulan I bermasalah sehingga usulan diklat/pelatihan pegawai tidak terlihat pada history pengajuan ASN sehingga pada Aplikasi SIASN tidak terbaca pada menu Inbox usulan.
- Efisiensi Anggaran berdampak pada pengembangan kompetensi pegawai sehingga tidak dapat dilakukan pelatihan secara langsung.

#### **Rekomendasi rencana aksi**

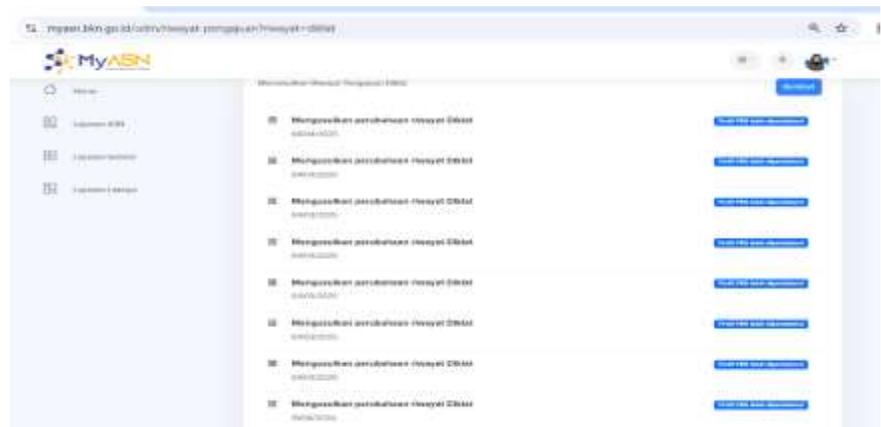
Aparatur sipil negara mengikuti pelatihan secara daring



### Hasil Tindak lanjut rekomendasi rencana aksi

Telah dilakukan verifikasi dan approval data pelatihan yang telah dikirimkan pegawai pada *myasn.bkn.go.id*

1. Telah disampaikan kepada pegawai yang nilai kompetensi belum maksimal untuk mengikuti seminar/latihan untuk pengembangan kompetensi dan melakukan penginputan sertifikat diklat/pelatihan pada aplikasi *myasn.bkn.go.id*;



History Pengajuan pelatihan Aparatur Sipil Negara MyAsn

### IK 12. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi terhadap Target TW I 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	12 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar KIPM Makassar	91,99	98	95,3	87,13	83,8	86	86	0	0,00	0,00	-	-



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyesuaian terhadap kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Capaian diukur dengan instrument Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 4 (empat) parameter yaitu :

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30 %

Pada aspek ini menyampaikan dokumen perencanaan yang berupa :

Renstra 2025-2029, Renja, RKAKL dan Rencana Aksi.

Yang sudah dilaksanakan penyusunan RKAKL dan Rencana Aksi.

Pada Aspek ini telah menyampaikan dokumen RKAKL dan Rencana Aksi yang telah terealisasi pada triwulan I mencapai 15 %



2. Pengukuran Kinerja dengan Bobot 30 %

Pada Aspek ini menyampaikan dokumen pengukuran kinerja yang berupa :

Penyusunan Manual IKU tahun 2024 yang telah diselesaikan pada triwulan I terealisasi mencapai 30 %

3. Pelaporan Kinerja dengan Bobot 15 %

Pada Aspek Pelaporan Kinerja tahun 2025, dokumen yang harus disiapkan adalah Laporan Kinerja Triwulan I , Triwulan II, Triwulan III, triwulan IV dan Tahunan.

Pada Triwulan I sehingga terealisasi tercapai 3,75 %

4. Evaluasi Kinerja dengan Bobot 25 %

Evaluasi kinerja dilaksanakan secara internal oleh Balai Besar KIPM Makassar dan secara eksternal oleh Sekretariat BPPMHKP, Sekretariat Jenderal KKP dan Inspektorat Jenderal secara berkala (triwulanan). Evaluasi secara internal dilakukan oleh Tim Balai Besar KIPM Makassar sebelum dilakukan penyusunan Laporan Kinerja, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan setelah diselesaikan penyusunan Laporan Kinerja . Hasil akhir dari evaluasi eksternal berupa pengesahan nilai NPSS dalam Aplikasi Kinerjaku yang dapat dijadikan dasar dalam pembayaran tunjangan kinerja pegawai.

Pada Triwulan I tahun 2025 telah dilakukan evaluasi kinerja secara internal dan eksternal. sehingga realisasi tercapai 5% .

Bobot realisasi capaian :

Parameter 1 (15%) + parameter 2 (30 %) + parameter 3 (3,7 %) + parameter 4 (0%) = 48 %.



$$\begin{aligned}\text{Realisasi capaian} &= \text{Bobot realisasi capaian} \times \text{Target} \\ &= 48 \% \times 86 \\ &= 41,28\end{aligned}$$

Telah dilakukan rapat sesuai dengan memorandum Balai Besar KIPM Makassar Nomor B.14/BBKIPM.MKS/TU.330/III/2025 pada tanggal 5 Maret perihal penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 17 (tujuh belas) Indikator kinerja.

Untuk pemanfaatan melaksanakan Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 42.795.000 yang mengalami blokir sebesar Rp 42.795.000. jika dibandingkan pemanfaatan anggaran tahun 2024 sebesar Rp 26.498.000 dan terealisasi sebesar Rp 900.000 atau 7,22%

Pada indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar tidak terdapat kegiatan yang menjadi Program Nasional pada tahun 2025. Namun yang diharapkan dengan penilaian mandiri sakip tersebut dapat meningkatkan output dari program kegiatan yang terdapat dalam Tugas dan Fungsi Balai Besar KIPM Makassar. Dengan tercapainya indikator kinerja ini diharapkan satuan kerja dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan akuntabel sehingga dapat mendukung Program Prioritas KKP dan Program Prioritas Nasional

Untuk mendukung tercapainya IKU ini didukung SDM sebanyak 7 orang terdiri dari Kasubbag Umum, Pejabat Pembuat Komitmen, Fungsional APK APBN Madya, APK APBN Muda, APK APBN Pertama, Staf Pengelola Anggaran (Bendahara Pengeluaran)



**Akar masalah**

Belum Optimalnya capaian Kegiatan dan anggaran pada triwulan I tahun 2025

**Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya**

Mengoptimalkan capaian kegiatan dan anggaran pada triwulan selanjutnya

**Hasil tindak lanjut rekomendasi rencana aksi sebelumnya**

Telah menyampaikan laporan kinerja triwulan IV dan Laporan Kinerja Tahunan pada aplikasi E-SAKIP Reviu tepat waktu



Kegiatan Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025



**IK 13. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi terhadap Target TW I 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
		Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	13 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar	82	65	100	100	100	85	85	100	117,65	117,65

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan pemerintahan. Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Indikator Kinerja ini dihitung dari persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP pada Balai Besar KIPM Makassar berdasarkan LHP (terbatas



pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun BAP) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2023 s/d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Balai Besar KIPM Makassar yang menjadi obyek pengawasan, dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

$\sum Nt$  = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti;

$\sum N$  = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan ;

Pada triwulan I Tahun 2025 tidak terdapat audit dari Inspektorat Jenderal KKP, sehingga realisasi indikator kinerja ini 100% sama seperti pada periode triwulan IV tahun 2024 realisasi sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja pada triwulan I tahun 2024, maka nilainya sama yaitu 100%.

Capaian indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran semula Rp. 2.126.781.000,- setelah terkena kebijakan efisiensi menjadi Rp.1.502.912.000,- yang sampai dengan triwulan I tahun 2025 terealisasi sebesar Rp.402.956.249,- atau 26,81% yang digunakan untuk belanja keperluan perkantoran, belanja pengiriman surat dinas pos pusat, belanja honor operasional satuan kerja, Belanja honor output kegiatan, belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin. Jika dibandingkan alokasi anggaran pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp.822.011.000,- terjadi peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 82,83%.

Jumlah SDM yang terlibat dalam mendukung tercapainya IK ini sebanyak 14 orang yang terdiri atas KPA 1 orang, PPK 1 orang, PPSPM 1 orang, Pejabat Pengadaan 1 orang, Pejabat Penerima dan Pemeriksa Barang 1 orang, Pengurus BMN 1, Bendahara 2 orang, Bendahara Penerimaan Pembantu 1 orang, Staf KPA 2 orang, Staf PPK 3 orang.



Indikator kinerja ini jika tercapai maka akan mendukung keberhasilan program prioritas KKP maupun Program Prioritas Nasional Asta Cita. Tercapainya target kinerja ini memncerminkan bahwa organisasi telah melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai ketentuan dan standar yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan dan anggaran telah dilaksanakan dengan akuntabel dan tepat waktu.

Aspek pemanfaatan yang diperoleh dari kegiatan IKU ini yaitu memberikan informasi mengenai tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan, sehingga dapat mengambil tindakan dan Keputusan secara cepat, tepat dan akurat.

#### **Akar masalah**

Potensi masalah kurang cermatnya pengelola kegiatan dan anggaran dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan itjen.

#### **Rekomendasi rencana aksi**

- Operator SIDAK melakukan pemantauan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan Itjen.
- Satuan Kerja melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan Itjen.

#### **Hasil Tindak lanjut rekomendasi rencana aksi**

Telah dilakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan Itjen pada aplikasi SIDAK periode triwulan I Tahun 2025.



**IK 14. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi terhadap Target TW I 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	14 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	-	-	79,56	78,26	84,34	76	76,00	99,06	130,34	130,34	-	-

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri



(Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Untuk menghitung persentase capaian rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%) menggunakan rumus sebagai berikut :

**Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP**

$$= \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

**Pagu Pengadaan Barang/Jasa**

Perhitungan akan dilakukan di akhir tahun anggaran karena target kinerja ini bersifat triwulan

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah

1. Sebelum operator menginput data barang dan jasa ke dalam aplikasi SIRUP, terlebih dahulu berkoordinasi dan komunikasi dengan pemegang akun KPA, PPK dan Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial untuk menunggu arahan dan petunjuk selanjutnya;
2. Menginventarisir kegiatan dan anggaran pada RKA- KL;
3. Mengecek kesiapan internet untuk mendukung upload ke dalam aplikasi SIRUP;
4. Mengupload Rencana umum pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar ke dalam aplikasi SIRUP



Untuk melaksanakan program kegiatan dan anggaran pengadaan Barang/ Jasa yang mudah diakses masyarakat, akuntabel dan transparan pada instansi pemerintah khususnya lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan maka perlu disusun Rencana Umum Pengadaan berbasis aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), berkaitan dengan hal tersebut Balai Besar KIPM Makassar sebelum melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa telah menyusun Rencana Umum Pengadaan yang diupload di aplikasi SIRUP. Adapun rincian paket RUP yang telah diupload dan diumumkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Paket Penyedia sebanyak 41 kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan jumlah anggaran Rp. 4.241.547.000,- (SIRUP awal) pada bulan Januari 2025
- b. Paket Penyedia sebanyak 20 kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan jumlah anggaran Rp. 2.114.307.000,- (SIRUP revisi) pada bulan Maret 2025
- c. Paket Swakelola Nihil kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 0,-
- d. Paket Penyedia dalam swakelola Nihil kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 0,-

Adapun periode pelaporan untuk IKU ini adalah tahunan sehingga capaian triwulan tidak bisa diukur hanya menggambarkan progres kegiatan PBJ yang diperoleh setiap triwulan.

Adapun sumberdaya manusia yang melaksanakan indikator kinerja ini selama tahun 2025 sebanyak 7 orang yang terdiri dari: KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Operator SIRUP dan Operator SAKTI (Modul Persediaan, Aset Tetap dan GLP).



Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini pada triwulan 1 tahun 2025 sebesar Rp. 65.568.000,-

yang terdiri dari :

1. 3987.EBA.994, 002.E Layanan Perkantoran, Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/ Pakaian Kerja = Rp. 45.504.000,-
2. 3987.EBA.994, 002.F Layanan Perkantoran, Pengadaan Makanan/ Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh = Rp. 20.064.000,-

Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, pagu anggaran tersebut seluruhnya diblokir sehingga nilainya menjadi Rp 0,-.

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) berbasis Web (Web based) adalah mendukung program nasional berupa efisiensi kegiatan dan penggunaan anggaran yang dikeluarkan oleh bapak presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk memperkuat program prioritas nasional melalui ASTA CITA

Manfaatnya sebagai berikut :

1. SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP
2. SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP
3. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya.



4. SiRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.  
Pengguna langsung mengisi RUP ke dalam aplikasi SiRUP pada website LKPP dengan alamat : [inaproc.lkpp.go.id/sirup](http://inaproc.lkpp.go.id/sirup)

**Akar masalah**

Potensi masalah ketidakcermatan operator SIRUP dalam melakukan penginputan data pengadaan barang dan jasa dalam aplikasi SIRUP

**Rekomendasi rencana aksi**

Meningkatkan pemahaman operator SIRUP melalui diskusi/ pelatihan/ sharing session

**Hasil tindak lanjut rekomendasi rencana aksi**

Tidak ada indikator kinerja ini pada triwulan sebelumnya

**IK 15. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I 2025	Realisasi terhadap Target TW I 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra	
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	15 Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar						75	0	0	0,00	0,00	-	-



Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima;

Balai Besar KIPM Makassar telah memperoleh predikat WBK sejak tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/KEPMEN-KP/2018. Untuk mempertahankan predikat tersebut, maka Balai Besar KIPM Makassar harus konsisten dalam penerapannya khususnya penanaman nilai-nilai integritas kepada seluruh jajaran pegawai Balai Besar KIPM Makassar beserta *stakeholder* yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP pada tahun 2022 sesuai Surat Inspektur Jenderal KKP Nomor B.420/ITJ.5/HP.550/XI/2022 tanggal 18 November 2022 Hal Hasil Pemantauan Pembangunan Zona Integritas pada Balai Besar KIPM Makassar, diperoleh nilai total sebesar 82,24 yang terdiri dari nilai Komponen Pengungkit sebesar 43,49 (Pemenuhan 21,40 dan Reform 22,09) dan Komponen Hasil sebesar 38,75. Nilai secara total telah memenuhi ambang batas menuju WBK, namun terdapat tiga area di Komponen Pengungkit (satu area pada Pemenuhan yaitu Penataan Tata Laksana dan dua area pada Reform yaitu Penataan Tata Laksana dan Penataan Sistem Manajemen SDM) yang tidak mencapai ambang batas 60%;

Sesuai surat Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor B.360/BPPMHKP.1/OT.720/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 Hal Persiapan Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan PPMHKP Tahun 2025, Balai Besar KIPM Makassar bersama 4 UPT



lainnya ditetapkan sebagai unit kerja yang akan dilakukan penilaian implementasi WBK dan WBBM oleh TPI (Tim Penilai Internal) KKP Tahun 2025-2026;

**Kegiatan yang Dilaksanakan :**

- Pada triwulan I tahun 2025 telah dilakukan serangkaian kegiatan guna mendukung penerapan WBK pada Balai Besar KIPM Makassar, diantaranya adalah :
  - a) Pertemuan pembahasan pemenuhan dokumen penerapan WBK pada tanggal 20 Februari 2025;
  - b) Penyiapan dokumen penerapan WBK oleh masing-masing penanggung jawab unsur;
  - c) Penetapan tim kerja pembangunan WBK sesuai surat tugas Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar Nomor B.325/BBKIPM.MKS/OP.210/II/2025 tanggal 3 Februari 2025;
  - d) Pemenuhan kepatuhan penyampaian LHKPN sebanyak 8 orang dan SPT Tahunan sebanyak 37 orang;
  - e) Penandatanganan pakta integritas untuk seluruh pegawai (ASN, PPNPN dan PJLP);
  - f) Penerbitan surat tugas dengan mencantumkan himbauan tidak melakukan KKN saat bertugas dan penyampaianya melalui WAG pegawai dan pelaku usaha ;
  - g) Penerbitan surat dan memorandum himbauan tidak menerima gratifikasi pada momen hari raya keagamaan dan penyampaianya melalui WAG pegawai dan pelaku usaha;
  - h) Penandatanganan berita acara tuntas pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP pada tanggal 25 Maret 2025;
  - i) Melakukan bincang inspiratif bertema pengendalian gratifikasi yang diikuti oleh seluruh pegawai pada tanggal 13 Maret 2025 dengan nara sumber Mohammad Zamrud, S.Pi., MP;



- j) Pemenuhan fasilitas pelayanan publik berupa perbaikan neon box, perbaikan running text, dan pengaktifan announcement menjaga integritas);
- Perhitungan nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah sebagai berikut :
  - (1) Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
  - (2) Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
  - (3) Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50 dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,50 dan sub komponen Presentasi TLHP minimal 5,00;
  - (4) Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15,00;
  - (5) Penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Internal KKP;

Sumberdaya manusia yang terlibat dalam penerapan kinerja ini adalah seluruh pegawai lingkup Balai Besar KIPM Makassar sebanyak 58 orang, yang terdiri dari ASN 34 orang dan non ASN 24 orang;

Alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja ini pada tahun 2025 semula sebesar Rp. 12.489.000,-, namun setelah adanya kebijakan efisiensi, anggarannya menjadi Rp. 0,-.

- Penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM pada Satuan Kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat mendukung tercapainya program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 yang meliputi (1)



pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan, (2) ekonomi biru berkelanjutan, (3) swasembada pangan, (4) peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan, dan (5) pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan; disamping itu juga dapat mendukung terwujudnya program nasional Asta Cita yang menjadi landasan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045;

- Penerapan nilai-nilai integritas menuju WBK/WBBM pada suatu unit kerja memiliki berbagai manfaat, yakni :
  - (a) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
  - (b) Mencegah terjadinya korupsi;
  - (c) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik;
  - (d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
  - (e) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat;
  - (f) Meningkatkan reputasi instansi pemerintah;
  - (g) Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024;

Target indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga pada triwulan I tahun 2025 belum dilakukan pengukuran;

#### **Akar masalah**

Keterlambatan verifikasi dokumen implementasi zona integritas WBK menuju WBBM dikarenakan penanggung jawab unsur lambat menyampaikan dokumen tersebut ke Sekretariat WBK;



**Rekomendasi rencana aksi**

- Masing-masing penanggung jawab unsur menyampaikan dokumen penerapan zona integritas WBK sesuai tanggung jawabnya melalui google sheet yang disediakan;
- Tim sekretariat melakukan verifikasi dokumen implementasi WBK sebelum divalidasi oleh Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar;

**Hasil Tindaklanjut rekomendasi rencana aksi**

Tidak ada indikator kinerja ini pada triwulan sebelumnya;



Rapat Pembahasan penerapan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi ( WBK )



**IK 16. Inovasi pelayanan publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi terhadap Target TW I 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
		Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	16 Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar						1	0	0	0,00	0,00

Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, sesuai Peraturan Menteri PANRB No.30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah secara kompetitif, adaptif, pertukaran pengalaman dan berkelanjutan melalui kompetisi, inovasi, system informasi inovasi, pemanfaatan dan pengembangan jaringan informasi, peningkatan kapasitas dan pemantauan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan K/L, Pemerintah Daerah, BMUN dan BUMD, Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun Kriteria Inovasi yaitu :

- a. Memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, untuk penyelenggaraan pelayanan publik;





- b. Efektif, yaitu memperlihatkan capaian yang nyata dan memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan;
- c. Bermanfaat, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik;
- d. Dapat ditransfer/ direplikasi, yaitu dapat dan/ atau telah dicontoh dan/ atau menjadi rujukan dan/ atau diterapkan oleh penyelenggara pelayanan publik lainnya;
- e. berkelanjutan, yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan yang diperlihatkan dalam bentuk dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan.

Di dalam peraturan Menteri PANRB No.91 tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan :

- Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan berupa gagasan/ ide kreatif orisinal dan/ atau adaptasi/ modifikasi yang memberikan manfaat langsung atau tidak langsung bagi masyarakat.

Pengembangan Inovasi pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui berbagai cara seperti Penggunaan Teknologi, Pelatihan, dan Kolaborasi.

**a. Penggunaan teknologi**

1. Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam upaya untuk meningkatkan kegiatan pemerintah





2. Menggunakan teknologi mobile
3. Menggunakan e-meterai/ meterai digital dan tanda tangan elektronik
4. Menggunakan verifikasi biometrik dan SSO pada aplikasi SPBE.

Verifikasi biometrik dan Single Sign On (SSO) adalah teknologi yang digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna dan mengakses aplikasi SPBE.

- Verifikasi biometric
  - Teknologi yang memverifikasi identitas pengguna dengan menggunakan ciri fisik atau perilaku unik, seperti wajah, sidik jari, atau iris mata
  - Data biometrik disimpan dalam sistem sebagai template digital
  - Saat pengguna mencoba mengakses layanan, sistem membandingkan data biometrik baru dengan template yang sudah disimpan
  - Verifikasi biometrik lebih aman dibandingkan dengan metode tradisional seperti PIN atau kata sandi
- Single Sign On (SSO)
  - Sistem verifikasi yang memungkinkan pengguna hanya menggunakan satu username dan password saja untuk masuk ke semua aplikasi SPBE
  - SSO mengintegrasikan berbagai aplikasi administrasi ke dalam satu sistem
  - SSO meningkatkan efisiensi dan keterpaduan layanan digital pemerintah
  - Penerapan verifikasi biometrik dan SSO pada aplikasi SPBE diharapkan dapat meningkatkan keamanan data dan memberikan kemudahan bagi pengguna





- Aplikasi SPBE adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE sendiri adalah konsep dan upaya pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam memberikan pelayanan public

**b. Pelatihan**

1. Melakukan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk pegawai sektor publik
2. Meningkatkan kompetensi petugas pemberi pelayanan
3. Memfasilitasi pegawai untuk mengikuti kursus tentang kreativitas, teknologi, dan kepemimpinan inovatif

**c. Kolaborasi**

1. Memfasilitasi pegawai untuk mengikuti kursus tentang kreativitas, teknologi, dan kepemimpinan inovatif
2. Memfasilitasi kemitraan dengan pihak swasta
3. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses peningkatan kualitas pelayanan publik

Untuk mendukung kegiatan Pelayanan Publik, Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan beberapa kegiatan :

- a. Morning briefing petugas layanan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2025 yang disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan





- b. Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bpk Mohammad Zamrud, S.Pi., M.P menjadi nara sumber pada kegiatan Forum Peningkatan Kapasitas UMKM pengolahan hasil perikanan tanggal 3 Februari 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep. Hal ini mendukung implementasi/ inovasi layanan legal ekspor UMKM
- c. Penandatanganan pakta integritas seluruh pegawai (ASN, PPNPN dan PJLP) tanggal 3 Februari 2025
- d. Rapat penyusunan proposal inovasi pelayanan publik tanggal 3 Februari 2025 dengan tema/kategori pemerataan ekonomi/ penguatan UMKM yang berfokus pada layanan legalitas ekspor UMKM lingkup Sulawesi Selatan.
- e. Bincang inspiratif pengendalian gratifikasi di lingkup Badan Mutu KKP Makassar pada tanggal 13 Maret 2025 dengan nara sumber Mohammad Zamrud, S.Pi., M.P yang diikuti oleh seluruh pegawai Balai Besar KIPM Makassar

Pelaksanaan kegiatan dengan metode pelatihan/ bincang inspiratif/ sharing session diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan serta mampu :

- Membentuk pegawai berintegritas:  
Pegawai menolak gratifikasi dan memahami bahaya penerimaan gratifikasi
- Membentuk citra positif instansi:  
Instansi bebas dari korupsi dan memiliki kredibilitas
- Mendukung lingkungan bebas korupsi:  
Instansi memiliki budaya anti gratifikasi dan lingkungan pengendalian yang kondusif
- Meningkatkan kepercayaan publik :  
Masyarakat memperoleh layanan tanpa gratifikasi, suap, dan pemerasan





Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam kegiatan inovasi pelayanan publik adalah seluruh pegawai Balai Besar KPIM Makassar sebanyak 60 pegawai, terdiri dari pegawai PNS sebanyak 36 pegawai dan pegawai PPNPN/PJLP sebanyak 24 pegawai.

Untuk mendukung kegiatan Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025, anggaran tersedia pada Pagu awal sebesar Rp.33.777.000, menjadi sebesar Rp.3.600.000

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, telah terealisasi sebesar Rp. 633.500,- atau sebesar 17,60%.

Didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 Balai Besar KIPM Makassar untuk Indikator Kinerja Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar tidak termasuk dalam kegiatan Program Nasional pada tahun 2025 namun Inovasi Pelayanan Publik umumnya tergolong sebagai kegiatan yang mendukung program nasional dalam reformasi birokrasi, transformasi digital pelayanan publik, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan daya saing dan kualitas SDM

Inovasi pelayanan publik bermanfaat untuk meningkatkan kualitas layanan, mempercepat kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Manfaat inovasi pelayanan publik yaitu :

- **Meningkatkan kualitas layanan**

Inovasi dapat membuat pelayanan publik lebih efektif, efisien, dan mudah diakses sehingga mampu memberikan rasa kepuasan yang lebih tinggi.

- **Meningkatkan Citra dan Kepercayaan Publik**





Kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat ketika layanan terasa lebih manusiawi, responsive dan pemberi layanan terpercaya.

- **Efisiensi Biaya dan Waktu**

Proses yang tadinya lambat dan birokratis bisa dipangkas serta mampu menghemat anggaran operasional.

- **Mempersiapkan menghadapi perubahan**

Inovasi dapat membantu pemerintah beradaptasi dengan perubahan dan tantangan di masa mendatang.

- **Menjawab kebutuhan masyarakat**

Inovasi dapat membantu pemerintah mengembangkan pelayanan publik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

#### **Akar masalah**

Petugas pelayanan kurang update pengetahuan, keterampilan dan sikap terhadap regulasi dan standar pelayanan publik terkini.

#### **Rekomendasi rencana aksi**

Agar seluruh pegawai dapat meningkatkan skill atau keterampilan dalam peningkatan pelayanan public dengan mengikuti pelatihan/ diklat / sharing session/ bincang inspiratif dibidang pelayanan publik dan peningkatan integritas pegawai

#### **Hasil Tindak lanjut rekomendasi rencana aksi**

Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik baru dilaksanakan di tahun 2025 sehingga belum ada rekomendasi rencana aksi sebelumnya di triwulan IV 2024





### IK 17. Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi terhadap Target TW I 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
		Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	17 Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Balai Besar KIPM Makassar	-	-	89,8	91,12	3,77	88	0	0	0,00	0,00

Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat : <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14>.

Dimulai dari triwulan II tahun 2023, e-survey telah terintegrasi untuk seluruh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu menggunakan Aplikasi SUSAN (SURvey kepuASAN masyarakat) melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14>. Materi survey terdiri dari 9 unsur berupa U1. Persyaratan Layanan; U2. Kemudahan Prosedur; U3. Waktu Penyelesaian; U4. Kesesuaian Biaya; U5. Kesesuaian Produk; U6. Kecepatan Respon; U7. Kemudahan Fitur / Kemampuan Petugas; U8. Layanan Konsultasi; U9. Kualitas Isi / Sarana.

Aplikasi SUSAN ini membagi survey berdasarkan jenis layanan. Untuk Balai Besar KIPM Makassar survey dilakukan terhadap 9 (Sembilan) jenis layanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPPMHKP nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, yaitu:





1. Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)*
2. Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (*Health Certificate for Fish and Fishery Products*) untuk pengeluaaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (**Ekspor**)
3. **Jasa pengujian** hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air
4. Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan
5. Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan
6. Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik
7. Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik
8. Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik
9. Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik

Survey juga dilakukan terhadap setiap pengguna jasa yang menerima layanan dengan jumlah sampel minimal mengacu pada formula Isaac & Michael sebagai berikut:

**Formula Isaac & Michael**  
 $S = X^2 NP (1-P) / d^2 (N-1) + X^2 P (1-P)$

$X^2$  = Nilai chi square tabel = 3,841  
 dimana  $df = 1$  dan  $\alpha = 5\% = 0,05$   
 P = Perkiraan proporsi populasi ( Jika tidak diketahui maka  $P = 0,5$ )  
 N = Jumlah Populasi  
 d = tingkat toleransi kesalahan (0,05)

$$S = \frac{3,841 \times 48 \times 0,5 \times 0,5}{(0,05)^2 \times 47} + (3,841 \times 0,5 \times 0,5)$$

$$S = \frac{46,092}{0,00235} = 42.766 \approx 43$$

PERKATA, NOV. 2002

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	100	100	1000	1000
20	20	200	200	2000	2000
30	30	300	300	3000	3000
40	40	400	400	4000	4000
50	50	500	500	5000	5000
60	60	600	600	6000	6000
70	70	700	700	7000	7000
80	80	800	800	8000	8000
90	90	900	900	9000	9000
100	100	1000	1000	10000	10000
110	110	1100	1100	11000	11000
120	120	1200	1200	12000	12000
130	130	1300	1300	13000	13000
140	140	1400	1400	14000	14000
150	150	1500	1500	15000	15000
160	160	1600	1600	16000	16000
170	170	1700	1700	17000	17000
180	180	1800	1800	18000	18000
190	190	1900	1900	19000	19000
200	200	2000	2000	20000	20000
210	210	2100	2100	21000	21000
220	220	2200	2200	22000	22000

Jumlah layanan yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 2.798 kali, maka berdasarkan tabel diatas jumlah populasi sebanyak 2.800 minimal sampel responden



yang diambil adalah sebanyak 338 responden. Hasil survey kepuasan Masyarakat diketahui jumlah responden sebesar 197, hal ini tidak memenuhi jumlah minimal responden sesuai dengan formula Isaac dan Michael tersebut. Kurangnya jumlah responden di Balai Besar KIPM Makassar salah satunya disebabkan adanya kegiatan pelayanan secara virtual terkait kebijakan efisiensi anggaran sehingga penyampaian pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat tidak berjalan secara optimal. Serta pada aplikasi SUSAN KKP ada penambahan jenis layanan yang awalnya 4 pelayanan bertambah menjadi 9 pelayanan di Balai Besar KIPM Makassar. Ada beberapa jenis layanan yang belum diberikan ke pengguna jasa karena penambahan jenis pilihan layanan pada aplikasi tersebut.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di hitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitung Survei Kepuasan Masyarakat terdapat 9 unsur pelayanan yang di kaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111.$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi perunsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$





Sebagai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan MENPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka secara rutin Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sebanyak 4 kali dalam setahun untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Balai Besar KIPM Makassar.

Pada triwulan I Tahun 2025 Balai Besar KIPM Makassar telah melaksanakan survey terhadap 197 responden, dengan nilai Indeks Kepuasan IKM 3,72 atau sebesar 93,32 setelah dikonversi (**Sangat Baik**). Nilai IKM tersebut melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 88 atau capaian 106,04%. Apabila data Hasil IKM

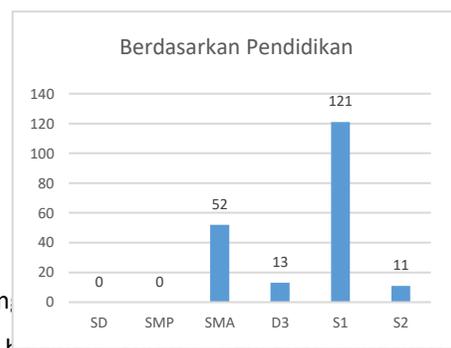
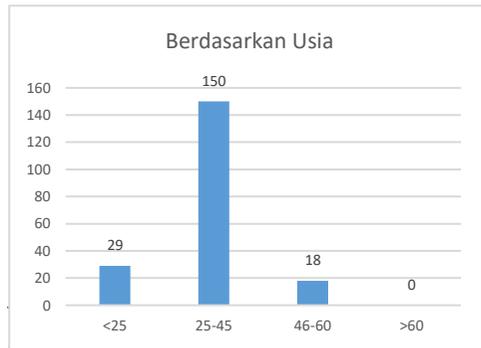
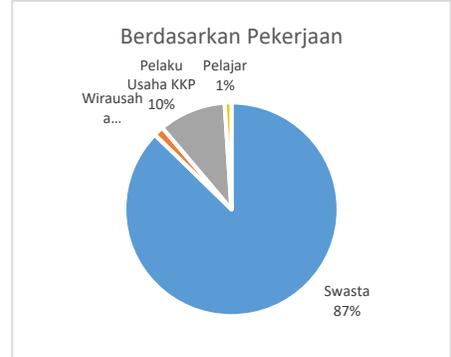
Triwulan IV Tahun 2024 dibandingkan dengan TW I Tahun 2025, maka nilai unsur pelayanan dapat dilihat sebagai berikut:

NO	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan		Perubahan
		Triwulan IV - 2024	Triwulan I - 2025	
1	Kesesuaian persyaratan	3,750	3.733	↓
2	Kemudahan prosedur	3,757	3.731	↓
3	Kesesuaian jangka waktu penyelesaian	3,755	3.724	↓
4	Kesesuaian biaya	3,787	3.711	↓
5	Kesesuaian produk	3,755	3.741	↓
6	Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi	3,738	3.706	↓
7	Kemudahan dalam penggunaan fitur	3,775	3.716	↓
8	Layanan konsultasi dan pengaduan	3,812	3.746	↓
9	Kualitas isi/sarana	3,785	3.706	↓
	Nilai IKM	94,20	93,32	





Data Rincian Responden survey IKM Triwulan I Tahun 2025 yaitu:



serta unsur kecepatan respon (membandingkan halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi sistem pelayanan yang diberikan. Berdasarkan Peraturan MenPANRB nomor 14 tahun 2017, rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Untuk itu perlu dilakukan tindakan perbaikan untuk unsur kualitas isi/ sarana serta unsur kecepatan respon walaupun nilai unsur tersebut sudah berada dalam kategori Sangat Baik.

Dalam pelayanan sertifikasi ekspor, Balai Besar KIPM Makassar menggunakan aplikasi PPK Online dan Aplikasi Sisterkaroline selanjutnya mengalami perubahan aplikasi menjadi Aplikasi SIAP Mutu (Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Mutu) dalam rangka penerbitan SMKHP digunakan pertanggal 1 Maret 2025 secara serentak semua UPT





BPPMHKP yang dikembangkan oleh Sekretariat BPPMHKP. Namun dalam pelaksanaannya, aplikasi PPK Online dan Aplikasi Sisterkaroline ini kadang mengalami kendala. Serta aplikasi SIAP Mutu masih dalam tahap pengembangan, sehingga masih dirasakan cukup mengganggu bagi pengguna layanan.

Jika dibandingkan dengan indeks kepuasan masyarakat pada periode triwulan I pada tahun 2024, maka nilai IKM pada triwulan I 2025 mengalami peningkatan dari 91,60 menjadi 93,32. Hal ini menunjukkan upaya perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh Balai Besar KIPM Makassar memperoleh respon positif dari masyarakat.

Jika dibandingkan dengan indeks kepuasan masyarakat pada periode triwulan IV pada tahun 2024, maka nilai IKM pada triwulan I 2025 mengalami penurunan dari 94,20 menjadi 93,32. Menurunnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari Triwulan IV Tahun 2024 ke Triwulan I 2025 sejalan dengan layanan konsultasi petugas pelayanan pasca transisi penerapan regulasi ekspor komoditi perikanan. Selama masa transisi aplikasi ini petugas pelayanan memberikan informasi dan solusi terhadap kebingungan pelaku usaha tentang penerapan regulasi ekspor komoditi perikanan. Sehingga nilai IKM dapat ditingkatkan dari unsur Layanan konsultasi dan Pengaduan pada Triwulan I Tahun 2025.

Balai Besar KIPM Makassar berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat "INFORMATIF" kepada Balai Besar KIPM Makassar pada Tahun 2024 lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 6 Maret 2025. Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan Masyarakat adalah dengan mengikuti kegiatan Peningkatan Kompetensi Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Sekretariat BPPMHKP pada tanggal 10 s.d. 13 Maret 2025 secara daring.





Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya	4
2.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	9
3.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	2
4.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia	1
5.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	2
6.	PPNPN	12
7.	PJLP	12
	TOTAL	42

Pada tahun 2024 terjadi revisi anggaran dimana anggaran untuk Survei Kepuasan Masyarakat dihilangkan dan dialihkan dari kegiatan Standarisasi Sistem dan Kepatuhan (3990) ke kegiatan Dukungan Manajemen Internal (3987).

Alokasi anggaran awal kegiatan survey kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap pelayanan publik Tahun 2025 yaitu Rp. 1.292.244.000,- dan terjadi revisi anggaran awal menjadi Rp. 379.200.000,-. Hingga Triwulan I tahun 2025, anggaran yang sudah terealisasi sebanyak Rp. 92.578.921,- pada langganan daya dan jasa, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 286.621.079,-.

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu prioritas nasional karena dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah memberikan perhatian atas percepatan digitalisasi pelayanan publik sejalan dengan Asta Cita.

Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Balai Besar KIPM Makassar dapat mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/ pengguna jasa di Sulawesi Selatan untuk





menyatakan persepsi atas kepuasan layanan yang telah diperoleh oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Survey kepuasan Masyarakat ini sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

#### **Akar masalah**

Petugas layanan dan Inspektur Mutu/ Asisten Inspektur Mutu kurang konsisten menyampaikan aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat kepada pengguna jasa setelah memberikan layanan.

Pada aplikasi SUSAN KKP ada penambahan jenis layanan yang awalnya 4 pelayanan bertambah menjadi 9 pelayanan di Balai Besar KIPM Makassar. Petugas layanan dan Inspektur Mutu/ Asisten Inspektur Mutu belum memutakhirkan pengetahuan mengenai isi survey dan standar pelayanan terbaru Keputusan Kepala BPPMHKP nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

#### **Rekomendasi rencana aksi**

Perlu dilakukan briefing/ sharing session kepada petugas pelayanan dan inspektur mutu untuk meningkatkan jumlah responden kepada pengguna layanan.

#### **Hasil Tindak lanjut rekomendasi rencana aksi**



Sosialisasi Penerapan Aplikasi SIAPMutu dan PMK Nomor 1 Tahun 2025 kepada petugas layanan dan pengguna jasa.



## IV. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Balai Besar KIPM Makassar Triwulan I Tahun 2025 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

Secara umum rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai Besar KIPM Makassar 112,41 (kategori Istimewa). Dari 17 (Tujuh Belas) IKU ada 4 (Empat) IKU baru yaitu :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Lokasi Pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	1	-
2.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	1	1
3.	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	75	-
4.	Inovasi pelayanan public lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	1	-

### 4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil Evaluasi kinerja Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan I Tahun 2025, sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan penyuluh perikanan yang ada di propinsi sulawesi selatan dan para penyuluh yang ada di kabupaten dalam rangka pendampingan ke UPR yang akan mengajukan sertifikasi melalui OSS; (IKU 1)
2. Inspektur Mutu mengoptimalkan kegiatan desk audit dengan lebih detail untuk mendapatkan gambaran kondisi yang sebenarnya pada unit pengolahan dengan lebih baik. (IKU2)
3. Melakukan koordinasi dengan pihak pengelola pasar untuk dilakukan sosialisasi cara penanganan ikan yang baik serta sanitasi dan hygiene, pada pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu semester II. (IKU 4)
4. Akan melaksanakan sharing session/brainstorming tentang kegiatan evaluasi kesesuaian penerbitan HC dan detail pelaksanaannya. (IKU5)
5. Dilakukan monitoring terhadap konsistensi pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium (IKU6)

### 4.3 Tindaklanjut

Adapun rekomendasi pada triwulan IV tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti pada triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Rekomendasi : Melakukan koordinasi dengan PP Untia DJPT terkait akselerasi Sertifikasi awak kapal sebagai bagian dari upaya pembinaan dari Dirjen Teknis ( IKU 1)

Tindaklanjut :



Telah dilakukan koordinasi dengan Direktur Pelabuhan dan Penanggung jawab PP Untia terkait dengan percepatan sertifikasi CPIB Kapal

2. Rekomendasi : Perlu akselerasi pelaksanaan sertifikasi SKP sesuai target yang ditetapkan (IKU2)

Tindaklanjut :

- Inspektur Mutu mengoptimalkan kegiatan desk audit dengan lebih detail untuk mendapatkan gambaran kondisi yang sebenarnya pada unit pengolahan dengan lebih baik.
- Melakukan komunikasi secara intensif dengan calon pemasok dan Direktorat teknis (PDSPKP) sebagai pelaksana penilaian CDIB dalam rangka percepatan sertifikasi SPDI;

3. Rekomendasi : Mendorong kepada para pelaku usaha di sentra penyedia pangan sehat untuk selalu menjaga mutu ikan agar tetap aman dan laik untuk konsumsi (IKU3)

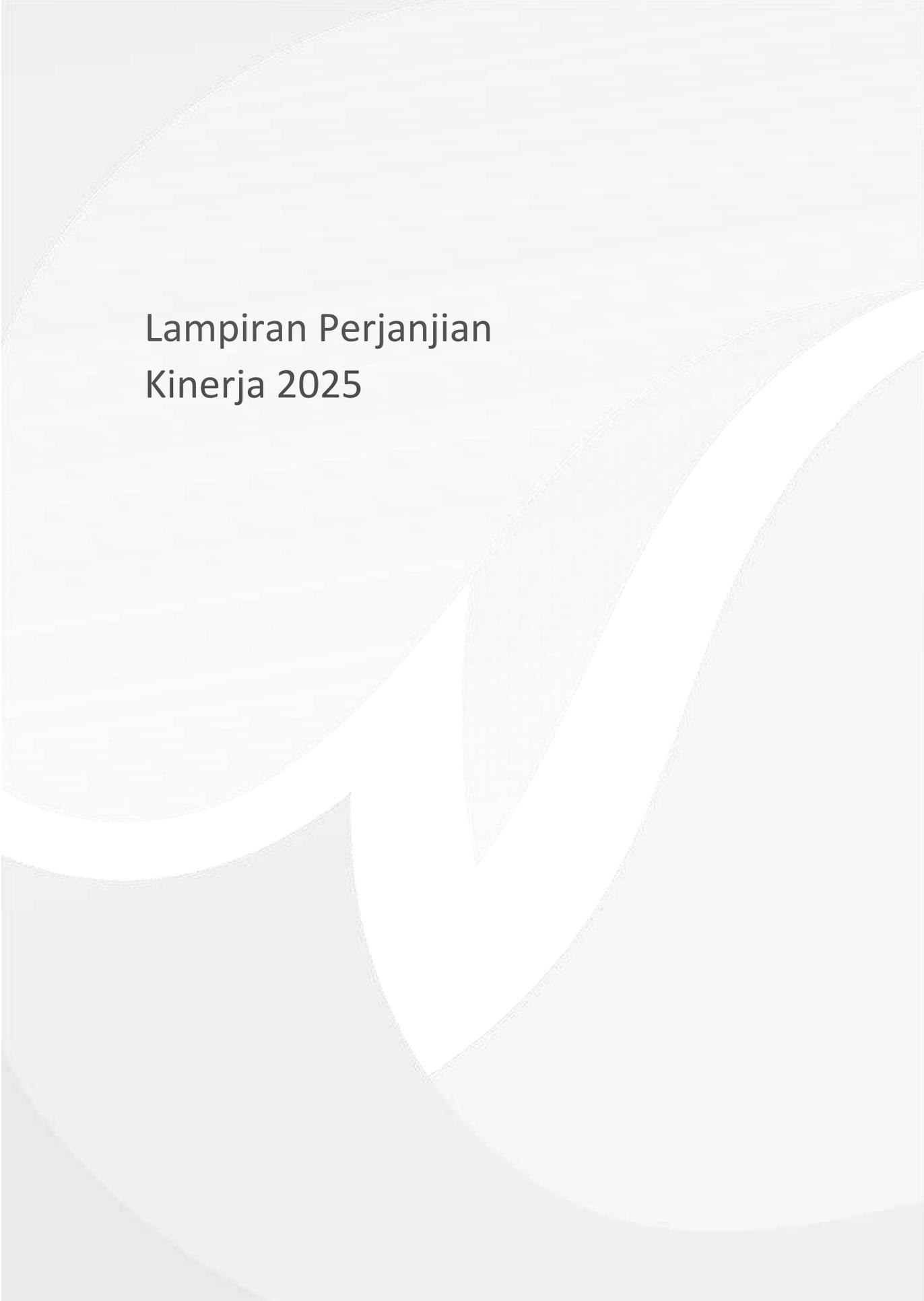
Tindaklanjut :

1. Telah dilakukan koordinasi dengan TIM pengelola anggaran sehingga pelaksanaan pengawasan mutu domestik masih bisa dilakukan pada triwulan I tahun 2025.
2. Telah dilakukan sosialisasi ke pelaku usaha pada saat kunjungan lapangan di sentra penyedia pangan sehat untuk selalu menjaga mutu ikan agar tetap aman dan laik untuk konsumsi

4. Rekomendasi Melakukan sosialisasi terhadap Keputusan Kepala BPPMHKP No. 44 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan SMHKP kepada Inspektur Mutu dan petugas pelayanan. (IKU4)

Tindaklanjut :

- 1) Telah dilakukan sosialisasi kepada inspektur mutu dan stakeholder/pelaku usaha pada triwulan I tahun 2025 yaitu sebagai berikut :
  - a. Sharing Session Pedoman Teknis Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang salah satu agendanya membahas Sosialisasi Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 44 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada tanggal 5 Maret 2025.
  - b. Sosialisasi Aplikasi SIAP MUTU dan PMK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 28 Februari 2025.
  - c. Rapat Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi SIAP MUTU bersama pelaku usaha/eksportir produk perikanan tujuan China pada tanggal 25 Maret 2025.
- 2) Telah dilakukan kordinasi dengan tim pengelola anggaran terkait dengan blokir anggaran pada tanggal 22 Januari 2025 pasca kegiatan Rapat Relokasi Blokir oleh Sekretariat BPPMHKP.



# Lampiran Perjanjian Kinerja 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU**  
**DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sri Rahayu Setyaningsih**  
Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**  
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan  
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan  
Perikanan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Ishartini**

Pihak Pertama

Plt. Kepala Balai Besar Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil  
Perikanan Makassar



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Sri Rahayu Setyaningsih**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL**  
**PERIKANAN MAKASSAR**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi)	1
		4.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi)	1
		5.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	75
		7.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	92
		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	71,5
		10.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	100
		11.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)	87
		12.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	86
		13.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	85
		14.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	76
		15.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	75
		16.	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Unit)	1
		17.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	88

## Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	11.326.526.000
2.	Manajemen Mutu	178.000.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	375.000.000
<b>Total Anggaran Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar Tahun 2025</b>		<b>11.879.526.000</b>

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua  
Kepala Badan Pengendalian dan  
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan  
Perikanan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Ishartini**

Pihak Pertama  
Plt.Kepala Balai Besar Karantina  
Ikan, Pengendalian Mutu dan  
Keamanan Hasil Perikanan Makassar



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Sri Rahayu Setyaningsih**



Lampiran Form Capaian Kinerja  
Triwulan I 2025

**Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA ( LCK ) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR  
TAHUN 2025**

<b>Nama Indikator</b>	:	<b>Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)</b>
<b>Nama Timja</b>	:	<b>Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>
<b>Periode Laporan</b>	:	<b>Triwulan I Tahun 2025</b>

<b>Nama Sasaran Kegiatan</b>	:	<b>Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</b>
<b>Nama Indikator Kinerja</b>	:	<b>Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)</b>

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	70	0	0	0	0	0	0	0	70
Realisasi	100	0	0	0	0	0	0	0	0
%Capaian	142,85	0	0	0	0	0	0	0	0

**Catatan :**

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

<b>Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)</b>
<p><b><u>DESKRIPSI</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.</li> <li>• BPPMHKP Makassar saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan, optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.</li> <li>• Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;</li> <li>b. Sertifikat Cara Pembenuhan Ikan Yang Baik (CPIB)</li> <li>c. Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB);</li> <li>d. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)</li> <li>e. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)</li> <li>f. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)</li> </ol> </li> </ul>

- Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan.
- Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan.
- Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah pedoman dan tata mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan.
- Cara Pembuatan pakan ikan yang baik yang selanjutnya disingkat CPPIB adalah serangkaian proses pembuatan Pakan Ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan.
- Cara Distribusi Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut CDOIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh proses distribusi Obat Ikan sehingga pengguna mendapatkan jaminan konsistensi mutu, keamanan, dan khasiat Obat Ikan.
- Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh produksi yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku, produk antara, dan/atau produk ruahan dan pengawasan mutu guna menghasilkan yang aman bermutu dan berkhasiat.
- Capaian iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

- %X = Jumlah hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer
- A = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CBIB
- B = Jumlah Unit menerapkan CPIB
- C = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CPPIB
- D = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB
- E = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
- F = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal
- Xn = Jumlah dari Unsur Pembentuk

Adapun target sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer pada tahun 2025 adalah sebanyak 14 sertifikat. Untuk memudahkan pencapaian target tersebut dibagi sebagai berikut :

No	Kegiatan	Target Capaian Per Triwulan			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Sertifikasi CPIB Kapal	0	3	2	0
2	Sertifikasi CBIB	1	1	1	0
3	Sertifikasi CPIB	0	1	1	1
4	Sertifikasi CPPIB	0	0	0	2

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi sertifikasi CBIB sebanyak 1 sertifikat dari target 3 sertifikat. Sedangkan realisasi sertifikasi CPIB Kapal, CPIB Pembenihan dan CPPIB Pakan pada triwulan I tahun 2025 sebanyak 0 sertifikat dari total target sebanyak 10 sertifikat. Dengan demikian persentase dapat dilihat pada rumus dibawah ini :

$$A = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

$$\%X = \frac{A}{xn} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{1} \times 100\% = 100\%$$

#### **KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

- Pada tanggal 17 Januari 2025 telah dilakukan koordinasi dengan Direktur Pelabuhan dan Penanggung jawab PP Untia terkait dengan percepatan sertifikasi CPIB Kapal
- Pada Triwulan I tahun 2025 BPPMHKP Makassar telah melakukan sertifikasi terhadap 1 jenis sertifikasi yaitu : Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB). Kegiatan CBIB dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025 di CV. Senada Horta Jl. RAJAWALI NO. 37, Desa/Kelurahan Panambungan, Kec. Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Inspeksi CBIB ini dilaksanakan oleh inspektur Mutu BPPMHKP Makassar. Adapun ruang lingkup yang diinspeksi adalah pembesaran Udang Vannamei (*Litopenaeus vannamei*) sesuai dengan kode KBLI 03254 yaitu komoditi Udang Vannamei (*Litopenaeus vannamei*).
- Pada tanggal 19 Februari 2025 telah dilakukan kegiatan Sosialisasi terhadap seluruh UPT BPPMHKP terkait SOP Pelaksanaan Sertifikasi pada Sektor Produksi Primer yang dilaksanakan oleh Pusat Mutu Produksi Primer secara daring.
- Pada tanggal 5 Maret 2025 telah dilaksanakan sharing session dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran B.233/BPPMHKP/OT.310/2025 tentang Pedoman Teknis Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk meningkatkan pemahaman dan optimalisasi pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan di BPPMHKP Makassar, sharing session ini menjadi wadah bagi setiap penanggung jawab kegiatan teknis untuk memaparkan pedoman teknis yang relevan, sejalan dengan amanat peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 8/PERMEN-KP/2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan serta peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16/PERMEN-KP/2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian.
- Pada tanggal 17 – 18 Maret 2025 telah dilaksanakan monitoring pelaksanaan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Kapal oleh Pusat Mutu Produksi Primer, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap UPT BPPMHKP Makassar diperoleh nilai total atas konsistensi pemenuhan Penerapan Persyaratan Teknis dengan jumlah 97,44 % dengan peringkat sangat baik, kegiatan dilanjutkan dengan bincang inspiratif tentang Strategi Keberhasilan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi CPIB Kapal diharapkan seluruh peserta dapat berbagai pengalaman, tantangan serta solusi yang implementasi kebijakan terkait sehingga tercipta harmonisasi dalam pengendalian dan pengawasan mutu perikanan yang lebih baik.
- Pada tanggal 18 Maret 2025 telah dilakukan kegiatan pemantapan persiapan pelaksanaan inspeksi dan surveilan tahun 2025 khususnya dalam rangka penerbitan sertifikat cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB) dan sertifikat cara distribusi obat yang baik (CDOIB) terhadap seluruh UPT BPPMHKP yang dilaksanakan oleh Pusat Mutu Produksi Primer secara daring.

#### **SDM**

- Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Inspeksi CBIB pada TW I sebanyak 2 orang yang terdiri dari 2 Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar.

#### **ANGGARAN**

- Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran awal sebesar Rp. 95.000.000 kemudian direvisi menjadi Rp 18.820.000 yang digunakan untuk Inspeksi penerapan sertifikasi produksi primer Rp. 18.820.000.

### **PROGRAM NASIONAL**

- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).
- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

### **ASPEK PEMANFAATANNYA**

- Pemanfaatan realisasi anggaran sampai dengan TW I Tahun 2025 sebesar Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	SISA (RP)
1.	Inspeksi penerapan sertifikasi produksi primer	18.820.000	-	18.820.000
JUMLAH		18.820.000	-	18.820.000

### **Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)**

- Unit Pembenuhan Rakyat dan Unit Pembesaran Rakyat belum familiar dengan aplikasi OSS sehingga berdampak dalam melakukan permohonan pengajuan sertifikasi.
- Sebagian besar awak kapal perikanan belum memiliki sertifikat Bimbingan Teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal perikanan yang merupakan salah satu persyaratan untuk permohonan Sertifikasi CPIB Kapal perikanan.
- Sehubungan dengan tindak lanjut Plan of Action dan rekomendasi hasil audit DG SANTE – Uni Eropa BPPMHKP Makassar mendapatkan target 133 kapal yang harus disertifikasi paling lambat minggu kedua bulan juni tahun 2025 namun sebanyak 88 kapal belum memiliki bimtek CPIB, 3 kapal yang mensuplai ke PT. Prima Indo Tuna sudah memiliki bimtek namun berdasarkan informasi kapal tersebut akan melakukan pembongkaran ikan kembali di PPI Lappa sinjai pada bulan 12 tahun 2025 – bulan Maret tahun 2026, sebanyak 42 kapal PT. Ocean Champ Seafood yang merupakan kumulatif dibawah 5 GT berdasarkan informasi dari pusat primer belum bisa dilakukan inspeksi dikarenakan Permen KP terkait CPIB Kapal belum terbit.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
<ul style="list-style-type: none"><li>- Berkoordinasi dengan penyuluh perikanan yang ada di propinsi sulawesi selatan dan para penyuluh yang ada di kabupaten dalam rangka pendampingan ke UPR yang akan mengajukan sertifikasi melalui OSS;</li><li>- Melakukan koordinasi dengan PP Untia DJPT terkait akselerasi Sertifikasi awak kapal sebagai bagian dari upaya pembinaan dari Dirjen Teknis;</li><li>- Melakukan penundaan sertifikasi terhadap 42 kapal yang mensuplai ke OCS dimana kapal tersebut berukuran <math>\leq 5</math> GT sampai menunggu Permen KP terkait CPIB Kapal diterbitkan.</li></ul>	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Telah dilakukan koordinasi dengan Direktur Pelabuhan dan Penanggung jawab PP Untia terkait dengan percepatan sertifikasi CPIB Kapal	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Makassar, April 2025  
Penanggungjawab Indikator Kinerja

Katimja

**I. Daftar Ruang Lingkup Sertifikasi CBIB di Triwulan I Tahun 2025**

No.	Nama UPR	Produk	Grade	No. Sertifikat
1	CV SENADA HORTA	Udang vannamei (Litopenaeus vannamei)	B	ID-CBIB-P-73-250012 Tanggal 07 Februari 2025

**DOKUMENTASI KEGIATAN  
KOORDINASI DENGAN DIREKTUR PELABUHAN DAN PENANGGUNG JAWAB PP UNTIA**



**DOKUMENTASI KEGIATAN  
INSPEKSI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK DI CV SENADA HORTA**



**DOKUMENTASI KEGIATAN**  
**SOSIALISASI TERHADAP SELURUH UPT BPPMKHP TERKAIT SOP PELAKSANAAN SERTIFIKASI PADA SEKTOR**  
**PRODUKSI PRIMER**



**DOKUMENTASI KEGIATAN**  
**SHARING SESSION DALAM RANGKA MENINDAKLANJUTI SURAT B.233/BPPMKHP/OT.310/2025 TENTANG**  
**PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**



**DOKUMENTASI KEGIATAN  
MONITORING PELAKSANAAN SERTIFIKASI CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK (CPIB) KAPAL**



**DOKUMENTASI KEGIATAN  
BINCANG INSPIRATIF TENTANG STRATEGI KEBERHASILAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN SERTIFIKASI CPIB KAPAL**





**Lampiran 2. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA ( LCK ) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR  
TAHUN 2025**

<b>Nama Indikator</b>	:	<b>Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)</b>
<b>Nama Tim/ja</b>	:	<b>Pengendalian kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan</b>
<b>Periode Laporan</b>	:	<b>Triwulan I</b>

<b>Nama Sasaran Kegiatan</b>	:	<b>Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan</b>
<b>Nama Indikator Kinerja</b>	:	<b>Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)</b>

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
<b>Target</b>	<b>70</b>								<b>70</b>
<b>Realisasi</b>	<b>115,08</b>								
<b>% Capaian</b>	<b>164,4</b>								

**Catatan :**

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

<b>Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)</b>
<p>Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.</p> <p>Keamanan hasil perikanan merupakan persyaratan utama dan terpenting dari seluruh parameter mutu pangan mengingat dewasa ini konsumen semakin menyadari bahwa mutu pangan khususnya keamanan pangan tidak dapat hanya dijamin dengan hasil uji produk akhir dari laboratorium. Produk yang aman didapat dari bahan baku yang ditangani dengan baik, diolah dan didistribusikan dengan baik sehingga akan menghasilkan produk akhir yang memenuhi standar mutu;</p> <p>Langkah untuk mengantisipasi hal tersebut serta adanya tuntutan dalam pasar bebas, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan suatu sistem jaminan mutu berdasarkan konsep HACCP yang harus diterapkan oleh pelaku usaha perikanan mulai bahan baku hingga produk akhir. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengolahan ikan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi.</p>

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) melalui Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen Pada triwulan I 2025 melaksanakan 2 (dua) kegiatan dalam Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Produk)
2. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Produk)

Indikator Kinerja ini mendukung kegiatan prioritas kedua KKP yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas ketiga KKP yaitu pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua yaitu menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan tangkap yang di terima oleh Unit Pengolahan Ikan (UPI) melalui sertifikasi HACCP, sertifikasi SKP yang merupakan persyaratan utama ekspor produk perikanan ke negara tujuan. Produk hasil perikanan Indonesia menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan yang semakin kompleks diantaranya; ketatnya persyaratan jaminan mutu (quality) dan keamanan (safety) pangan, kemampuan telusur (traceability), ramah lingkungan (environmental friendly) dan keberlanjutan (sustainability). Untuk itu diperlukan upaya tindakan penguatan penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) mulai dari hulu sampai hilir. Agar traceability dapat diterapkan secara konsisten, maka semua pihak yang terlibat dalam rantai suplai dan produksi harus melakukan pencatatan (informasi dan koleksi data) tentang hal-hal yang telah ditentukan terhadap input produksi atau produk yang dikelolanya.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga yaitu mendukung peningkatan produksi lima komoditas ekspor yaitu udang, kepiting, rumput laut, lobster dan tilapia. Di Sulawesi Selatan terdapat dua komoditas budidaya yaitu udang dan rumput laut yang dijamin mutu dan keamanan hasil perikanan melalui sertifikasi HACCP dan SKP yang merupakan persyaratan utama ekspor produk perikanan ke negara tujuan.

#### **CARA PENGUKURAN**

- Perhitungan berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2025 yaitu :

$$\%X = \frac{A+B}{xn} X100\%$$

Dimana

- %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan  
A = Persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk  
B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP  
xn = Total dari unsur pembentuk (2)

Adapun target sertifikasi HACCP pada tahun 2025 sebanyak 272 sertifikat sedangkan target sertifikasi SKP pada tahun 2025 sebanyak 319 sertifikat. Pada rumus perhitungan di atas belum dijelaskan rumus perhitungan untuk memperoleh A dan B. Untuk memudahkan perhitungan maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$A = \frac{\text{Jumlah sertifikat HACCP yang terbit (realisasi)}}{\text{Jumlah sertifikat yang expired (target)}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sertifikat SKP yang terbit (realisasi)}}{\text{Jumlah rekomendasi yang masuk}} \times 100\%$$

Persyaratan dalam penerbitan SKP mengacu pada Permen KP No. 17 Tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan SKP. Pencapaian IKU ini dapat dilihat pada matriks berikut :

No	Kegiatan	TW I 2025		
		Target/Rekomendasi	Realisasi	Persentase
1	Sertifikasi HACCP (A)	49	83	169,38%
2	Sertifikasi SKP (B)	102	62	60,78%

Catatan :

1. Realisasi sertifikasi HACCP mencapai 169,38% karena terdapat permohonan baru dan penambahan ruang lingkup produk.
2. Realisasi sertifikasi SKP hanya mencapai 60,78% karena terdapat 40 rekomendasi SKP dari Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang belum memenuhi persyaratan dan memerlukan revisi.

$$\%X = \frac{169,38 + 60,78}{2}$$

$$= 115,08 \%$$

Realisasi persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sebesar 115,08 %, dari target 70 %. Dengan demikian capaian IKU ini adalah sebesar 164,40 %.

Adapun kegiatan pendukung pada IKU pasca panen adalah kegiatan sertifikasi Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan, sertifikat SPDI (Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan) diberikan kepada pelaku usaha yang melaksanakan penyimpanan, pengadaan, sortasi dan grading serta yang melakukan kegiatan distribusi ikan dan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai KBLI terkait, menerapkan cara distribusi ikan yang baik (CDIB) dan memenuhi persyaratan pembinaan dari Direktorat Teknis.

Sehubungan tindak lanjut dari Plan of Action (PoA) dan rekomendasi hasil audit DG SANTE – Uni Eropa (UE), Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) – KKP akan segera melakukan sertifikasi terhadap pemasok yang mensuplai bahan baku ke UPI Approval Number UE. Sertifikasi tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia bahwa pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan di tahap hulu hingga hilir, sehingga permasalahan ekspor ke UE bisa terselesaikan. UPT Balai Mutu Makassar diberikan target sebanyak 18 (delapan belas) unit pemasok yang termasuk dalam pemasok ke UPI approval number Uni Eropa.

Output dari kegiatan ini berupa sertifikat SKP dan HACCP serta didukung oleh sertifikasi SPDI atau CPIB supplier. Dengan adanya sertifikasi SKP dan HACCP ini, Unit Pengolahan Ikan atau UMKM dapat melakukan kegiatan ekspor produk perikanan dengan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terjamin serta memenuhi standar negara tujuan ekspor. Hal ini didukung dengan adanya sertifikasi SPDI atau CPIB supplier yang dapat menjamin mutu dan keamanan pasokan bahan baku yang masuk ke unit pengolahan dan UMKM.

Kegiatan ekspor ini melibatkan seluruh pejabat fungsional inspektur mutu dengan total sebanyak 16 orang dan didukung oleh tenaga PPNPM sebanyak 24 orang yang penempatannya meliputi kegiatan pengujian laboratorium, pengendalian dan pengawasan mutu serta pelayanan sertifikasi mutu hasil perikanan.

Anggaran awal kegiatan pasca panen pada tahun 2025 sebesar Rp. 210.000.000,- di blokir sebesar Rp. 151.804.000,- dan pagu revisi sebesar Rp. 58.196.000,- realisasi ditriwulan I sebesar Rp.22.365.000,- atau sebesar (38,43% ).

**Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)**

- Dalam rangka mendukung kebijakan efisiensi anggaran, sebagian kegiatan sertifikasi SKP harus dilakukan dengan mekanisme virtual. Hal ini berpotensi terhadap kurang optimalnya hasil inspeksi mengingat lokasi unit pengolahan masih baru dan belum ada gambaran kondisi yang sebenarnya secara langsung.
- Pelaksanaan Sertifikasi SPDI akan dilaksanakan jika pihak pemasok/supplier harus terlebih dahulu menerapkan cara distribusi ikan yang baik (CDIB) dan memenuhi persyaratan pembinaan dari Direktorat Teknis yaitu Direktorat Penguatan Daya Saing (PDSKP) sehingga untuk melaksanakan kegiatan SPDI harus menunggu penilaian CDIB terlebih dahulu;

**Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya**

- Inspektur Mutu mengoptimalkan kegiatan desk audit dengan lebih detail untuk mendapatkan gambaran kondisi yang sebenarnya pada unit pengolahan dengan lebih baik.
- Melakukan komunikasi secara intensif dengan calon pemasok dan Direktorat teknis (PDSPKP) sebagai pelaksana penilaian CDIB dalam rangka percepatan sertifikasi SPDI;

**Penanggung Jawab**

Ketua Tim Kerja  
Pengendalian Kesehatan  
Ikan Mutu dan Keamanan  
Hasil Perikanan

<b>Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkolaborasi dengan petugas verifikasi SKP pada dinas perikanan tingkat satu agar persyaratan sebelum penerbitan rekomendasi dinas sudah terpenuhi terlebih dahulu mulai dari awal tahun 2025.</li> <li>- Telah dilakukan Rapat Koordinasi Verifikasi Verifikator Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) pada tanggal 10 Maret 2025 secara daring oleh Pusat Mutu Pasca Panen;</li> <li>- Telah dilakukan Rapat Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Mutu Domestik dan Sertifikasi SPDI Pasca Efisiensi anggaran 18 Februari 2025 secara daring oleh Pusat Mutu Pasca Panen;</li> <li>- Sosialisasi pembinaan CDIB dan Penerbitan SPDI yang dilaksanakan oleh Direktorat Logistic DITJEN PDSKPK secara daring pada tanggal 13 maret 2025.</li> </ul>	<p>Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</p>

Makassar, April 2025  
 Penanggungjawab Indikator Kinerja

Sri Rahayu Setyaningsih, S.St.Pi,M.Sc

**DOKUMENTASI KEGIATAN INSPEKSI KONSISTENSI PENERAPAN HACCP DI UPI**





**DOKUMENTASI KEGIATAN INSPEKSI SERTIFIKASI KELAYAKAN PENGOLAHAN  
DI UPI**

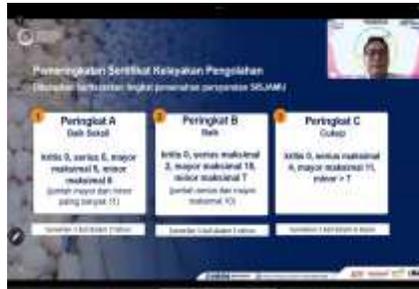




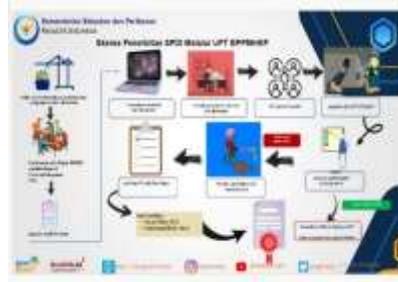
**Rapat Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Mutu Domestik dan Sertifikasi SPDI Pasca Efisiensi anggaran 18 Februari 2025**



**Rapat Koordinasi Verifikasi Verifikator Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) pada tanggal 10 Maret 2025**



Sosialisasi pembinaan CDIB dan Penerbitan SPDI yang dilaksanakan oleh Direktorat Logistic DITJEN PDSPKP secara daring pada tanggal 13 maret 2025.



**Lampiran 3. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA ( LCK ) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR  
TAHUN 2025**

<b>Nama Indikator</b>	:	<b>Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi)</b>
<b>Nama Tim/ja</b>	:	<b>Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu , dan Keamanan Hasil Perikanan</b>
<b>Periode Laporan</b>	:	<b>Triwulan 1</b>

<b>Nama Sasaran Kegiatan</b>	:	<b>Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan</b>
<b>Nama Indikator Kinerja</b>	:	<b>Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi)</b>

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	0	1	1			1		<u>1</u>	
Realisasi									
%Capaian									

**Catatan :**

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4``

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

<b>Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)</b>
<p>Pada tahun 2025 terdapat penambahan IKU baru yaitu Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi), yang ditahun sebelum hanya berupa IKU pendukung. Balai Besar KIPM Makassar adalah salah satu unit kerja yang mendapatkan target lokasi monitoring cemaran perairan dari Kepala Pusat Mutu Produksi Primer BPPMHKP pada, tahun 2025 lokasi monitoring 1 lokasi yaitu perairan wilayah Takalar yang terdiri dari 1 titik monitoring yaitu TPI Beba.</p> <p>Tujuan dari kegiatan ini adalah mengetahui apakah komoditi perikanan yang diperoleh dari perairan terpapar racun hayati laut dan logam berat serta mendapatkan data dan informasi pengujian kandungan racun hayati laut dan logam berat pada ikan sebagai bahan rekomendasi kepada Otoritas Kompeten.</p> <p>Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali dalam setahun yaitu pada setiap semester dengan sasaran titik pendaratan ikan yang ditangkap di perairan Takalar atau di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan adanya data monitoring yang mutakhir sehingga menjadi bahan rekomendasi pengelolaan perikanan di perairan Makassar.</p> <p>Adapun rencana kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan monitoring cemaran perairan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Sarana dan Prasarana</u> : Penerapan standar sanitasi dan higienis pada TPI/PPI merupakan indikator jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipasarkan sehat dan aman untuk konsumsi</li> <li>2. <u>Pengambilan Contoh</u> uji yang diambil kemudian dibawa ke Laboratorium Balai Besar KIPM Makassar untuk pengujian parameter logam berat (<i>Pb, Cd, Hg</i>) dan pengujian mikrobiologi untuk parameter <i>E.Coli, Salmonella</i> dan dikirim ke Laboratorium BUSKIPM untuk pengujian racun hayati laut parameter <i>ciguatoksine</i> dikarenakan pengujian racun hayati belum masuk ruang lingkup di laboratorium Balai Besar KIPM Makassar.</li> </ol> <p>Pada triwulan I tahun 2025 kegiatan monitoring cemaran perairan belum dilaksanakan oleh BPPMHKP makassar. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah mengikuti rapat koordinasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu produksi primer pada tanggal 19 Februari 2025 yang dilaksanakan secara daring oleh Pusat Mutu Produksi Primer BPPMHKP. Pada kegiatan tersebut Pusat Mutu Produksi Primer menyampaikan target lokasi monitoring cemaran perairan untuk BPPMHKP Makassar sebanyak 1 (satu) lokasi, yaitu Perairan Makassar.</p>

SDM yang terlibat dalam kegiatan monitoring cemaran perairan tahun 2025 adalah 8 orang yang terdiri atas 6 orang Inspektur Mutu dan 2 orang Asisten Inspektur Mutu.

Kegiatan monitoring cemaran perairan merupakan salah satu IKU yang mendukung program prioritas KKP. Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa setiap hasil tangkapan yang dikonsumsi bebas dari cemaran perairan termasuk racun hayati laut dan logam berat.

Anggaran awal kegiatan monitoring cemaran perairan pada tahun 2025 sebesar Rp. 10.000.000,- di blokir sebesar Rp. 5.340.000,- dan pagu revisi sebesar Rp. 4.660.000,- realisasi ditriwulan I sebesar Rp.380.000,- atau sebesar (8.15% ) yang digunakan untuk pembelian sampel pada kegiatan pengawasan mutu domestik sisa anggaran sebesar Rp. 4.280.000,-

Sebagai perbandingan, anggaran pada Anggaran kegiatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 92.000.000,- yang terealisasi pada Triwulan I tahun 2024 sebesar Rp. 1.090.000 atau sebesar (1,18 %) yang terdiri dari pembelian sampel uji.

Dari jumlah pagu anggaran Tahun 2025 terjadi penurunan anggaran, sedangkan dari realisasi anggaran jika dibandingkan antara triwulan I tahun 2025 dan triwulan I tahun 2024 terjadi peningkatan realisasi anggaran disebabkan nilai anggaran tahun 2024 lebih besar dari anggaran tahun 2025 dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

**Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)**

Potensi masalah petugas/pelaksana kurang memahami ketentuan yang berlaku terkait monitoring cemaran perairan.

<b>Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Melakukan Sosialisasi / Refresment/Sharing session peningkatan kompetensi inspektur mutu melalui bincang inspiratif.	<b>Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu , dan Keamanan Hasil Perikanan</b>

<b>Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Tidak ada indikator kinerja ini pada triwulan sebelumnya	<b>Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu , dan Keamanan Hasil Perikanan</b>

Makassar, 10 April 2025  
 Penanggungjawab Indikator Kinerja

Moh. Zamrud, S.Pi, M.Si

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU PRODUKSI PRIMER  
PADA TANGGAL 19 FEBRUARI 2025



**Lampiran 4. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA ( LCK ) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR  
TAHUN 2025**

<b>Nama Indikator (4)</b>	:	<b>Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi)</b>
<b>Nama Timja</b>	:	<b>Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan</b>
<b>Periode Laporan</b>	:	<b>Triwulan I</b>

<b>Nama Sasaran Kegiatan</b>	:	<b>Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan</b>
<b>Nama Indikator Kinerja</b>	:	<b>Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi)</b>

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target	1	0	1	1	0	1	1	100	<u>1</u>
Realisasi	1								
%Capaian	100								

**Catatan :**

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4`

Sm I

= Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2

= Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan

= Capaian di akhir tahun 2025

<b>Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)</b>
<p>Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berkewajiban untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat, penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pengendalian mutu di pasar/sentra produksi ikan sehat; penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan pengendalian ikan sehat dan aman untuk dikonsumsi.</p> <p>Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) memiliki peran penting dalam mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan Mutu: BPPMHKP melakukan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan.</li> <li>2. Pengendalian Mutu: BPPMHKP melakukan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan untuk mencegah terjadinya penyimpangan kualitas dan keamanan pangan.</li> </ol> <p>Dengan demikian BPPMHKP juga dapat membantu meningkatkan kualitas dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar domestik dan internasional.</p> <p>Balai Besar KIPM Makassar mengikuti kegiatan rapat pembahasan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Pengawasan Mutu Domestik dan sertifikasi SPDI Pasca Efisiensi Anggaran yang dilaksanakan oleh Pusat Mutu Pascapanen pada tanggal 18 Februari 2025 yang dihadiri oleh UPT BPPMHKP secara virtual. Pusat Mutu Pascapanen melakukan pembahasan kegiatan tahun 2025, yang bertujuan untuk berkoordinasi, berdiskusi, persamaan persepsi antara Pusat dan UPT BPPMHKP dalam pelaksanaan tugas.</p> <p>Pada tahun 2025, Balai Besar KIPM Makassar menjadi salah satu unit kerja yang diberikan target sebanyak 1 lokasi yaitu kota Makassar dengan jumlah 1 lokus. Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu setiap semester. Adapun lokasi pengawasan sentra penyedia pangan sehat yaitu pasar tradisional.</p>

Pada triwulan I tahun 2025 target pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik yaitu di Kota Makassar dengan lokus pengawasan yaitu Pasar Tradisional Daya.

Adapun agenda kegiatan yang dilakukan pada saat pengawasan mutu hasil perikanan domestik (lokasi) Triwulan I tahun 2025 yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan ke kepala UPTD Pasar Tradisional Daya.
2. Melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pasar tradisional serta mengisi checklist Pengamatan Kondisi sarana Prasarana dan Sanitasi Higiene.
3. Pengambilan sampel untuk dilakukan pengujian di laboratorium.

Rangkaian kegiatan terdapat pengambilan sampel yang dilakukan di Pasar Tradisional Daya, terdapat 5 sampel yaitu cumi-cumi segar, ikan bandeng segar, ikan katamba segar, ikan kerapu segar dan udang vannamei segar. Telah dilakukan pengujian dilaboratorium Balai Besar KIPM Makassar dengan target pengujian Organoleptik, ALT, *Echerichia coli*, *Salmonella spp*, dan Formalin. Dari hasil pengujian organoleptik, mikrobiologi dan kimia yang dilakukan terhadap sampel uji menunjukkan hasil negatif atau sesuai dengan persyaratan mutu.

Inspektur mutu juga melakukan pengamatan kondisi sarana prasarana dan sanitasi hygiene pada pasar tradisional Daya. Setelah dilakukan pengamatan pasar tradisional Daya memperoleh nilai dengan kriteria **BAIK** dimana lokasi berada ditempat bebas pencemaran dan mudah dijangkau, bangunan terawat, dibersihkan dan terawat, saluran pembuangan air memiliki kemiringan yang cukup, fasilitas sanitasi tersedia, pasokan air cukup, penerangan yang cukup baik alami maupun menggunakan lampu, transportasi pengangkutan produk cukup memadai namun masih perlu perhatian terkait cara penanganan ikan yang baik sehingga mutu produk yang dipasarkan tetap terjaga.

Adapun alokasi anggaran untuk kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik tahun 2025 sebesar Rp. 31.500.000,- Anggaran indikator kinerja ini masih belum terealisasi karena adanya kebijakan pemerintah untuk efisiensi anggaran. Namun kebijakan pemerintah tersebut tidak menjadi penghalang pada kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik.

Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 77.240.000,- yang terealisasi pada TW I tahun 2024 sebesar Rp. 10.671.929,- atau 13,82%.

Pada triwulan I tahun 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memastikan ketersediaan ikan selama Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H. Berbagai upaya dilaksanakan antara lain turun langsung ke lapangan memantau stok ikan di sentra penyedia pangan sehat, melakukan diskusi dengan pelaku utama yang melakukan aktivitas jual beli ikan serta melakukan pengawasan mutu produk perikanan untuk memastikan produk yang dikonsumsi masyarakat aman dan bermutu.

Jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan tersebut selama Triwulan I tahun 2024 adalah 10 orang yang terdiri atas Inspektur Mutu, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar, Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (MPHPI), BPPSDMKP Maros dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.

**Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)**

Potensi masalah: Berupa pemahaman pelaku usaha terkait cara penanganan ikan yang baik serta sanitasi dan hygiene masih kurang yang memungkinkan penurunan mutu ikan yang di pasarkan.

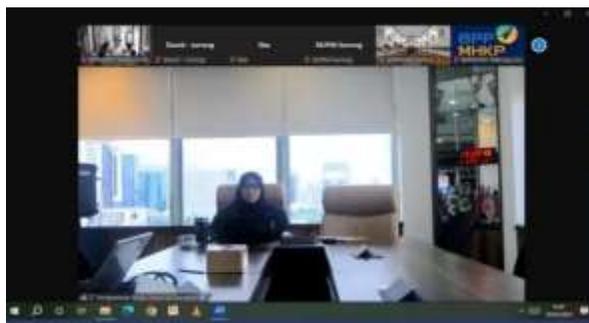
Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
1. Melakukan koordinasi dengan pihak pengelola pasar untuk dilakukan sosialisasi cara penanganan ikan yang baik serta sanitasi dan hygiene, pada pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu semester II.	Katimja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilakukan koordinasi dengan TIM pengelola anggaran sehingga pelaksanaan pengawasan mutu domestik masih bisa dilakukan pada triwulan I tahun 2025.</li> <li>2. Telah dilakukan sosialisasi ke pelaku usaha pada saat kunjungan lapangan di sentra penyedia pangan sehat untuk selalu menjaga mutu ikan agar tetap aman dan laik untuk konsumsi</li> </ol>	Katimja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Makassar, 10 April 2025  
 Penanggungjawab Indikator Kinerja

Mohammad Zamrud

**Rapat Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Mutu Domestik dan Sertifikasi SPDI Pasca Efisiensi Anggaran tanggal 18 Februari 2025**



Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik Triwulan I Tahun 2025  
di Pasar Tradisional Daya Kota Makassar



Rangkaian Kegiatan Pengujian di Laboratorium  
Balai Besar KIPM Makassar



**Lampiran 5. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA ( LCK ) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR  
TAHUN 2025**

<b>Nama Indikator</b>	:	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)
<b>Nama Timja</b>	:	Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
<b>Periode Laporan</b>	:	Triwulan I Tahun 2025

<b>Nama Sasaran Kegiatan</b>	:	<b>Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan</b>
<b>Nama Indikator Kinerja</b>	:	Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
<b>Target</b>	<b>99</b>								<b>99</b>
<b>Realisasi</b>	<b>100</b>								
<b>% Capaian</b>	<b>101</b>								

**Catatan :**

- Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Tw 1, Tw2, Tw3 dan Tw4  
 Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2  
 Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4  
 Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

**Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)**

Sistem Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tumbuh seiring dengan perkembangan tuntutan akan jaminan mutu dan keamanan pangan di tataran internasional yang semakin ketat, dan tidak hanya fokus pada mutu dan keamanan dari produk akhir. Sistem jaminan mutu dan keamanan terhadap proses merupakan tuntutan dan penerimaan masyarakat dunia (internasional) akan keberterimaan pangan, termasuk hasil perikanan. Implementasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipersyaratkan oleh internasional, harus dipenuhi oleh seluruh negara pengekspor, yang dinyatakan pada sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan yang menyertai setiap produk yang dipasarkan, baik untuk pasar dalam negeri maupun tujuan ekspor.

Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) merupakan bukti bahwa hasil perikanan yang dipasarkan telah diproses berdasarkan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diterbitkan apabila suatu produk/hasil perikanan telah memenuhi persyaratan atau standar yang berlaku sehingga aman untuk dikonsumsi manusia. Dengan berkembangnya sistem manajemen mutu, maka penerbitan SMKHP didasarkan pada hasil pengawasan mutu terhadap efektifitas penerapan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada Unit Usaha Pembenihan, Pembesaran dan Unit Pengolahan Ikan serta hasil pengujian contoh.

Peningkatan ekspor perikanan ke negara tujuan merupakan salah satu program prioritas nasional yang tergambar dalam misi Asta Cita ke 5 yaitu melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pada Asta Cita ke 5 terdapat tiga kegiatan utama yaitu peningkatan ekspor produk perikanan tangkap, pembangunan industri hilir dan industri penangkapan ikan serta penjaminan mutu dan keamanan pangan akuatik komoditas perikanan budi daya.

Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas kedua KKP yaitu kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dimana BPPMHKP memastikan bahwa setiap hasil tangkapan yang diekspor ke negara tujuan telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan melalui pengujian mutu di laboratorium dan penyiapan sertifikasi mutu untuk menjaga kredibilitas produk perikanan. Selain itu, dalam mendukung program prioritas kedua

KKP, BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu hulu hilir.

Balai Besar KIPM Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dengan salah satu tugasnya adalah melakukan pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Atas dasar hasil pengendalian tersebut, Balai Besar KIPM Makassar memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap ikan dan produk perikanan yang akan di lalulintaskan ke negara tujuan.

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan rasio kegiatan pengiriman ikan dan hasil perikanan ke luar wilayah Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak ada penolakan oleh negara tujuan ekspor. Hal ini dibuktikan diterimanya SMKHP di negara tujuan ekspor dan tidak ada notifikasi penolakan dari negara tujuan.

Perhitungan IKU ini berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2025 yaitu :

$$X = \frac{A + B}{A}$$

X : Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A : SMKHP yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B : Jumlah SMKHP yang ditolak oleh negara tujuan

A :  $\frac{\text{Jumlah HC ekspor (K1-D1) yang memenuhi syarat kesehatan - penolakan oleh negara tujuan}}{\text{Jumlah HC karantina ekspor yang diterbitkan}} \times 100\%$

Pada triwulan I tahun 2025 tercatat volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 45,04 ton senilai Rp. 1,53 T dengan jumlah sertifikat ekspor (SMKHP) yang diterbitkan sebanyak 2.798 sertifikat. Adapun pada triwulan I tahun 2024 tercatat volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 47,932 ton senilai Rp. 1,68 T dengan jumlah sertifikat ekspor (HC) yang diterbitkan sebanyak 2.444 sertifikat. Jika dibandingkan triwulan I tahun 2025 dan triwulan I tahun 2024 terdapat peningkatan jumlah sertifikat ekspor sebesar 12,65 % di triwulan I tahun 2025. Hal ini berbanding terbalik dengan volume ekspor yang mengalami penurunan di triwulan I tahun 2025 jika dibandingkan triwulan I tahun 2024 sebesar 6,03%.

Data pada triwulan I Tahun 2025 menunjukkan tidak terdapat kasus penolakan produk perikanan yang dikirim ke negara tujuan. Jika dibandingkan dengan triwulan I Tahun 2024 terdapat 1 kasus penolakan produk perikanan berupa *Frozen Flying Fish Roe* sebanyak 1 container dengan volume 12.000 Kg/1200 carton tujuan negara Taiwan. Penolakan disebabkan karena ketidaksesuaian jenis produk dengan permintaan buyer. Penolakan ini tidak masuk dalam kategori kasus penurunan mutu dan keamanan hasil perikanan sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Berdasarkan formula penghitungan IKU, Komponen A tidak dapat dimasukkan ke dalam perhitungan disebabkan sejak awal tahun 2024, terjadi perubahan nomenklatur organisasi, dimana sertifikat Kesehatan ikan bukan lagi menjadi bagian tugas dari BPPMHKP Makassar, sehingga

B :  $\frac{\text{Jumlah SMKHP ekspor yang memenuhi syarat mutu - penolakan oleh negara tujuan}}{\text{Jumlah SMKHP mutu ekspor yang diterbitkan}} \times 100\%$

$$\frac{2.798 - 0}{2.798} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian realisasi IKU ini di triwulan I tahun 2025 adalah 100%. Jika dilihat dari aspek keberterimaan di negara tujuan didapatkan nilai yang sama antara Triwulan I tahun 2025 dan triwulan I tahun 2025 yaitu 100 %;

Kegiatan sertifikasi ekspor ini melibatkan seluruh pejabat fungsional inspektur mutu sebanyak 18 orang serta didukung oleh tenaga PPNPN sebanyak 12 orang dan PJP sebanyak 12 orang yang penempatannya meliputi kegiatan pengujian laboratorium, pengawasan, dan pelayanan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

Sejalan dengan peningkatan pelayanan sertifikasi ekspor produk perikanan, pada triwulan I tahun 2025 telah dilakukan peralihan aplikasi pelayanan sertifikasi dari Sisterkaroline (Sistem Komputerisasi Karantina Ikan dan Mutu Online) ke aplikasi SIAP MUTU (Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Mutu). Aplikasi SIAP MUTU telah diberlakukan pada tanggal 1 Maret 2025 dan diharapkan dapat mengakomodir pelayanan sertifikasi mutu dan penjaminan mutu hulu hilir. Selain itu, telah dilakukan kegiatan piloting dan sosialisasi aplikasi SIAP MUTU kepada pelaku usaha.

Kegiatan peningkatan kompetensi untuk mendukung IKU ini telah diikuti oleh petugas pelayanan maupun inspektur mutu antara lain sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Waktu Kegiatan
1.	Briefing Pagi Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu	BPPMHKP Makassar	5 Januari 2025
2.	Sosialisasi Penerbitan SMKHP Melalui Aplikasi SIAP MUTU	Sekretariat BPPMHKP	22 Januari 2025
3.	Launching dan Sosialisasi Aplikasi SIAP MUTU	Sekretariat BPPMHKP	27 Februari 2025
3.	Sosialisasi Aplikasi SIAP MUTU dan PMK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	BPPMHKP Makassar	28 Februari 2025

Indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu :

1. Monitoring dan evaluasi nomor registrasi negara mitra.
2. Evaluasi kesesuaian penerbitan HC
3. Investigasi kasus penolakan ekspor di negara tujuan.

Kegiatan yang mendukung IKU ini beserta pagu anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Lock Pagu	Realisasi Anggaran TW I 2025	Persentase Realisasi
1	7010.ABR.001 Harmonisasi Persyaratan/Ketentuan Negara Mitra dan Negara Tujuan Ekspor	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	0	0
2	3989.QIC.002 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	0	0
3	3989.BIA.001 Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	0	0

Alokasi anggaran untuk mendukung IKU ini pada tahun 2025 sebesar Rp. 45.000.000. Adapun anggaran untuk indikator kinerja ini masih belum terealisasi karena adanya kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 terdapat alokasi anggaran untuk mendukung IKU ini sebesar Rp. 60.000.000 dimana terjadi penurunan pagu anggaran sebesar 25% dan realisasi pada triwulan I tahun 2024 sebesar Rp. 15.793.000. Diharapkan dengan adanya kebijakan buka blokir kegiatan yang mendukung IKU ini dapat terealisasi di triwulan selanjutnya.

<b>Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih relatif tingginya permintaan revisi SMKHP oleh pengguna jasa.</li> <li>- Terdapat kegiatan pendukung IKU berupa evaluasi kesesuaian penerbitan HC yang masih baru dan belum dilakukan sosialisasi pelaksanaannya.</li> </ul>

<b>Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan penyadartahuan/edukasi/sosialisasi tentang ketentuan revisi SMKHP melalui penilaian kepatuhan pelaku usaha.</li> <li>- Akan melaksanakan sharing session/brainstorming tentang kegiatan evaluasi kesesuaian penerbitan HC dan detail pelaksanaannya.</li> </ul>	Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan

<b>Hasil tindak lanjut rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Telah dilakukan sosialisasi kepada inspektur mutu dan stakeholder/pelaku usaha pada triwulan I tahun 2025 yaitu sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sharing Session Pedoman Teknis Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang salah satu agendanya membahas Sosialisasi Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 44 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada tanggal 5 Maret 2025.</li> <li>b. Sosialisasi Aplikasi SIAP MUTU dan PMK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 28 Februari 2025.</li> <li>c. Rapat Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi SIAP MUTU bersama pelaku usaha/eksportir produk perikanan tujuan China pada tanggal 25 Maret 2025.</li> </ol> </li> <li>2) Telah dilakukan kordinasi dengan tim pengelola anggaran terkait dengan blokir anggaran pada tanggal 22 Januari 2025 pasca kegiatan Rapat Relokasi Blokir oleh Sekretariat BPPMHKP.</li> </ol>	Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan

**Makassar, April 2025**  
**Penanggungjawab Indikator Kinerja**

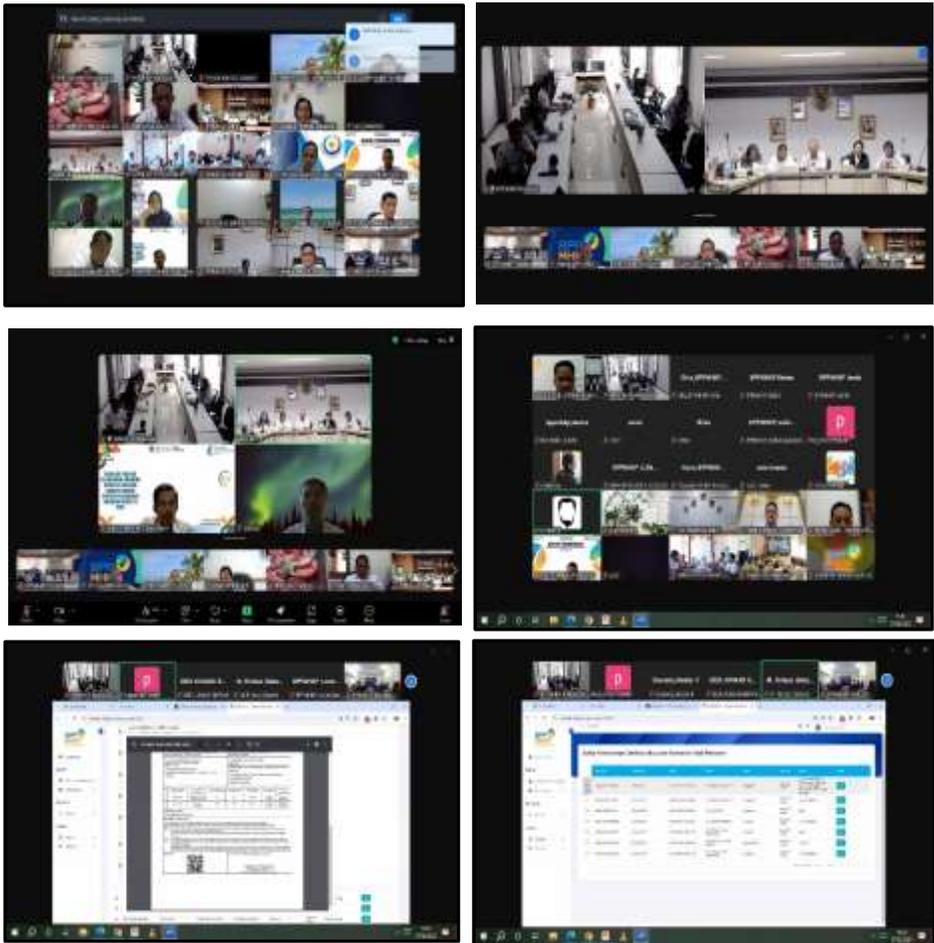
**Mohammad Zamru**

## DOKUMENTASI KEGIATAN

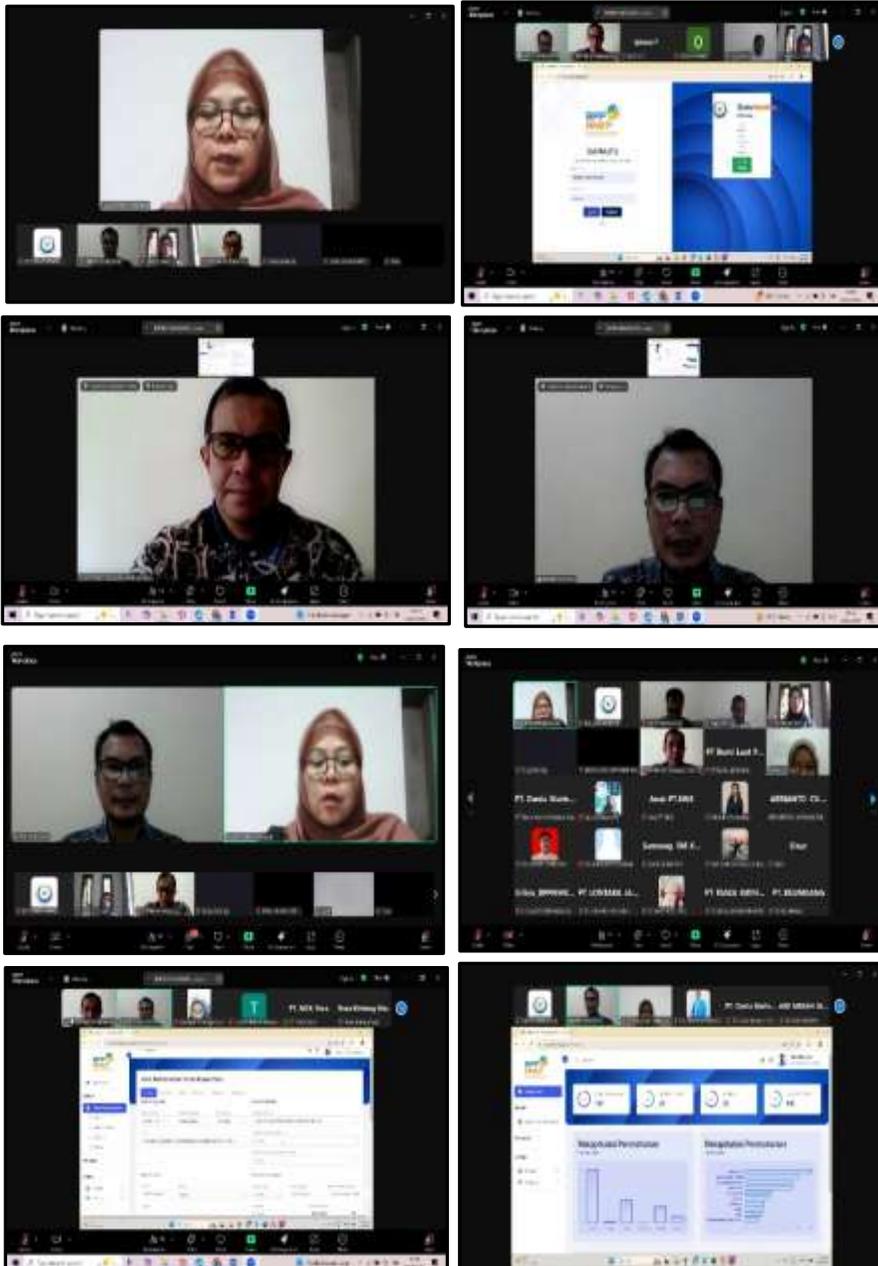
1. *Sharing Session* Pedoman Teknis Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Tanggal 5 Maret 2025



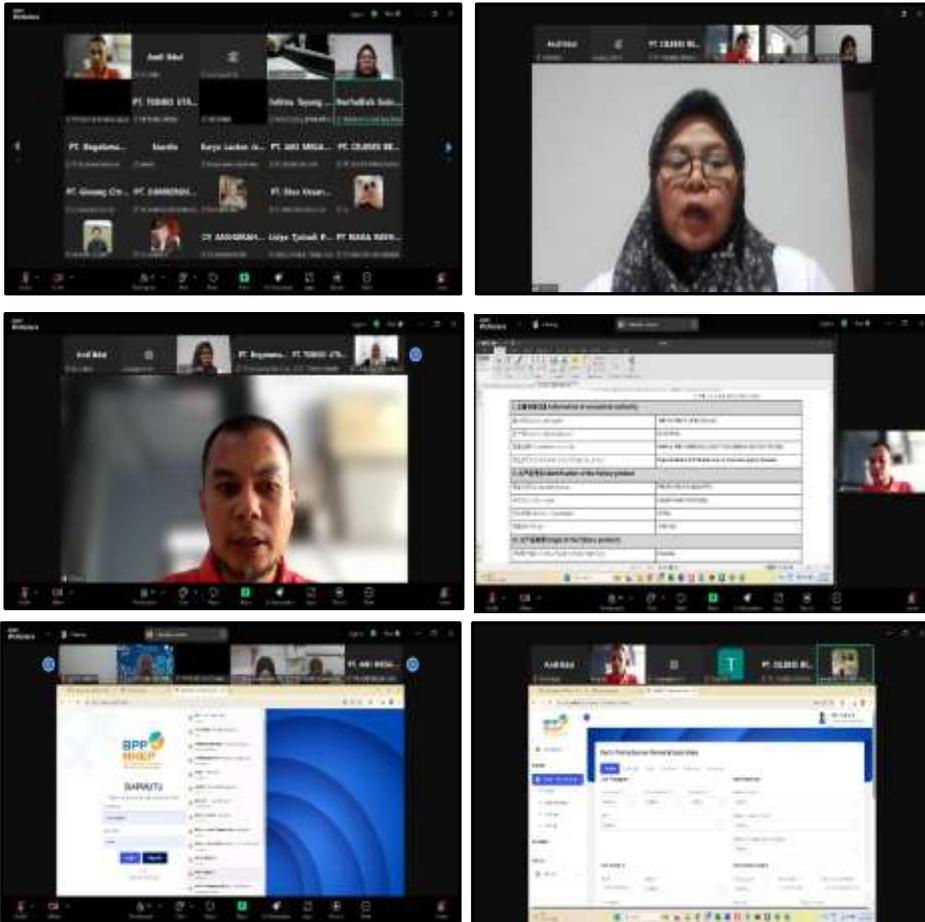
2. Launching dan Sosialisasi Aplikasi SIAP MUTU Pada Tanggal 27 Februari 2025



3. Sosialisasi Aplikasi SIAP MUTU dan PMK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Pada Tanggal 28 Februari 2025



4. Rapat Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi SIAP MUTU Bersama Pelaku Usaha/Ekspertir Tujuan China Pada Tanggal 25 Maret 2025



**Lampiran 6. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA ( LCK ) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR  
TAHUN 2025**

<b>Nama Indikator</b>	:	<b>Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)</b>
<b>Nama Timja</b>	:	<b>Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>
<b>Periode Laporan</b>	:	<b>Triwulan I Tahun 2025</b>

<b>Nama Sasaran Kegiatan</b>	:	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar
<b>Nama Indikator Kinerja</b>	:	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	75	75	75	75	75	75	75		75
Realisasi	-								
%Capaian	-								

**Catatan :**

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

<b>Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga Inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.</li> <li>Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi (ISO 17020).</li> <li>Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17020 yang dinilai melingkupi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Persyaratan Umum</li> <li>Persyaratan Struktural</li> <li>Persyaratan Sumberdaya</li> <li>Persyaratan Proses</li> <li>Persyaratan Sistem Manajemen</li> </ol> </li> <li>Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi adalah kegiatan surveilan penerapan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Selama Triwulan I Tahun 2025, terdapat 94 kali pelaksanaan surveilan penerapan HACCP.</li> <li>Pada Triwulan I Tahun 2025 telah pula dilakukan Sharing Session pedoman teknis pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai Keputusan Kepala BPPMHK Nomor 44 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada tanggal 5 Maret 2025 di Aula Balai Besar KIPM Makassar yang diikuti oleh inspektur mutu Balai Besar KIPM Makassar untuk meningkatkan pemahaman inspektur mutu dalam pelaksanaan kegiatan surveilan HACCP.</li> <li>Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi diperoleh dengan menggunakan rumus :             <math display="block">\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}</math> <p>dimana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><math>\bar{x}</math> = Rata rata</li> <li><math>x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n</math> = Nilai tingkat pemenuhan ke - 1, 2, 3, ..., n</li> <li>n = Banyaknya nilai tingkat pemenuhan</li> </ul> </li> </ul>

- Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini dilaksanakan oleh 21 orang mulai dari Manager Puncak hingga inspektur mutu hasil perikanan yang telah memiliki nomor registrasi inspektur mutu dan/atau telah mengikuti pelatihan HACCP dasar.
- Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi ini mendukung program prioritas nasional yaitu swasembada pangan melalui ekonomi biru. Pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi memberikan jaminan kepada negara-negara importir akan pangan yang sehat dan aman konsumsi berupa komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan. Pemenuhan sistem manajemen mutu juga memberikan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.
- Anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu bersumber dari DIPA Balai Besar KIPM Makassar tahun 2025 sebesar Rp. 3.500.000,-. Bila dibandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya, maka anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 20.000.000,- atau menurun sebesar 82,5% dari anggaran tahun sebelumnya.
- Pada Triwulan I Tahun 2025, anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu belum direalisasikan sama sekali. Anggaran sebesar Rp. 3.500.000,- rencananya akan direalisasikan pada Triwulan II berupa iuran tahunan sebanyak Rp. 1.500.000,- dan sisanya sebanyak Rp. 2.000.000,- berupa anggaran pertanggunggugatan jika terdapat kesalahan dalam kegiatan surveilan yang mengakibatkan kerugian pada audit.
- Pada Triwulan I Tahun 2025, belum dilakukan penilaian Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi oleh Pusat Manajemen Mutu. Untuk itu pada Triwulan I Tahun 2025 ini Balai Besar KIPM Makassar belum memperoleh nilai penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi.

**Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)**

Potensi masalah dalam penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi adalah tidak konsistennya pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Dilakukan monitoring terhadap konsistensi pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium	Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Status akreditasi sistem manajemen mutu lembaga inspeksi SNI ISO/IEC 17020:2012 tetap dipertahankan dengan melakukan penerapan SNI ISO/IEC 17020:2012 pada kegiatan operasional Balai Besar KIPM Makassar.	Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji

Makassar, 9 April 2025  
 Penanggungjawab Indikator Kinerja

Muhammad Irfan Rais

LAMPIRAN. DOKUMENTASI KEGIATAN SURVEILAN PENERAPAN SNI ISO/IEC 17020:2012  
TRIWULAN I TAHUN 2025



FOTO SOSIALISASI JUKNIS SURVEILAN TGL 5 MARET 2025



**Lampiran 7. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA ( LCK ) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR  
TAHUN 2025**

<b>Nama Indikator</b>	:	<b>Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)</b>
<b>Nama Tim/ja</b>	:	<b>Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>
<b>Periode Laporan</b>	:	<b>Triwulan I Tahun 2025</b>

<b>Nama Sasaran Kegiatan</b>	:	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar
<b>Nama Indikator Kinerja</b>	:	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	75	75	75	75	75	75	75		75
Realisasi	91,23								
%Capaian	121,64								

**Catatan :**

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4`

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

<b>Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.</li> <li>• ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri.</li> <li>• Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Lingkup;</li> <li>2. Acuan Normatif;</li> <li>3. Persyaratan Umum;</li> <li>4. Persyaratan Struktural;</li> <li>5. Persyaratan Sumber Daya;</li> <li>6. Persyaratan Proses;</li> <li>7. Persyaratan Sistem Manajemen</li> </ol> </li> <li>• Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian diperoleh dengan menggunakan rumus :             <math display="block">\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}</math> <p>dimana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><math>\bar{x}</math> = Rata rata</li> <li><math>x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n</math> = Nilai tingkat pemenuhan ke - 1, 2, 3, ..., n</li> <li><math>n</math> = Banyaknya nilai tingkat pemenuhan</li> </ul> </li> <li>• Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian adalah kegiatan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan di laboratorium Balai Besar KIPM Makassar. Selama Triwulan I Tahun 2025, terdapat 3.751 kali pengujian laboratorium yang terdiri dari :</li> </ul>

1. Pengujian Organoleptik sebanyak 1.056 kali
  2. Pengujian Mikrobiologi sebanyak 1.790 kali
  3. Pengujian Kimia sebanyak 683 kali
  4. Pengujian Air dan Es sebanyak 222 kali
- Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini dilaksanakan oleh 18 orang mulai dari Manager Puncak hingga analis dan staf laboratorium yang kompeten dalam melaksanakan sistem manajemen mutu laboratorium.
  - Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini mendukung program prioritas nasional yaitu swasembada pangan melalui ekonomi biru. Pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini memberikan jaminan kepada negara-negara importir akan pangan yang sehat dan aman konsumsi berupa komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan. Pemenuhan sistem manajemen mutu juga memberikan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.
  - Anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu bersumber dari DIPA Balai Besar KIPM Makassar tahun 2025 sebesar Rp. 36.537.000,-. Bila dibandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya, maka anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 70.000.000,- atau menurun sebesar 47,8% dari anggaran tahun sebelumnya.
  - Pada Triwulan I Tahun 2025, anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu telah direalisasikan sebesar Rp. 1.500.000,- atau sebesar 4,1 % dari anggaran tahun 2025. Sisa anggaran sebesar Rp. 35.037.000,- rencananya akan direalisasikan pada Triwulan II, III, dan IV sesuai dengan jadwal penerapan sistem manajemen mutu laboratorium untuk kegiatan kalibrasi alat, uji profisiensi, uji banding, dan biaya assesmen.
  - Pada Triwulan I Tahun 2025, telah dilakukan penilaian Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium pada tanggal 20 Maret 2025 oleh Pusat Manajemen Mutu. Dari kegiatan verifikasi tersebut, Balai Besar KIPM Makassar memperoleh nilai sebesar 91,23 dari target sebesar 75. Sehingga output kegiatan penerapan sistem manajemen mutu telah terealisasi sebesar 121,64 %.

**Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)**

Potensi masalah dalam penerapan sistem manajemen mutu laboratorium adalah tidak konsistennya pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Dilakukan monitoring terhadap konsistensi pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium	Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Status akreditasi sistem manajemen mutu laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017 tetap dipertahankan dengan melakukan surveilan penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017 dari KAN. Rencana pelaksanaan surveilan tersebut adalah di bulan Mei 2025.	Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji

Makassar, 9 April 2025  
 Penanggungjawab Indikator Kinerja

Muhammad Irfan Rais

LAMPIRAN. DOKUMENTASI KEGIATAN PENGUJIAN LABORATORIUM TRIWULAN I TAHUN 2025



LAMPIRAN. DOKUMENTASI KEGIATAN VERIFIKASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU LABORATORIUM TRIWULAN I TAHUN 2025



**Lampiran 8. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA ( LCK ) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR  
TAHUN 2025**

<b>Nama Indikator</b>	:	<b>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ( IKPA ) Lingkup Balai Besar KIPM Makassar</b>
<b>Nama Timja</b>	:	<b>Dukungan Manajerial</b>
<b>Periode Laporan</b>	:	<b>Triwulan I 2025</b>

<b>Nama Sasaran Kegiatan</b>	:	Terselenggarannya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
<b>Nama Indikator Kinerja</b>	:	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ( IKPA ) Lingkup Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	92								92
Realisasi	100								
%Capaian	109								

**Catatan :**

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4`

Sm I

= Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2

= Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan

= Capaian di akhir tahun 2025

**Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)**

**DESKRIPSI**

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan atau pengelola fishkal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dan belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini terintegrasi dengan Aplikasi OM-SPAN. Penilaian IKPA diatur pada Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

xxx  
xv  
Ruang lingkup :

PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 mengatur mengenai pengukuran dan penilaian secara sistematis dan objektif atas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dengan menggunakan IKPA dan menggunakan aplikasi yang dikelola oleh DJPB.

xxx  
xv  
Aspek Pengukuran dan Indikator Kinerja

Pengukuran IKPA meliputi 3 aspek :

1. Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini terdiri dari:
  - a. Revisi DIPA bobot 10 %
  - b. Deviasi halaman 3 DIPA bobot 15%
2. Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini terdiri dari:
  - a. Penyerapan anggaran bobot 20%
  - b. Belanja Kontraktual bobot 10%
  - c. Penyelesaian Tagihan bobot 10%

- d. Pengelolaan UP dan TUP bobot 10%
  - e. Dispensasi Surat Perintah Membayar bobot 0%
3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini adalah capaian output. Bobot capaian output adalah 25%.

**KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

Capaian nilai IKPA Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 100 persen dari target 92. Hal ini berdasarkan surat dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran Nomor:S-50/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Penyesuaian data dan perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025. hal-hal yang mendasari adanya pemberian nilai IKPA dengan nilai sempurna atau 100 persen adalah:

- Adanya efisiensi atas anggaran belanja TA 2025 yang berdampak pada pelaksanaan anggaran Kementerian Lembaga dan pada akhirnya mempengaruhi penilaian indikator kinerja pada IKPA;
- Berdasarkan informasi dari Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, terdapat pengembangan Aplikasi SAKTI yang berdampak terhadap layanan keuangan kepada Satker pada periode Februari 2025 yang mempengaruhi penilaian indikator kinerja pada IKPA.

Sehingga untuk menindaklanjuti kondisi di atas dan dinamika pelaksanaan anggaran pada awal tahun anggaran, serta dalam rangka menerapkan prinsip fairness treatment dalam penilaian IKPA, dilakukan penyesuaian data dan perhitungan penilaian dengan memberikan nilai 100 untuk seluruh indikator penilaian IKPA selama Triwulan I TA 2025.

- Tabel perbandingan capaian kinerja indikator pelaksanaan anggaran TW I 2025 dan TW I 2024

Indikator kinerja	Bobot	Periode		Kenaikan /Penurunan
		TW I 2024	TW I 2025	
Kualitas Perencanaan Anggaran				
Revisi DIPA	10	10	10	0,00
Deviasi Hal III DIPA	15	10	15	0,50
Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
Penyerapan Anggaran	20	20	20	0,00
Belanja Kontraktual	10	10	10	0,00
Penyelesaian Tagihan	10	10	10	0,00
Pengelolaan UP dan TUP	10	9,91	10	0,01
Dispensasi SPM	0	5	0	0,00
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				
Capaian Output	25	0	25	100,00
<b>Nilai Total</b>	<b>100</b>	<b>74,91</b>	<b>100</b>	<b>0,335</b>

Pada tabel diatas terlihat adanya kenaikan nilai IKPA pada TW I 2025 dibandingkan TW I 2024 sebesar 0,335. Kenaikan TW I 2025 dipengaruhi oleh terbitnya surat dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran Nomor:S-50/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang penyesuaian data dan perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025.

- Tabel perbandingan capaian kinerja pelaksanaan anggaran TW I 2025 dan TW IV 2024

Indikator kinerja	Bobot	Periode		Kenaikan /Penurunan
		TW IV 2024	TW I 2025	
Kualitas Perencanaan Anggaran				
Revisi DIPA	10	10	10	0,00
Deviasi Hal III DIPA	15	13,82	15	0,09
Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
Penyerapan Anggaran	20	19,2	20	0,04
Belanja Kontraktual	10	9,2	10	0,09
Penyelesaian Tagihan	10	10	10	0,00
Pengelolaan UP dan TUP	10	9,93	10	0,01
Dispensasi SPM	0	0	0	0,00
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				
Capaian Output	25	25	25	0,00
<b>Nilai Total</b>	<b>100</b>	<b>97,16</b>	<b>100</b>	<b>0,029</b>

Pada tabel diatas terlihat adanya kenaikan nilai IKPA pada TW I 2025 dibandingkan TW IV 2024 sebesar 0,029. Kenaikan TW I 2025 dipengaruhi oleh terbitnya surat dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran Nomor:S-50/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang penyesuaian data dan perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025.

### SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja pelaksanaan anggaran, Balai Besar KIPM Makassar membentuk sebuah tim pengelola anggaran yang terdiri dari 10 pegawai yang dituangkan pada :

- Surat Perintah Tugas Pengelola Anggaran Nomor: B.329/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 yang merupakan revisi dari Surat Perintah Tugas Nomor: B.009/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 karena adanya perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar KIPM Makassar. Tim ini terdiri dari 9 orang yaitu:
  - 1 Orang Kuasa Pengguna Anggaran;
  - 1 Orang Pejabat Pembuat Komitmen;
  - 1 Orang Pejabat Penandatanganan SPM;
  - 1 Orang Bendahara Pengeluaran;
  - 3 Orang Staf KPA dan;
  - 2 Orang Staf PPK
- Surat Perintah Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor: B.005/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2025 tgl 2 Januari 2025 dengan beranggotakan 1 Pegawai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

### ANGGARAN dan ASPEK PEMANFAATANNYA

Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran pada kegiatan layanan manajemen keuangan dan layanan perkantoran gaji dan tunjangan. Berikut adalah masing masing penjelasan pagu dari realisasi anggarannya.

- Layanan manajemen keuangan  
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp23.450.000. Pada TW I 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar 0 persen. Pagu kegiatan ini masih terblokir seluruhnya. Output dari layanan manajemen keuangan adalah mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan untuk perbendaharaan dan administrasi keuangan.
- Layanan perkantoran gaji dan tunjangan  
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp6.983.259.000. Pada TW I 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar 1.997.000.161 atau 28,60 persen. Output dari layanan perkantoran gaji dan tunjangan adalah pembayaran gaji dan tunjangan seluruh pegawai Balai Besar KIPM Makassar.

Total pagu anggaran untuk mendukung capaian kinerja pelaksanaan anggaran adalah sebesar Rp7.006.709.000 dengan realisasi anggaran 1.997.000.161 atau 28,50 persen. sedangkan jika dibandingkan dengan triwulan I 2024, kegiatan pada indikator kinerja ini hanya didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp10.632.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.076.000 atau 47,74 persen. terdapat penurunan realisasi anggaran pada Triwulan I 2025. Hal ini disebabkan pada Triwulan I 2025 pagu anggaran kegiatan layanan manajemen keuangan masih terblokir seluruhnya.

### PROGRAM NASIONAL

Pada indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar tidak terdapat kegiatan yang menjadi Program Nasional pada tahun 2025. Namun kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh presiden melalui INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asta Cita.

**LAMPIRAN KEGIATAN TRIWULAN I 2025 IKU 8**

- Terbitnya Surat Direktorat Pelaksanaan Anggaran Nomor:S-50/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang penyesuaian data dan perhitungan



- Peningkatan SDM



**Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)**

- Operator komitmen belum menyelesaikan pengisian target dan capaian output pada aplikasi SAKTI karena aplikasi SAKTI belum siap digunakan (dalam penyempurnaan).

Rekomendasi rencana aksi triwulan II 2025	Penanggung Jawab
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap penanggungjawab kegiatan agar melaporkan target dan capaian output setiap bulan paling lambat tgl 3 bulan berikutnya dengan mengisi link yang telah disiapkan.</li> <li>- Operator komitmen melakukan penginputan data target dan capaian output satker pada aplikasi SAKTI maupun modul komitmen</li> </ul>	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan IV 2024	Penanggung Jawab
<ul style="list-style-type: none"> <li>- PPK dan Tim pada TW I 2025 telah menyelesaikan kontrak : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan jasa internet PT Indonesia Comnet Plus sampai pada tahap penandatanganan kontrak. Dan akan direalisasikan pengerjaan sampai pada tahap pembayaran pada TW II 2025</li> <li>• Pengadaan penyedia jasa lainnya perorangan 12 orang (sekretaris, pramubakti, petugas kebersihan, petugas keamanan, penyiap bahan uji mutu, dan petugas pelayanan informasi)</li> </ul> </li> </ul>	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Makassar, 9 April 2025  
Penanggungjawab Indikator Kinerja

Karwit, S.Pi

**Lampiran 9. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA ( LCK ) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR  
TAHUN 2025**

<b>Nama Indikator</b>	:	<b>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar</b>
<b>Nama Timja</b>	:	<b>Dukungan Manajerial</b>
<b>Periode Laporan</b>	:	<b>Triwulan I 2025</b>

<b>Nama Sasaran Kegiatan</b>	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
<b>Nama Indikator Kinerja</b>	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target							71,5		71,5
Realisasi									
%Capaian									

**Catatan :**

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4``

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

<b>Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)</b>
<div style="background-color: #d4af37; padding: 5px; border: 1px solid black; margin-bottom: 10px;"> <b>DESKRIPSI</b> </div> <p>Menteri keuangan melaksanakan evaluasi kinerja anggaran sebagai salah satu instrument penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara professional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/lembaga, unit eselon I / dan / satuan kerja bersangkutan. Sedangkan fungsi peningkatan kualitas dimaksud bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor- faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA- K/L dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.</p> <p>Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan sebagai salah satu dasar untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan;</li> <li>• Penyusunan reviu angka dasar;</li> <li>• Penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahun berkenan; dan</li> <li>• Pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi</li> </ul> <p>Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran, Menteri Keuangan dapat melibatkan Kementerian/Lembaga; dan/atau pihak-pihak lain, yang antara lain meliputi akademisi, pakar dan praktisi.</p> <p>Untuk memantau Nilai Kinerja Anggaran, Kementerian Keuangan telah membuat suatu aplikasi yaitu Aplikasi Monev Kementerian Keuangan. Hal ini dimaksudkan agar setiap organisasi dapat selalu memantau dashboard kinerja anggaran dan melakukan peningkatan pada aspek-aspek penunjang Nilai Kinerja Anggaran tersebut.</p>

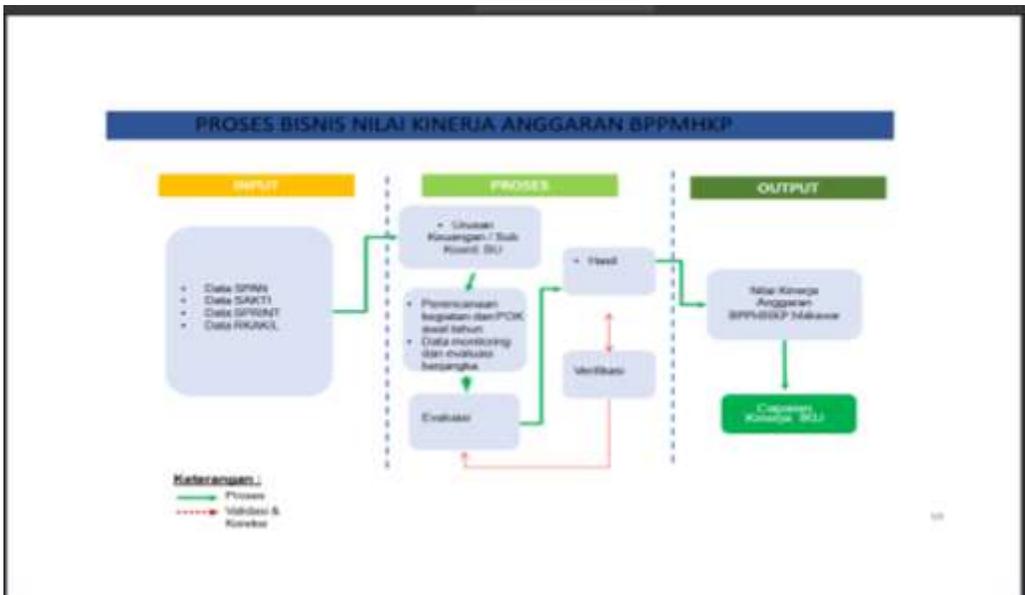
## KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pada triwulan I tahun 2025 telah dilakukan serangkaian kegiatan untuk mendukung tercapainya target kinerja ini antara lain :

- Penyusunan revisi anggaran
- Rapat pembahasan penyusunan rencana aksi pelaksanaan anggaran tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 di BPPMHKP Makassar
- Rapat relokasi blokir anggaran tanggal 22 Januari 2025 yang dilaksanakan Sekretariat BPPMHKP

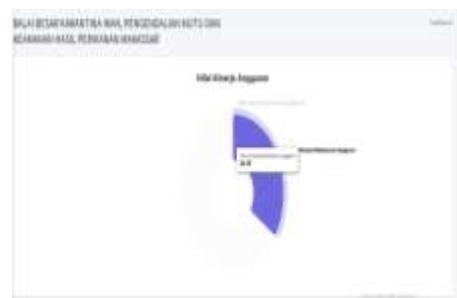
Aplikasi Monev Kementerian Keuangan pengukuran Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan pada 2 kategori yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Sedangkan untuk tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya Nilai Kinerja Anggaran didasarkan dari 4 aspek yaitu Aspek Penyerapan, Konsistensi, Capaian realisasi Output, dan Nilai Efisiensi.

Berikut adalah proses bisnis terbentuknya data pada dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu



Dasboard Aplikasi Monev Kemenkeu

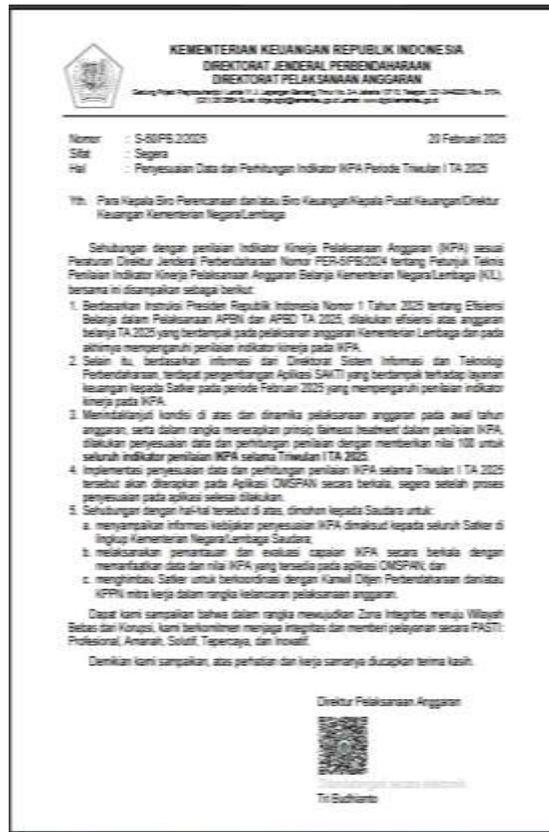
Penjelasan Dasboard Nilai Kinerja Anggaran Triwulan I tahun 2025



1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 65,62 %
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 34,38 %

Berdasarkan tampilan dashboard diatas, total Nilai Kinerja Anggaran TW.I Tahun 2025 adalah sebesar 100 atau "Sangat Baik".

Capaian nilai perencanaan anggaran Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 100 persen dari target 71,5, dimana nilai perencanaan juga berintegrasi dengan nilai IKPA. Nilai tersebut tidak menggambarkan nilai sebenarnya, hal ini disebabkan karena adanya surat dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran Nomor:S-50/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025.



## SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung tercapainya IKU ini, Balai Besar KIPM Makassar membentuk sebuah tim pengelola anggaran yang terdiri dari 9 pegawai yang dituangkan pada :

- Surat Perintah Tugas Pengelola Anggaran Nomor: B.329/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 yang merupakan revisi dari Surat Perintah Tugas Nomor: B.009/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 karena adanya perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar KIPM Makassar. Tim ini terdiri dari 9 orang yaitu:
  - 1 Orang Kuasa Pengguna Anggaran;
  - 1 Orang Pejabat Pembuat Komitmen;
  - 1 Orang Pejabat Penandatanganan SPM;
  - 1 Orang Bendahara Pengeluaran;
  - 3 Orang Staf KPA dan;
  - 2 Orang Staf PPK

Komitmen untuk terus meningkatkan kinerja berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara menjadi prioritas Balai Besar KIPM Makassar.

### ANGGARAN dan ASPEK PEMANFAATANNYA

Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran pada kegiatan layanan perencanaan dan penganggaran dan layanan perkantoran, perawatan, Gedung dan Bangunan. Berikut adalah masing masing penjelasan pagu dari realisasi anggarannya.

- Layanan Perencanaan dan penganggaran  
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 57.675.000,-. Pada TW I 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 17.406.459,-. Pagu kegiatan ini masih terblokir sebesar Rp. 40.268.000,-. Output dari layanan perencanaan dan penganggaran adalah mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan untuk perbendaharaan dan administrasi keuangan.
- Layanan perkantoran, perawatan, Gedung dan Bangunan  
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 295.884.000,-. Pada TW I 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 1.052.000,-. Pagu kegiatan ini masih terblokir sebesar Rp. 142.480.000,-. Output dari layanan perencanaan dan penganggaran adalah mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan untuk perbendaharaan dan administrasi keuangan.

### PROGRAM NASIONAL

Pada Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar tidak terdapat kegiatan yang menjadi Program Nasional pada tahun 2025. Namun kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh presiden melalui INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asa cita.

#### Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Belum terinputnya capaian output karena pada aplikasi SAKTI belum siap digunakan (dalam penyempurnaan).

Rekomendasi rencana aksi triwulan II 2025	Penanggung Jawab
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan penginputan target dan capaian output bulan Januari sampai Maret 2025 melalui aplikasi SAKTI modul komitmen;</li> <li>- Mengoptimalkan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2025;</li> <li>- Menindaklanjuti hasil monitoring tersebut dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran.</li> </ul>	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial
Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Rencana Aksi TW IV Tahun 2024	Penanggung Jawab
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2025;</li> <li>- Telah menindaklanjuti hasil monitoring dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran.</li> </ul>	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

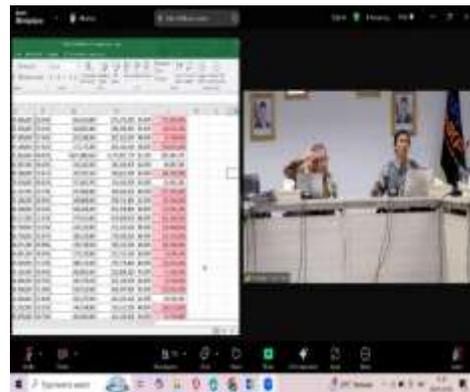
Makassar, April 2025  
Penanggungjawab Indikator Kinerja

Karwit, S.Pi

**Dokumentasi Rapat Pembahasan Penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025 di BPPMHKP Makassar**



**Dokumentasi Rapat Relokasi Blokir Anggaran Pada Tanggal 24 Januari 2025 di selenggarakan oleh Sekretariat BPPMHKP**



**Lampiran 10. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA ( LCK ) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR  
TAHUN 2025**

<b>Nama Indikator (10)</b>	:	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)
<b>Nama Timja</b>	:	Dukungan Manajerial
<b>Periode Laporan</b>	:	Triwulan I 2025

<b>Nama Sasaran Kegiatan</b>	:	Tata Kelola Pemerintah yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
<b>Nama Indikator Kinerja</b>	:	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	100	100	100	100	100	100	100	-	100
Realisasi	100	-	-	-	-	-	-	-	-
%Capaian	100%	-	-	-	-	-	-	-	-

**Catatan :**

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4``

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

<b>Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)</b>
<p>Dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan kegiatan dan anggaran oleh Satuan Kerja, maka secara periodik dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal (Inspektorat Jenderal) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan). Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (<i>reasonable assurance</i>) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh obyek pemeriksaan (Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah), dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir;</p> <p>Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Satker BKIPM merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektifitas sistem pengendalian intern;</p> <p>Indikator kinerja "Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)" dihitung berdasarkan dokumen formal yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK dan dokumen bukti tindak lanjut penyelesaiannya. Formulasi perhitungannya menggunakan pendekatan sebagai berikut :</p> $\% P = (A/B) \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>% P = Persentase penyelesaian temuan;  A = Jumlah nilai temuan atas laporan keuangan tahun anggaran 2024 yang diselesaikan pada LHP atas kepatuhan;  B = Nilai temuan BPK tahun 2024;</p> <p>Pada tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2024 pada Balai Besar KIPM Makassar oleh BPK RI. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan temuan sebagai berikut :</p>

No.	Uraian Penyetoran	Nomor dan Tanggal NTPN
1	Penyetoran kelebihan pembayaran tunjangan kinerja pegawai sebesar Rp. 6.770.700,-	No. 100F61QV3RROBMS Tanggal 23 April 2024
2	Penyetoran kelebihan pembayaran tunjangan fungsional tertentu sebesar Rp. 5.280.000,-	No. C1C023CIFK4LPCAN Tanggal 23 April 2024
3	Penyetoran kelebihan pembayaran tunjangan fungsional umum sebesar Rp. 5.040.000,-	No. 9871D2G4VP19CBJ2 Tanggal 23 April 2024

Dengan demikian capaian indikator kinerja ini adalah :

$$\begin{aligned} \% P &= (A/B) \times 100\% \\ &= (17.090.700/17.090.700) \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2024, maka capaiannya sama yaitu 100%;

Pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh pengelola anggaran sebanyak 11 orang, yang terdiri dari :

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran;
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen;
- (3) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
- (4) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- (5) Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;
- (6) Bendahara Penerimaan;
- (7) Bendahara Pengeluaran;
- (8) Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai;
- (9) Verifikator Keuangan (3 orang);

Alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kinerja adalah sebesar Rp. 144.310.000,- yang terdiri dari :

- Layanan Perkantoran, Perawatan Kendaraan Bermotor Rp. 135.310.000,-;
- Layanan perkantoran, pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu Rp. 9.000.000,-;

Sampai dengan triwulan I tahun 2025 telah direalisasikan anggaran Rp. 20.622.161,- atau 17,41% yang digunakan untuk Layanan perkantoran, Perawatan kendaraan bermotor sebesar Rp. 12.906.110,- dan Layanan perkantoran, pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu sebesar Rp. 7.716.051,-

#### **Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)**

Potensi terjadinya tuntutan ganti rugi (kelebihan belanja) dikarenakan pengelola anggaran kurang cermat dalam melakukan verifikasi dokumen tagihan pembayaran belanja;

<b>Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Memastikan kecermatan verifikasi keuangan secara berjenjang (Verifikator Keuangan/Analisis Keuangan, PPK dan Bendahara) dengan penggunaan lembar checklist	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

<b>Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Rencana Aksi TW IV Tahun 2024</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Telah dilaksanakan internalisasi Kepmen KP Nomor 56 tahun 2024 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran APBN dilingkungan KKP pada tanggal 22 Januari 2025	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Makassar, 10 April 2025  
 Penanggung Jawab,  
 Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

**Karwit**

Dokumentasi : Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan internalisasi Kepmen KP Nomor 56 tahun 2024 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran APBN dilingkungan KKP pada tanggal 22 Januari 2025 BPPMHKP Makassar



**Lampiran 11. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA ( LCK ) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR  
TAHUN 2025**

<b>Nama Indikator (11)</b>	:	<b>Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar</b>
<b>Nama Tim/ja</b>	:	<b>Dukungan Manajerial</b>
<b>Periode Laporan</b>	:	<b>Triwulan 1</b>

<b>Nama Sasaran Kegiatan</b>	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
<b>Nama Indikator Kinerja</b>	:	<b>Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar</b>

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target			81			87	87		87
Realisasi									
%Capaian									

**Catatan :**

- Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4  
 Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2  
 Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4  
 Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

<b>Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)</b>
<p>Menurut UU No 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.</li> <li>2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.</li> <li>3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;</li> <li>b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan</li> <li>c. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN.</li> </ol> </li> </ol>

**KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10		

Nilai Realisasi IP ASN Tahun 2024 adalah 90,78, Target Tahunan IP ASN Tahun 2025 adalah 87 dengan periode pelaporan Semester I nilai target 81 dan Semester II nilai target 87.

Nilai IP ASN dicapai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
  - a. Kualifikasi;
  - b. Kompetensi;
  - c. Kinerja; dan
  - d. Disiplin.
2. Indikator dimensi kualifikasi yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN BKKIPM Makassar, meliputi:
  - a. Pendidikan S-3 = -
  - b. Pendidikan S-2 :
    - S2 Keahlian : 7 orang
  - c. Pendidikan S-1 /D-IV :
    - S-1 /D-IV Keahlian : 12 orang
    - S-1 /D-IV Pengawas : 1 orang
    - S-1 /D-IV Pelaksana : 4 orang
  - d. Pendidikan D-III ;
    - D-III Keterampilan : 4 orang
    - D-III Pelaksana : 1 orang
  - e. SLTA :
    - SLTA Keterampilan : 1 orang
    - SLTA Pelaksana : 4 orang
3. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:
  1. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
  2. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
  3. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).
4. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi kompetensi yang digunakan, terdiri dari:
  - a. Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan

- b. Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:
- 1) Diklat Kepemimpinan (khusus bagi Jabatan Manajerial);
  - 2) Diklat Fungsional (khusus bagi Jabatan Fungsional);
  - 3) Diklat Teknis bagi (khusus bagi Jabatan Pelaksana); dan
- Pengembangan Kompetensi 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 (dua puluh empat) JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

Pengukuran dimensi kompetensi adalah sebagai berikut:

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Non manajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	<b>Hasil Penilaian Kinerja</b>					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	<b>Diklat Kepemimpinan</b>					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	<b>Diklat Fungsional</b>					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	<b>Diklat Teknis</b>					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	<b>Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun</b>					
	<b>PNS</b>					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	<b>PPPK</b>					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

5. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

Predikat Kinerja yang diperoleh ASN BBKIPM Makassar pada tahun 2024 adalah BAIK

6. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup:
- a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
  - b. Hukuman disiplin ringan;
  - c. Hukuman disiplin sedang; dan

d. Hukuman disiplin berat,

Pengukuran dimensi disiplin adalah sebagai berikut:

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

7. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi, meliputi:
  - a. Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemuktahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN;
  - b. Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari aplikasi SIASN BKN sesuai pemuktahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN;
  - c. Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN / rekonsiliasi data laporan kinerja ke SIASN BKN / data riwayat Kinerja pada SIASN BKN dengan nilai Kinerja dari Kategori; dan
8. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, terdiri atas:
  - a. Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
  - b. Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
  - c. Kinerja memiliki bobot 30% (tiga puluh persen); dan
  - d. Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).

9. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019

$$\begin{aligned}
 IP &= \sum_{i=1}^4 IP_i & IP_1 &= W_{1j} \times R_{1j} \\
 & & IP_2 &= W_{2k} \times R_{2k} \\
 & & IP_3 &= W_{3l} \times R_{3l} \\
 & & IP_4 &= W_{4m} \times R_{4m} \\
 &= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4
 \end{aligned}$$

Berdasarkan Aplikasi <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>

*Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin*

$$IP \text{ ASN BKKIPM Makassar} = \frac{\text{Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN BKKIPM Makassar}}{\text{Jumlah pegawai ASN BKKIPM Makassar}}$$

10. Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN, antara lain:

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

11. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai aktif yang berkedudukan hukum sebagai ASN, meliputi:
  - a. PNS; dan
  - b. PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN.
12. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:
  - a. Calon PNS (CPNS);
  - b. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
  - c. Dipekerjakan (DPK); dan
  - d. Tugas Belajar dibiayai

Capaian IP ASN Individu Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan 1 Tahun 2025 belum terupdate pada aplikasi <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>

Capaian IP ASN Instansi Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan 1 Tahun 2025 belum terupdate pada aplikasi <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>

Sebagai perbandingan nilai IP ASN dengan beberapa UPT lain di Kementerian Kelautan dan Perikanan belum dapat disajikan pada Triwulan 1 Tahun 2025 belum terupdate pada aplikasi <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>

#### Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang kompeten dan berkualitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan indeks profesionalitas ASN

Balai Besar KIPM Makassar, mempunyai SDM Aparatur Sipil Negara sebanyak 34 Pegawai yang sebelumnya 37 pegawai yang pensiun ( Hasbullah, S. St) , mutasi ke Biro umum (Abdul Mubarak Azis, S.T, dan Poltek Bone (Ir Anwar, M. Si)

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Subbagian Umum	1
2.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya	4
3.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	9
4.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	2
5.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia	1
6.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	2
7.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	1
8.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	2
9.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
10.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	1
11.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	1
12.	Pelaksana	9
	Total	34

#### Anggaran

Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, Dukungan Manajerial, 3987.EBA.962.A Layanan Umum , Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Tahun 2024 :

- Anggaran Awal sebesar Rp. 77.285.000
- Anggaran Setelah revisi sebesar Rp. 73.833.000
- Realisasi Rp. 73.434.365 ( 99.46%)

Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, Dukungan Manajerial, 3987.EBA.962.A Layanan Umum , Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Tahun 2025 :

- Anggaran Awal sebesar Rp. 18.064.000
- Anggaran Setelah Blokir sebesar Rp. 0

**Program Nasional**

Pada indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar Lingkup Balai Besar KIPM Makassar memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asta Cita, dengan meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara akan meningkatkan kualitas Sumber daya manusia dalam pelayanan publik.

**Aspek Pemanfaatan**

Kompetensi ASN Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar bermanfaat bagi kemajuan organisasi dan individu, IP ASN merupakan area pengembangan diri dalam Upaya peningkatan profesionalitas sebagai ASN dan IP ASN sebagai kontrol sosial agar ASN bertindak professional dalam kaitan pelayanan publik.

**Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)**

- Aplikasi My ASN dan SIASN di Triwulan I bermasalah sehingga usulan diklat/pelatihan pegawai tidak terlihat pada history pengajuan ASN sehingga pada Aplikasi SIASN tidak terbaca pada menu Inbox usulan.
- Efisiensi Anggaran berdampak pada pengembangan kompetensi pegawai sehingga tidak dapat dilakukan pelatihan secara langsung.

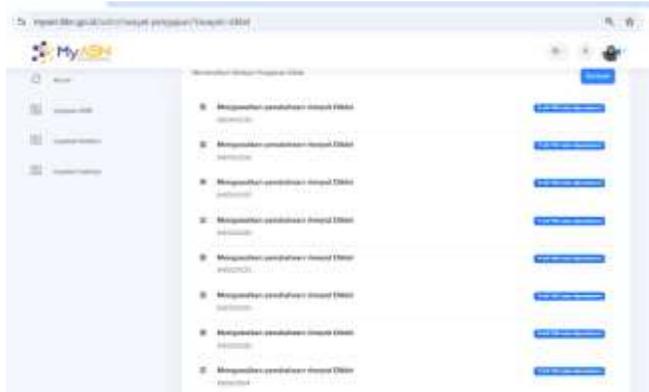
Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
- Aparatur sipil negara mengikuti pelatihan secara daring	Ketua TIM Kerja Dukungan Manajerial

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilakukan verifikasi dan approval data pelatihan yang telah dikirimkan pegawai pada <i>myasn.bkn.go.id</i></li> <li>2. Telah disampaikan kepada pegawai yang nilai kompetensi belum maksimal untuk mengikuti seminar/latihan untuk pengembangan kompetensi dan melakukan penginputan sertifikat diklat/pelatihan pada aplikasi <i>myasn.bkn.go.id</i>;</li> </ol>	Ketua TIM Kerja Dukungan Manajerial

Makassar, 10 April 2025  
 Penanggungjawab Indikator Kinerja

Karwit

**FOTO KEGIATAN UPDATE DATA PADA APLIKASI KEPEGAWAIAN**



History Pengajuan pelatihan Aparatur Sipil Negara MyAsn

A screenshot of a web application interface for 'SIASN'. The page title is 'Manajemen Monitoring Usulan'. It displays a table with 10 rows of data. Each row contains a number, a date, a status, a name, a value, and a 'Detail' button. The data in the table is as follows:

No	Tgl	Status	Nama	Nilai	Aksi
1	2023-02-20	Diklat	ASRI	1000000	Detail
2	2023-02-20	Diklat	ASRI	1000000	Detail
3	2023-02-20	Diklat	ASRI	1000000	Detail
4	2023-02-20	Diklat	ASRI	1000000	Detail
5	2023-02-20	Diklat	ASRI	1000000	Detail
6	2023-02-20	Diklat	ASRI	1000000	Detail
7	2023-02-20	Diklat	ASRI	1000000	Detail
8	2023-02-20	Diklat	ASRI	1000000	Detail
9	2023-02-20	Diklat	ASRI	1000000	Detail
10	2023-02-20	Diklat	ASRI	1000000	Detail

Monitoring usulan pelatihan Aparatur Sipil Negara pada aplikasi SIASN

**Lampiran12. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA ( LCK ) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR  
TAHUN 2025**

<b>Nama Indikator</b>	:	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
<b>Nama Timja</b>	:	Dukungan Manajerial
<b>Periode Laporan</b>	:	Triwulan I tahun 2025

<b>Nama Sasaran Kegiatan</b>	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
<b>Nama Indikator Kinerja</b>	:	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun 2024							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	-						86		86
Realisasi									
%Capaian									

**Catatan :**

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4`

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

<b>Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)</b>
<p>Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.</p> <p>Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyesuaian terhadap kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.</p> <p>Capaian diukur dengan instrument Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 4 (empat) parameter yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30 % Pada aspek ini menyampaikan dokumen perencanaan yang berupa : Renstra 2025-2029, Renja, RKAKL dan Rencana Aksi. Yang sudah dilaksanakan penyusunan RKAKL dan Rencana Aksi.  Pada Aspek ini telah menyampaikan dokumen RKAKL dan Rencana Aksi yang telah terealisasi pada triwulan I mencapai 15 %</li> <li>2. Pengukuran Kinerja dengan Bobot 30 % Pada Aspek ini menyampaikan dokumen pengukuran kinerja yang berupa : Penyusunan Manual IKU tahun 2024 yang telah diselesaikan pada triwulan I terealisasi mencapai 30 %</li> </ol>

3. Pelaporan Kinerja dengan Bobot 15 %

Pada Aspek Pelaporan Kinerja tahun 2025, dokumen yang harus disiapkan adalah Laporan Kinerja Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, triwulan IV dan Tahunan.

Pada Triwulan I sehingga terealisasi tercapai 3,75 %

4. Evaluasi Kinerja dengan Bobot 25 %

Evaluasi kinerja dilaksanakan secara internal oleh Balai Besar KIPM Makassar dan secara eksternal oleh Sekretariat BPPMHKP, Sekretariat Jenderal KKP dan Inspektorat Jenderal secara berkala (triwulanan). Evaluasi secara internal dilakukan oleh Tim Balai Besar KIPM Makassar sebelum dilakukan penyusunan Laporan Kinerja, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan setelah diselesaikan penyusunan Laporan Kinerja. Hasil akhir dari evaluasi eksternal berupa pengesahan nilai NPSS dalam Aplikasi Kinerjaku yang dapat dijadikan dasar dalam pembayaran tunjangan kinerja pegawai.

Pada Triwulan I tahun 2025 telah dilakukan evaluasi kinerja secara internal dan eksternal. sehingga realisasi tercapai 5% .

Bobot realisasi capaian :

Parameter 1 (15%) + parameter 2 (30 %) + parameter 3 (3,7 %) + parameter 4 (0%) = 48 %.

Realisasi capaian = Bobot realisasi capaian x Target

= 48 % x 86

= 41,28

- Telah dilakukan rapat sesuai dengan memorandum Balai Besar KIPM Makassar Nomor B.14/BBKIPM.MKS/TU.330/III/2025 pada tanggal 5 Maret perihal penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 17 (tujuh belas) Indikator kinerja.
- Untuk pemanfaatan melaksanakan Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 42.795.000 yang mengalami blokir sebesar Rp 42.795.000. jika dibandingkan pemanfaatan anggaran tahun 2024 sebesar Rp 26.498.000 dan terealisasi sebesar Rp 900.000 atau 7,22%
- Pada indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar tidak terdapat kegiatan yang menjadi Program Nasional pada tahun 2025. Namun yang diharapkan dengan penilaian mandiri saki tersebut dapat meningkatkan output dari program kegiatan yang terdapat dalam Tugas dan Fungsi Balai Besar KIPM Makasar. Dengan tercapainya indikator kinerja ini diharapkan satuan kerja dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan akuntabel sehingga dapat mendukung Program Prioritas KKP dan Program Prioritas Nasional
- Untuk mendukung tercapainya IKU ini didukung SDM sebanyak 7 orang terdiri dari Kasubbag Umum, Pejabat Pembuat Komitmen, Fungsional APK APBN Madya, APK APBN Muda, APK APBN Pertama, Staf Pengelola Anggaran (Bendahara Pengeluaran)

**Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)**

- Belum Optimalnya capaian Kegiatan dan anggaran pada triwulan I tahun 2025

<b>Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Mengoptimalkan capaian kegiatan dan anggaran pada triwulan selanjutnya	Tim Kerja Dukungan Manajerial

<b>Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
---	-------------------------

Telah menyampaikan laporan kinerja triwulan IV dan Laporan Kinerja Tahunan pada aplikasi E-SAKIP Reviu tepat waktu	Tim Kerja Dukungan Manajerial
--	-------------------------------

Makassar, April 2025  
Penanggungjawab Indikator Kinerja

Karwit

**DOKUMENTASI KEGIATAN**



**Lampiran 13. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA ( LCK ) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR  
TAHUN 2025**

Nama Indikator (13)	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama Timja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan I

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tatakelola pemerintahan yang Efektif, lincah, dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	85	85	85	85	85	85	85		85
Realisasi	100								
% Capaian	117,65								

**Catatan :**

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4  
 Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2  
 Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4  
 Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
<p><b>Diskripsi :</b></p> <p>Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan pemerintahan. Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.</p> <p>Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.</p> <p>Indikator Kinerja ini dihitung dari persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP pada Balai Besar KIPM Makassar berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun BAP) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2023 s/d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Balai Besar KIPM Makassar yang menjadi obyek pengawasan, dengan formula perhitungan sebagai berikut :</p> $\frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$ <p><math>\sum Nt</math> = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti;  <math>\sum N</math> = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan ;</p>

### Kegiatan yang Dilakukan :

Pada triwulan I Tahun 2025 tidak terdapat audit dari Inspektorat Jenderal KKP, sehingga realisasi indikator kinerja ini 100% sama seperti pada periode triwulan IV tahun 2024 realisasi sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja pada triwulan I tahun 2024, maka nilainya sama yaitu 100%.

### Anggaran :

Capaian indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran semula Rp. 2.126.781.000,- setelah terkena kebijakan efisiensi menjadi Rp.1.502.912.000,- yang sampai dengan triwulan I tahun 2025 terealisasi sebesar Rp.402.956.249,- atau 26,81% yang digunakan untuk belanja keperluan perkantoran, belanja pengiriman surat dinas pos pusat, belanja honor operasional satuan kerja, Belanja honor output kegiatan, belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin. Jika dibandingkan alokasi anggaran pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp.822.011.000,- terjadi peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 82,83%.

### Sumberdaya Manusia :

Jumlah SDM yang terlibat dalam mendukung tercapainya IK ini sebanyak 14 orang yang terdiri atas KPA 1 orang, PPK 1 orang, PPSPM 1 orang, Pejabat Pengadaan 1 orang, Pejabat Penerima dan Pemeriksa Barang 1 orang, Pengurus BMN 1, Bendahara 2 orang, Bendahara Penerimaan Pembantu 1 orang, Staf KPA 2 orang, Staf PPK 3 orang.

### Program Nasional dan Pemanfaatan :

Indikator kinerja ini jika tercapai maka akan mendukung keberhasilan program prioritas KKP maupun Program Prioritas Nasional Asta Cita. Tercapainya target kinerja ini mencerminkan bahwa organisasi telah melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai ketentuan dan standar yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan dan anggaran telah dilaksanakan dengan akuntabel dan tepat waktu.

Aspek pemanfaatan yang diperoleh dari kegiatan IKU ini yaitu memberikan informasi mengenai tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan, sehingga dapat mengambil tindakan dan Keputusan secara cepat, tepat dan akurat.

### Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Potensi masalah kurang cermatnya pengelola kegiatan dan anggaran dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Itjen.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
<ul style="list-style-type: none"><li>- Operator SIDAK melakukan pemantauan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan Itjen.</li><li>- Satuan Kerja melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan Itjen.</li></ul>	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

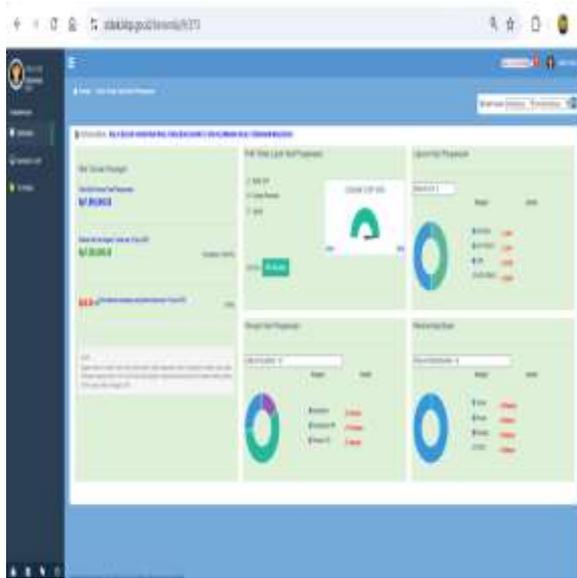
Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
<ul style="list-style-type: none"><li>- Telah dilakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan Itjen pada aplikasi SIDAK periode triwulan I Tahun 2025.</li></ul>	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Makassar, 10 April 2025  
Penanggungjawab Indikator Kinerja

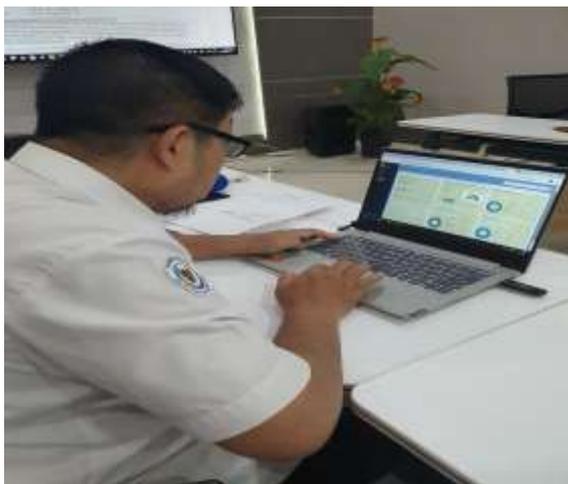
Karwit

Tampilan layar pada aplikasi SIDAK

<https://sidak.kkp.go.id/hasil-pengawasan/9/373>



The screenshot shows a detailed table of monitoring data for a specific location. The table has columns for 'No', 'Status', 'Jenis Lokasi', 'Kategori', 'Tanggal Pengawasan', 'Waktu Pengawasan', 'Kondisi Perikanan', 'Kondisi Lokasi', and 'Kondisi Perikanan'. The data rows show various monitoring results, with some cells highlighted in green. The table is presented in a blue-themed interface.



**Lampiran 14. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA ( LCK ) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR  
TAHUN 2025**

<b>Nama Indikator</b>	:	<b>Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar</b>
<b>Nama Tim Kerja</b>	:	<b>Dukungan Majemen</b>
<b>Periode Laporan</b>	:	<b>Triwulan 1</b>

<b>Nama Sasaran Kegiatan</b>	:	<b>Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</b>
<b>Nama Indikator Kinerja (14)</b>	:	<b>Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar</b>

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
<b>Target</b>	<b>76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76,00</b>	<b>-</b>	<b>76,00</b>
<b>Realisasi</b>	<b>99,06</b>								
<b>% Capaian</b>	<b>130,34</b>								

**Catatan :**

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

<b>Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)</b>
<p>Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).</p> <p>Untuk menghitung persentase capaian rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%) menggunakan rumus sebagai berikut :</p> <p align="center"><b>Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP</b> = <b>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%</b> <b>Pagu Pengadaan Barang/Jasa</b></p> <p>Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelum operator menginput data barang dan jasa ke dalam aplikasi SIRUP, terlebih dahulu berkoordinasi dan komunikasi dengan pemegang akun KPA, PPK dan Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial untuk menunggu arahan dan petunjuk selanjutnya;</li> <li>2. Menginventarisir kegiatan dan anggaran pada RKA- KL;</li> <li>3. Mengecek kesiapan internet untuk mendukung upload ke dalam aplikasi SIRUP;</li> <li>4. Mengupload Rencana umum pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar ke dalam aplikasi SIRUP</li> </ol> <p>Untuk melaksanakan program kegiatan dan anggaran pengadaan Barang/ Jasa yang mudah diakses masyarakat, akuntabel dan transparan pada instansi pemerintah khususnya lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan</p>

maka perlu disusun Rencana Umum Pengadaan berbasis aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), berkaitan dengan hal tersebut Balai Besar KIPM Makassar sebelum melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa telah menyusun Rencana Umum Pengadaan yang diupload di palikasi SIRUP. Adapun rincian paket RUP yang telah diupload dan diumumkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Paket Penyedia sebanyak 41 kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan jumlah anggaran Rp. 4.241.547.000,- (SIRUP awal) pada bulan Januari 2025
- b. Paket Penyedia sebanyak 20 kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan jumlah anggaran Rp. 2.114.307.000,- (SIRUP revisi) pada bulan Maret 2025
- c. Paket Swakelola Nihil kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 0,-
- d. Paket Penyedia dalam swakelola Nihil kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 0,-

Adapun periode pelaporan untuk IKU ini adalah tahunan sehingga capaian triwulan tidak bisa diukur hanya menggambarkan progres kegiatan PBJ yang diperoleh setiap triwulan.

Adapun sumberdaya manusia yang melaksanakan indikator kinerja ini selama tahun 2025 sebanyak 7 orang yang terdiri dari: KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Operator SIRUP dan Operator SAKTI (Modul Persediaan, Aset Tetap dan GLP).

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini pada triwulan 1 tahun 2025 sebesar Rp. 65.568.000,- yang terdiri dari :

1. 3987.EBA.994, 002.E Layanan Perkantoran, Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/ Pakaian Kerja = Rp. 45.504.000,-
2. 3987.EBA.994, 002.F Layanan Perkantoran, Pengadaan Makanan/ Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh = Rp. 20.064.000,-

Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, pagu anggaran tersebut seluruhnya diblokir sehingga nilainya menjadi Rp 0,-.

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) berbasis Web (Web based) adalah mendukung program nasional berupa efisiensi kegiatan dan penggunaan anggaran yang dikeluarkan oleh bapak presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk memperkuat program prioritas nasional melalui ASTA CITA

Manfaatnya sebagai berikut :

1. SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP
2. SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP
3. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya.
4. SiRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.
5. Pengguna langsung mengisi RUP ke dalam aplikasi SiRUP pada website LKPP dengan alamat : [inaproc.lkpp.go.id/sirup](http://inaproc.lkpp.go.id/sirup).

**Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)**

Potensi masalah ketidakcermatan operator SIRUP dalam melakukan penginputan data pengadaan barang dan jasa dalam aplikasi SIRUP

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Meningkatkan pemahaman operator SIRUP melalui diskusi/ pelatihan/ sharing session	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen

Hasil tindak lanjut rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Tidak ada indikator kinerja ini pada triwulan sebelumnya	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen

Makassar, April 2025  
 Penanggung jawab Indikator Kinerja,

Karwit, S.Pi

1. SIRUP AWAL – 13-01-205

REKAP RENCANA UMUM PENGADAAN	
TAHUN ANGGARAN : 2025	
K/L/PD:	Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Satuan Kerja:	Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar
PAKPA:	Mohammad Zamrud, S.Pi., MP 196719021982032001

1. Paket Penyedia

1.1. Paket Penyedia Terunamukan

No.	Uraian	Kode K/L/PD	Volume/Paket	Tipe/Unit	Uraian	Penyedia	Nilai	
1	Dibangun Manajemen Internal Lengkap Mutu Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan.	14750114	Berangko Bahan	APBN	Makassar (Rak)	1. Dokumen 1 Paket TRCN Ya 2. Spesifikasi teknis dan persyaratan pelaksanaan pekerjaan pengadaan (11, BUN, 01 202501) 3. Dokumen 2 Paket TRCN Ya 4. RAB (11, BUN, 01 202501) 5. PAK (11, BUN, 01 202501) 6. PAK (11, BUN, 01 202501) 7. PAK (11, BUN, 01 202501) 8. PAK (11, BUN, 01 202501) 9. PAK (11, BUN, 01 202501) 10. PAK (11, BUN, 01 202501)	Pengadaan Langsung	8.000.000
2	Dibangun Manajemen Internal Lengkap Mutu Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan.	14750111	Berangko Bahan	APBN APBN APBN	Makassar (Rak)	1. Dokumen 1 Paket TRCN Ya 2. Spesifikasi teknis dan persyaratan pelaksanaan pekerjaan pengadaan (11, BUN, 01 202501) 3. Dokumen 2 Paket TRCN Ya 4. RAB (11, BUN, 01 202501) 5. PAK (11, BUN, 01 202501) 6. PAK (11, BUN, 01 202501) 7. PAK (11, BUN, 01 202501) 8. PAK (11, BUN, 01 202501) 9. PAK (11, BUN, 01 202501) 10. PAK (11, BUN, 01 202501)	Pengadaan Langsung	16.075.000
3	Dibangun Manajemen Internal Lengkap Mutu Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan.	14750116	Berangko Bahan (Pembelian Barang Kebutuhan Pengadaan)	APBN APBN APBN	Makassar (Rak)	1. Dokumen 1 Paket TRCN Ya 2. Spesifikasi teknis dan persyaratan pelaksanaan pekerjaan pengadaan (11, BUN, 01 202501) 3. Dokumen 2 Paket TRCN Ya 4. RAB (11, BUN, 01 202501) 5. PAK (11, BUN, 01 202501) 6. PAK (11, BUN, 01 202501) 7. PAK (11, BUN, 01 202501) 8. PAK (11, BUN, 01 202501) 9. PAK (11, BUN, 01 202501) 10. PAK (11, BUN, 01 202501)	Pengadaan Langsung	8.577.000
4	Lengkap Sistem Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan.	1474223	Berangko Barang Perawatan Barang Kebutuhan	APBN	Makassar (Rak)	1. Dokumen 1 Paket TRCN Ya 2. Spesifikasi teknis dan persyaratan pelaksanaan pekerjaan pengadaan (11, BUN, 01 202501)	Pengadaan Langsung	8.000.000

Kementerian Kelautan Dan Perikanan Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar

REKAP RENCANA UMUM PENGADAAN								
TAHUN ANGGARAN : 2025								
5	Dibangun Manajemen Internal Lengkap Mutu Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan.	14750110	Berangko Barang Perawatan Barang Kebutuhan	APBN	Makassar (Rak)	1. Dokumen 1 Paket TRCN Ya 2. Spesifikasi teknis dan persyaratan pelaksanaan pekerjaan pengadaan (11, BUN, 01 202501)	Pengadaan Langsung	13.000.000
6	Dibangun Manajemen Internal Lengkap Mutu Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan.	1302520	Berangko Barang Perawatan Barang Kebutuhan (pembelian peralatan)	APBN APBN APBN	Makassar (Rak)	1. Dokumen 1 Paket TRCN Ya 2. Spesifikasi teknis dan persyaratan pelaksanaan pekerjaan pengadaan (11, BUN, 01 202501) 3. Dokumen 2 Paket TRCN Ya 4. RAB (11, BUN, 01 202501) 5. PAK (11, BUN, 01 202501) 6. PAK (11, BUN, 01 202501) 7. PAK (11, BUN, 01 202501) 8. PAK (11, BUN, 01 202501) 9. PAK (11, BUN, 01 202501) 10. PAK (11, BUN, 01 202501)	Pengadaan Langsung	128.760.000
7	Dibangun Manajemen Internal Lengkap Mutu Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan.	14750113	Berangko Barang Perawatan Barang Kebutuhan (pembelian peralatan)	APBN	Makassar (Rak)	1. Dokumen 1 Paket TRCN Ya 2. Spesifikasi teknis dan persyaratan pelaksanaan pekerjaan pengadaan (11, BUN, 01 202501)	Pengadaan Langsung	24.000.000
8	Dibangun Manajemen Internal Lengkap Mutu Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan.	1302520	Berangko Kebutuhan Peralatan	APBN APBN APBN APBN	Makassar (Rak)	1. Dokumen 1 Paket TRCN Ya 2. Spesifikasi teknis dan persyaratan pelaksanaan pekerjaan pengadaan (11, BUN, 01 202501) 3. Dokumen 2 Paket TRCN Ya 4. RAB (11, BUN, 01 202501) 5. PAK (11, BUN, 01 202501) 6. PAK (11, BUN, 01 202501) 7. PAK (11, BUN, 01 202501) 8. PAK (11, BUN, 01 202501) 9. PAK (11, BUN, 01 202501) 10. PAK (11, BUN, 01 202501)	Pengadaan Langsung	90.275.000

9	Dukungan Manajemen Internal Langkah Sajian Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kolaborasi Dan Perikanan	5022128	Strategi Langkah Awal	APBN	Mekasar (Kad)	Volume 1 Paket TRD/ Ya 1. Pengembangan (12.000.000.000.000)	Pengadaan Langsung	10.040.000
10	Dukungan Manajemen Internal Langkah Sajian Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kolaborasi Dan Perikanan	5022132	Strategi Langkah Lanjut	APBN	Mekasar (Kad)	Volume 1 Paket TRD/ Ya 1. Langkah Lanjut (12.000.000.000.000)	Pengadaan Langsung	10.040.000
11	Dukungan Manajemen Internal Langkah Sajian Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kolaborasi Dan Perikanan	5022137	Strategi Langkah Tolak	APBN	Mekasar (Kad)	Volume 1 Paket TRD/ Ya 1. Langkah Tolak (12.000.000.000.000)	Pengadaan Langsung	10.040.000

Kontribusi Rekrutmen Dan Perikanan Pada Sektor Kesehatan Dan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Mekasar

SARUP LKPP - 13.01.2025

12	Dukungan Manajemen Internal Langkah Sajian Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kolaborasi Dan Perikanan	5022137	Strategi Pemeliharaan Perikanan Dan Ikan-2 Kesehatan	APBN APBN APBN APBN	Mekasar (Kad)	Volume 1 Paket TRD/ Ya 1. Pemeliharaan Perikanan 2. Pemeliharaan Perikanan 3. Pemeliharaan Perikanan 4. Pemeliharaan Perikanan 5. Pemeliharaan Perikanan 6. Pemeliharaan Perikanan 7. Pemeliharaan Perikanan 8. Pemeliharaan Perikanan 9. Pemeliharaan Perikanan 10. Pemeliharaan Perikanan 11. Pemeliharaan Perikanan 12. Pemeliharaan Perikanan 13. Pemeliharaan Perikanan 14. Pemeliharaan Perikanan 15. Pemeliharaan Perikanan 16. Pemeliharaan Perikanan 17. Pemeliharaan Perikanan 18. Pemeliharaan Perikanan 19. Pemeliharaan Perikanan 20. Pemeliharaan Perikanan 21. Pemeliharaan Perikanan 22. Pemeliharaan Perikanan 23. Pemeliharaan Perikanan 24. Pemeliharaan Perikanan 25. Pemeliharaan Perikanan 26. Pemeliharaan Perikanan 27. Pemeliharaan Perikanan 28. Pemeliharaan Perikanan 29. Pemeliharaan Perikanan 30. Pemeliharaan Perikanan 31. Pemeliharaan Perikanan 32. Pemeliharaan Perikanan 33. Pemeliharaan Perikanan 34. Pemeliharaan Perikanan 35. Pemeliharaan Perikanan 36. Pemeliharaan Perikanan 37. Pemeliharaan Perikanan 38. Pemeliharaan Perikanan 39. Pemeliharaan Perikanan 40. Pemeliharaan Perikanan 41. Pemeliharaan Perikanan 42. Pemeliharaan Perikanan 43. Pemeliharaan Perikanan 44. Pemeliharaan Perikanan 45. Pemeliharaan Perikanan 46. Pemeliharaan Perikanan 47. Pemeliharaan Perikanan 48. Pemeliharaan Perikanan 49. Pemeliharaan Perikanan 50. Pemeliharaan Perikanan 51. Pemeliharaan Perikanan 52. Pemeliharaan Perikanan 53. Pemeliharaan Perikanan 54. Pemeliharaan Perikanan 55. Pemeliharaan Perikanan 56. Pemeliharaan Perikanan 57. Pemeliharaan Perikanan 58. Pemeliharaan Perikanan 59. Pemeliharaan Perikanan 60. Pemeliharaan Perikanan 61. Pemeliharaan Perikanan 62. Pemeliharaan Perikanan 63. Pemeliharaan Perikanan 64. Pemeliharaan Perikanan 65. Pemeliharaan Perikanan 66. Pemeliharaan Perikanan 67. Pemeliharaan Perikanan 68. Pemeliharaan Perikanan 69. Pemeliharaan Perikanan 70. Pemeliharaan Perikanan 71. Pemeliharaan Perikanan 72. Pemeliharaan Perikanan 73. Pemeliharaan Perikanan 74. Pemeliharaan Perikanan 75. Pemeliharaan Perikanan 76. Pemeliharaan Perikanan 77. Pemeliharaan Perikanan 78. Pemeliharaan Perikanan 79. Pemeliharaan Perikanan 80. Pemeliharaan Perikanan 81. Pemeliharaan Perikanan 82. Pemeliharaan Perikanan 83. Pemeliharaan Perikanan 84. Pemeliharaan Perikanan 85. Pemeliharaan Perikanan 86. Pemeliharaan Perikanan 87. Pemeliharaan Perikanan 88. Pemeliharaan Perikanan 89. Pemeliharaan Perikanan 90. Pemeliharaan Perikanan 91. Pemeliharaan Perikanan 92. Pemeliharaan Perikanan 93. Pemeliharaan Perikanan 94. Pemeliharaan Perikanan 95. Pemeliharaan Perikanan 96. Pemeliharaan Perikanan 97. Pemeliharaan Perikanan 98. Pemeliharaan Perikanan 99. Pemeliharaan Perikanan 100. Pemeliharaan Perikanan	Pengadaan Langsung	10.040.000
----	--	---------	--	------------------------------	---------------	---	--------------------	------------

13	Dukungan Manajemen Internal Langkah Sajian Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kolaborasi Dan Perikanan	5022134	Strategi Program Sertifikasi Perikanan	APBN	Mekasar (Kad)	Volume 1 Paket TRD/ Ya 1. Program Sertifikasi Perikanan (12.000.000.000.000)	Pengadaan Langsung	10.040.000
14	Dukungan Manajemen Internal Langkah Sajian Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kolaborasi Dan Perikanan	5022134	Kelembagaan Kelembagaan Perikanan Dan Perikanan	APBN APBN	Mekasar (Kad)	Volume 1 Paket TRD/ Ya 1. Kelembagaan Kelembagaan Perikanan (12.000.000.000.000)	Pengadaan Langsung	1.012.204.000
15	Dukungan Manajemen Internal Langkah Sajian Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kolaborasi Dan Perikanan	5022136	Layanan Internal	APBN	Mekasar (Kad)	Volume 1 Paket TRD/ Ya 1. Layanan Internal (12.000.000.000.000)	Pengadaan Langsung	10.040.000
16	Dukungan Manajemen Internal Langkah Sajian Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kolaborasi Dan Perikanan	5022132	Penyediaan Layanan	APBN	Mekasar (Kad)	Volume 1 Paket TRD/ Ya 1. Penyediaan Layanan (12.000.000.000.000)	Pengadaan Langsung	10.040.000
17	Dukungan Manajemen Internal Langkah Sajian Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kolaborasi Dan Perikanan	5022132	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	APBN	Mekasar (Kad)	Volume 1 Paket TRD/ Ya 1. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (12.000.000.000.000)	Pengadaan Langsung	10.040.000
18	Dukungan Manajemen Internal Langkah Sajian Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kolaborasi Dan Perikanan	5022131	Pengadaan Makanan dan Minuman Perikanan Dan Perikanan	APBN	Mekasar (Kad)	Volume 1 Paket TRD/ Ya 1. Pengadaan Makanan dan Minuman Perikanan Dan Perikanan (12.000.000.000.000)	Pengadaan Langsung	10.040.000

Kontribusi Rekrutmen Dan Perikanan Pada Sektor Kesehatan Dan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Mekasar

SARUP LKPP - 13.01.2025

19	Dukungan Manajemen Internal Langkah Sajian Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kolaborasi Dan Perikanan	5022132	Pengadaan Fasilitas Dan Perlengkapan Kerja	APBN	Mekasar (Kad)	Volume 1 Paket TRD/ Ya 1. Fasilitas Dan Perlengkapan Kerja (12.000.000.000.000)	Pengadaan Langsung	10.040.000
20	Dukungan Manajemen Internal Langkah Sajian Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kolaborasi Dan Perikanan	5022132	Pemeliharaan Kesehatan Perikanan	APBN APBN	Mekasar (Kad)	Volume 1 Paket TRD/ Ya 1. Pemeliharaan Kesehatan Perikanan (12.000.000.000.000)	Pengadaan Langsung	10.040.000
21	Dukungan Manajemen Internal Langkah Sajian Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kolaborasi Dan Perikanan	5022132	Pemeliharaan Kesehatan Perikanan	APBN	Mekasar (Kad)	Volume 1 Paket TRD/ Ya 1. Pemeliharaan Kesehatan Perikanan (12.000.000.000.000)	Pengadaan Langsung	10.040.000
22	Manajemen Mutu	5022132	Manajemen Mutu Perikanan Dan Perikanan	APBN	Mekasar (Kad)	Volume 1 Paket TRD/ Ya 1. Manajemen Mutu Perikanan Dan Perikanan (12.000.000.000.000)	Pengadaan Langsung	10.040.000
23	Manajemen Mutu	5022132	Manajemen Mutu Perikanan Dan Perikanan	APBN APBN	Mekasar (Kad)	Volume 1 Paket TRD/ Ya 1. Manajemen Mutu Perikanan Dan Perikanan (12.000.000.000.000)	Pengadaan Langsung	10.040.000
24	Manajemen Mutu	5022132	Manajemen Mutu Perikanan Dan Perikanan	APBN APBN	Mekasar (Kad)	Volume 1 Paket TRD/ Ya 1. Manajemen Mutu Perikanan Dan Perikanan (12.000.000.000.000)	Pengadaan Langsung	10.040.000
25	Manajemen Mutu	5022132	Manajemen Mutu Perikanan Dan Perikanan	APBN APBN APBN APBN	Mekasar (Kad)	Volume 1 Paket TRD/ Ya 1. Manajemen Mutu Perikanan Dan Perikanan (12.000.000.000.000)	Pengadaan Langsung	10.040.000

26	Pengadaan Mula	0027107	Bekas 200 Literan Pengisian ulang pengisian Mula (sangat penting)	APBN, APBD, APBD, APBD	Nasional (Pusat)	Volume 1 Paket TKDN Ya 1. Peralatan komputer 1. PKT, 0 (00000) 2. Unit server 1. PKT, 0 (00000) 3. Sisa pengisian 1. PKT, 0 (00000) 4. Pengisian komputer 1. PKT, 0 (00000)	Pengadaan Langsung	70.000.000
27	Pengadaan Mula	0027108	Pengisian ulang pengisian Mula (sangat penting)	APBN	Nasional (Pusat)	Volume 1 Paket TKDN Ya 1. Sisa sisa komputer	Pengadaan Langsung	20.000.000
28	Pengadaan dan Penggantian Mula (sangat penting dan penting)	0027109	Bekas Bahan	APBN	Nasional (Pusat)	Volume 1 Paket TKDN Ya 1. 470 dari komputer smpkn 1. PKT, 0 (00000)	Pengadaan Langsung	1.200.000
29	Pengadaan dan Penggantian Mula (sangat penting dan penting)	0027100	Bekas Bahan	APBN, APBD, APBD	Nasional (Pusat)	Volume 1 Paket TKDN Ya 1. Sisa komputer smpkn (1. PKT, 0 (00000)) 2. Sisa komputer smpkn (1. PKT, 0 (00000)) 3. Pengisian 1. PKT, 0 (00000)	Pengadaan Langsung	2.000.000
30	Pengadaan dan Penggantian Mula (sangat penting dan penting)	0027101	Bekas Bahan	APBN	Nasional (Pusat)	Volume 1 Paket TKDN Ya 1. 470 dari komputer smpkn 1. PKT, 0 (00000)	Pengadaan Langsung	100.000
31	Pengadaan dan Penggantian Mula (sangat penting dan penting)	0027102	Bekas Bahan	APBN	Nasional (Pusat)	Volume 1 Paket TKDN Ya 1. 470 dari komputer smpkn 1. PKT, 0 (00000)	Pengadaan Langsung	1.000.000
32	Pengadaan dan Penggantian Mula (sangat penting dan penting)	0027103	Bekas Bahan (sangat penting dan penting)	APBN	Nasional (Pusat)	Volume 1 Paket TKDN Ya 1. 470 dari komputer smpkn 1. PKT, 0 (00000)	Pengadaan Langsung	610.000
33	Pengadaan dan Penggantian Mula (sangat penting dan penting)	0027104	Bekas Bahan (sangat penting dan penting)	APBN, APBD, APBD	Nasional (Pusat)	Volume 1 Paket TKDN Ya 1. 470 dari komputer smpkn 1. PKT, 0 (00000) 2. Sisa komputer smpkn (1. PKT, 0 (00000)) 3. Sisa komputer smpkn (1. PKT, 0 (00000)) 4. Pengisian komputer 1. PKT, 0 (00000)	Pengadaan Langsung	1.400.000

Keterangan: Kebutuhan dan Penggantian Mula (sangat penting dan penting)

SURUP LKPP - 13-01-2025

34	Pengadaan dan Penggantian Mula (sangat penting dan penting)	0027105	Bekas Bahan (sangat penting dan penting)	APBN, APBD, APBD, APBD	Nasional (Pusat)	Volume 1 Paket TKDN Ya 1. 470 dari komputer smpkn 1. PKT, 0 (00000) 2. Sisa komputer smpkn (1. PKT, 0 (00000)) 3. Sisa komputer smpkn (1. PKT, 0 (00000)) 4. Pengisian komputer 1. PKT, 0 (00000)	Pengadaan Langsung	1.100.000
35	Pengadaan dan Penggantian Mula (sangat penting dan penting)	0027106	Bekas Bahan (sangat penting dan penting)	APBN, APBD, APBD	Nasional (Pusat)	Volume 1 Paket TKDN Ya 1. Sisa komputer smpkn (1. PKT, 0 (00000)) 2. Sisa komputer smpkn (1. PKT, 0 (00000)) 3. Sisa komputer smpkn (1. PKT, 0 (00000)) 4. 470 dari komputer smpkn 1. PKT, 0 (00000)	Pengadaan Langsung	1.000.000
36	Pengadaan dan Penggantian Mula (sangat penting dan penting)	0027107	Bekas Bahan (sangat penting dan penting)	APBN	Nasional (Pusat)	Volume 1 Paket TKDN Ya 1. 470 dari komputer smpkn 1. PKT, 0 (00000)	Pengadaan Langsung	600.000
37	Pengadaan dan Penggantian Mula (sangat penting dan penting)	0027108	Bekas Bahan (sangat penting dan penting)	APBN	Nasional (Pusat)	Volume 1 Paket TKDN Ya 1. 470 dari komputer smpkn 1. PKT, 0 (00000)	Pengadaan Langsung	620.000
38	Pengadaan dan Penggantian Mula (sangat penting dan penting)	0027109	Bekas Bahan (sangat penting dan penting)	APBN	Nasional (Pusat)	Volume 1 Paket TKDN Ya 1. 470 dari komputer smpkn 1. PKT, 0 (00000)	Pengadaan Langsung	600.000
39	Pengadaan dan Penggantian Mula (sangat penting dan penting)	0027110	Bekas Bahan (sangat penting dan penting)	APBN	Nasional (Pusat)	Volume 1 Paket TKDN Ya 1. Sisa komputer smpkn (1. PKT, 0 (00000)) 2. Sisa komputer smpkn (1. PKT, 0 (00000)) 3. Sisa komputer smpkn (1. PKT, 0 (00000)) 4. Sisa komputer smpkn (1. PKT, 0 (00000))	Pengadaan Langsung	2.000.000
40	Pengadaan dan Penggantian Mula (sangat penting dan penting)	0027111	Bekas Bahan (sangat penting dan penting)	APBN, APBD, APBD	Nasional (Pusat)	Volume 1 Paket TKDN Ya 1. Sisa komputer smpkn (1. PKT, 0 (00000)) 2. Sisa komputer smpkn (1. PKT, 0 (00000)) 3. Sisa komputer smpkn (1. PKT, 0 (00000))	Pengadaan Langsung	1.000.000
41	Pengadaan dan Penggantian Mula (sangat penting dan penting)	0027112	Bekas Bahan (sangat penting dan penting)	APBN	Nasional (Pusat)	Volume 1 Paket TKDN Ya 1. Sisa komputer smpkn (1. PKT, 0 (00000)) 2. Sisa komputer smpkn (1. PKT, 0 (00000))	Pengadaan Langsung	2.000.000

Keterangan: Kebutuhan dan Penggantian Mula (sangat penting dan penting)

SURUP LKPP - 13-01-2025

TOTAL	4.394.247.000
-------	---------------

## 1.2. Draft Paket Penyedia

No	Item	Kode RUP	Nama Paket	Tingkat	Lotus	Asuransi	Persediaan	Page
TOTAL								
							0	

SRUP LAPP - 19.01.2025

## 2. Paket Swakelola

### 2.1. Paket Swakelola Terumumkan

No	Anggaran	Kode RUP	Nama Paket	Uraian	Volume	Estimasi	Page
						2	

### 2.2. Draft Paket Swakelola

No	Anggaran	Kode RUP	Nama Paket	Uraian	Volume	Page
					2	

SRUP LAPP - 19.01.2025

2. SIRUP Revisi

SRUP LAPP - 19.01.2025

## REKAP RENCANA UMUM PENGADAAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

<b>KULPD:</b>	Kementerian Kelautan Dan Perikanan
<b>Satuan Kerja:</b>	Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar
<b>PARIPA:</b>	Mohammad Zamzul, S.Pi., MP 196710021962032001

SRUP LAPP - 19.02.2025

## 1. Paket Penyedia

### 1.1. Paket Penyedia Terumumkan

No	Anggaran	Kode RUP	Nama Paket	Uraian	Volume	Estimasi	Page
1		1000184	Balok Bataj Perikanan Darat Batu Kertan perikanan	Makassar (Pak)	Volume 1 Paket (TKDN Ya) Bahan-bahan	Pengadaan (Langsung)	12.000,00
2		1000176	Balok Bataj Perikanan Darat Batu Kertan perikanan	Makassar (Pak)	Volume 1 Paket (TKDN Ya) 1. Komputer tablet (12, 32GB, 512GB) 100000 2. Perangkat Lunak Tempur Kertas (12, 512GB, 512GB) 100000	Pengadaan (Langsung)	8.000,00
3		1000401	Balok Bataj Perikanan Darat Perikanan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	Makassar (Pak)	Volume 1 Paket (TKDN Ya) Dinas (300kg) (100000)	Pengadaan (Langsung)	8.000,00
4		1000136	Balok Bataj Perikanan Darat Perikanan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	Makassar (Pak)	Volume 1 Paket (TKDN Ya) 1. Perangkat lunak (10, 16GB, 512GB) 100000 2. Administrasi (10, 16GB, 512GB) 100000 3. Perangkat lunak (10, 16GB, 512GB) 100000 4. Perangkat lunak (10, 16GB, 512GB) 100000	Pengadaan (Langsung)	10.700,00

5	Dukung Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran Dan Perikanan	SE00023	Bahasa Lapangan Air	AFBN	Makassar (Kos)	Volume 1 Paket TKDN Ya 1. Lapangan air (12,8M)	Pengadaan Lapangan	9.000.000
6	Dukung Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran Dan Perikanan	SE00069	Bahasa Lapangan Laut	AFBN	Makassar (Kos)	Volume 1 Paket TKDN Ya 1. Lapangan Laut (13,8M)	Pengadaan Lapangan	275.000.000

Representasi Keluaran Dan Perikanan: Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar

SARUP LKPP - 16-03-2023

7	Dukung Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran Dan Perikanan	SE00073	Bahasa Lapangan Telpun	AFBN	Makassar (Kos)	Volume 1 Paket TKDN Ya 1. Lapangan Telpun (12,8M)	Pengadaan Lapangan	6.000.000
8	Dukung Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran Dan Perikanan	SE00082	Bahasa Pemeliharaan Perahu dan Motor / Mesin	AFBN AFBN AFBN AFBN AFBN AFBN	Makassar (Kos)	Volume 1 Paket TKDN Ya 1. Pemeliharaan Perahu 2. Pemeliharaan Perahu (81, UMT) 3. Pemeliharaan Perahu (Kantor 14, PEG) 4. Pemeliharaan Perahu (15, UMT) 5. Pemeliharaan Kc SP (31, UMT) 6. Pemeliharaan/ maintenance alat laboratorium (1, TSK) 7. Pemeliharaan Kapal both land dan 10 PWA (1, UMT)	Pengadaan Lapangan	184.204.000

9	Dukung Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran Dan Perikanan	SE00124	Bahasa Pengujian Suhu Udara Pda Perahu	AFBN	Makassar (Kos)	Volume 1 Paket TKDN Ya 1. Pengujian suhu udara perahu (12,8M @ 50000)	Pengadaan Lapangan	6.000.000
10	Dukung Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran Dan Perikanan	SE00078	Konstruksi Kabin Pengemudi dan Perahu Bekas	AFBN AFBN	Makassar (Kos)	Volume 1 Paket TKDN Ya 1. Bahasa Konstruksi Perahu Bekas 2. Bahasa Jasa Layanan	Pengadaan Lapangan	980.738.000
11	Dukung Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran Dan Perikanan	SE00218	Layanan Internal	AFBN	Makassar (Kos)	Volume 1 Paket TKDN Ya 1. Lapangan Jasa Internal (2,8M)	E-Procurement	81.800.000
12	Dukung Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran Dan Perikanan	SE00201	Pas Produksi Laut Dalam	AFBN	Makassar (Kos)	Volume 1 Paket TKDN Ya 1. Bahasa Barang (2) produksi Laut	Pengadaan Lapangan	6.700.000
13	Dukung Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran Dan Perikanan	SE00071	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	AFBN	Makassar (Kos)	Volume 1 Paket TKDN Ya 1. Bahasa Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pengadaan Lapangan	101.404.000

Kategori Keluaran Dan Perikanan: Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar

SARUP LKPP - 16-03-2023

14	Dukung Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran Dan Perikanan	SE00074	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	AFBN AFBN	Makassar (Kos)	Volume 1 Paket TKDN Ya 1. Bahasa Konstruksi Perahu 2. Bahasa Pemeliharaan Perahu dan Motor	Pengadaan Lapangan	101.070.000
----	---	---------	---------------------------------	--------------	----------------	--	--------------------	-------------

15	Dukung Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran Dan Perikanan	SE00241	Pemantauan/ Jemput Delegasi Mus Teras	AFBN	Makassar (Kos)	Volume 1 Paket TKDN Ya 1. Bahasa Jemput Perahu 2. Bahasa Pemeliharaan Perahu dan Motor	Pengadaan Lapangan	9.000.000
16	Manajemen Mutu	SE04784	Bahasa Bahan Pengujian mesin manajemen mutu lembaga inspeksi	AFBN	Makassar (Kos)	Volume 1 Paket TKDN Ya 1. Pemasangan/pasangan (1, PK @ 200000)	Pengadaan Lapangan	2.000.000
17	Manajemen Mutu	SE04247	Bahasa Jasa Layanan	AFBN AFBN AFBN AFBN AFBN	Makassar (Kos)	Volume 1 Paket TKDN Ya 1. Kabinasi alat pengujian (1, PKT @ 220000) 2. 10 perahu (2, PKT @ 190000) 3. 10 landing (1, PKT @ 190000) 4. 1000 perahu (1, PKT @ 190000) 5. 1000 perahu (2, DP @ 150000) 6. 1000 perahu (2, PKT @ 200000)	Pengadaan Lapangan	38.537.000
18	Manajemen Mutu	SE04033	Bahasa Jasa Layanan Pengujian Laboratorium mutu lembaga inspeksi	AFBN	Makassar (Kos)	Volume 1 Paket TKDN Ya 1. 1000 perahu (1, PKT @ 190000)	Pengadaan Lapangan	1.900.000
19	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran Dan Perikanan	SE04256	Bahasa Bahan Monitoring Control Pesanan	AFBN AFBN AFBN	Makassar (Kos)	Volume 1 Paket TKDN Ya 1. ATK dan komputer (spkn) 1, PK @ 30000 2. Pasokan kapal (2, PKT @ 40000) 3. Pengiriman kapal (2, PKT @ 40000)	Pengadaan Lapangan	3.000.000
20	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran Dan Perikanan	SE04323	Bahasa Jasa Layanan pengujian Akreditasi Control Pesanan	AFBN	Makassar (Kos)	Volume 1 Paket TKDN Ya 1. 1000 perahu (2, PKT @ 100000)	Pengadaan Lapangan	1.000.000
<b>Total</b>								<b>2.716.207.000</b>

1.2. Draf Paket Penyedia

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Penyedia Penyedia	Pagu
Total								0

2. Paket Swakelola

2.1. Paket Swakelola Terumunkan

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu	
Total								0

2.2. Draf Paket Swakelola

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu	
Total								0

3. Paket Penyedia Dalam Swakelola

3.1. Paket Penyedia Dalam Swakelola Terumunkan

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Penyedia Penyedia	Pagu
Total								0

3.2. Draf Paket Penyedia Dalam Swakelola

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Penyedia Penyedia	Pagu
Total								0



No	Kode Unit Kerja 1	Nama Unit Kerja 1	Persentase RUP Terumunkan				% Capaian RUP 1
			Pagu Pengisian	Pagu Terumunkan	Selisih	% RUP Terumunkan	
1	02	Inspektorat Jenderal	5274,294,000.00	5274,294,000.00	-	100.00%	100.00%
2	07	Stasiun Ambon Pengawasan Keluar dan Masuk Laut	222,894,717,000.00	222,894,717,000.00	-	100.00%	100.00%
3	08	Stasiun Ambon Pengawasan Dapur Sempit Perikanan dan Perikanan	30,397,148,000.00	30,397,148,000.00	-	100.00%	100.00%
4	09	Inspektorat Ambon	141,198,337,000.00	141,198,337,000.00	-	100.00%	100.00%
5	05	Stasiun Ambon Pelabuhan Bait Dupa	474,293,000,000.00	474,293,000,000.00	-	100.00%	100.00%
6	01	Badan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	194,397,480,100.00	194,397,480,100.00	-	100.00%	100.00%
7	06	Stasiun Ambon Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*	191,883,194,000.00	191,780,884,000.00	-102,310,000.00	99.97%	99.97%
8	04	Inspektorat Ambon Pelabuhan Sengaja**	488,478,177,000.00	488,288,427,000.00	-189,750,000.00	99.97%	99.97%
9	01	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan***	40,748,073,720.00	40,713,819,720.00	-34,254,000.00	99.99%	99.99%

\* Inspektorat 1 dan/atau 2 dengan capaian minimal 100% dengan nilai anggaran (L201) 100.000.000.00  
 \*\* Inspektorat 1 dan/atau 2 dengan capaian minimal 100% dengan nilai anggaran (L201) 100.000.000.00  
 \*\*\* Inspektorat 1 dan/atau 2 dengan capaian minimal 100% dengan nilai anggaran (L201) 100.000.000.00

**Lampiran 15. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA ( LCK ) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR  
TAHUN 2025**

Nama Indikator (15)	:	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama Timja	:	Timja Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan I

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun 2025							Capaian 2025	Target 2025
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target	-	-	-	-	-	75	75	-	75
Realisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% Capaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Catatan :**

- Q1, Q2, Q3, Q4 = Capaian selama Tw.1, Tw.2, Tw.3 dan Tw.4;  
 Sm.1 = Capaian Q1 + Capaian Q2;  
 Sm.2 = Capaian Q3 + Capaian Q4;  
 Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025;

**Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)**

**Deskripsi :**

- Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima;
- Balai Besar KIPM Makassar telah memperoleh predikat WBK sejak tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/KEPMEN-KP/2018. Untuk mempertahankan predikat tersebut, maka Balai Besar KIPM Makassar harus konsisten dalam penerapannya khususnya penanaman nilai-nilai integritas kepada seluruh jajaran pegawai Balai Besar KIPM Makassar beserta *stakeholder* yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP pada tahun 2022 sesuai Surat Inspektur Jenderal KKP Nomor B.420/ITJ.5/HP.550/XI/2022 tanggal 18 November 2022 Hal Hasil Pemantauan Pembangunan Zona Integritas pada Balai Besar KIPM Makassar, diperoleh nilai total sebesar 82,24 yang terdiri dari nilai Komponen Pengungkit sebesar 43,49 (Pemenuhan 21,40 dan Reform 22,09) dan Komponen Hasil sebesar 38,75. Nilai secara total telah memenuhi ambang batas menuju WBK, namun terdapat tiga area di Komponen Pengungkit (satu area pada Pemenuhan yaitu Penataan Tata Laksana dan dua area pada Reform yaitu Penataan Tata Laksana dan Penataan Sistem Manajemen SDM) yang tidak mencapai ambang batas 60%;
- Sesuai surat Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor B.360/BPPMHKP.1/OT.720/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 Hal Persiapan Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan PPMHKP Tahun 2025, Balai Besar KIPM Makassar bersama 4 UPT lainnya ditetapkan sebagai unit kerja yang akan dilakukan penilaian implementasi WBK dan WBBM oleh TPI (Tim Penilai Internal) KKP Tahun 2025-2026;

**Kegiatan yang Dilaksanakan :**

- Pada triwulan I tahun 2025 telah dilakukan serangkaian kegiatan guna mendukung penerapan WBK pada Balai Besar KIPM Makassar, diantaranya adalah :
  - (a) Pertemuan pembahasan pemenuhan dokumen penerapan WBK pada tanggal 20 Februari 2025;
  - (b) Penyiapan dokumen penerapan WBK oleh masing-masing penanggung jawab unsur;
  - (c) Penetapan tim kerja pembangunan WBK sesuai surat tugas Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar Nomor B.325/BBKIPM.MKS/OP.210/II/2025 tanggal 3 Februari 2025;
  - (d) Pemenuhan kepatuhan penyampaian LHKPN sebanyak 8 orang dan SPT Tahunan sebanyak 37 orang;
  - (e) Penandatanganan pakta integritas untuk seluruh pegawai (ASN, PPNPN dan PJLP);
  - (f) Penerbitan surat tugas dengan mencantumkan himbauan tidak melakukan KKN saat bertugas dan penyampaian melalui WAG pegawai dan pelaku usaha ;
  - (g) Penerbitan surat dan memorandum himbauan tidak menerima gratifikasi pada momen hari raya keagamaan dan penyampaian melalui WAG pegawai dan pelaku usaha;
  - (h) Penandatanganan berita acara tuntas pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP pada tanggal 25 Maret 2025;
  - (i) Melakukan bincang inspiratif bertema pengendalian gratifikasi yang diikuti oleh seluruh pegawai pada tanggal 13 Maret 2025 dengan nara sumber Mohammad Zamrud, S.Pi., MP;
  - (j) Pemenuhan fasilitas pelayanan publik berupa perbaikan neon box, perbaikan running text, dan pengaktifan announcement menjaga integritas);
- Perhitungan nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah sebagai berikut :
  - (1) Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
  - (2) Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
  - (3) Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,50 dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,50 dan sub komponen Presentasi TLHP minimal 5,00;
  - (4) Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 15,00;
  - (5) Penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Internal KKP;

**Sumberdaya Manusia :**

- Sumberdaya manusia yang terlibat dalam penerapan kinerja ini adalah seluruh pegawai lingkup Balai Besar KIPM Makassar sebanyak 58 orang, yang terdiri dari ASN 34 orang dan non ASN 24 orang;

**Anggaran :**

- Alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja ini pada tahun 2025 semula sebesar Rp. 12.489.000,-, namun setelah adanya kebijakan efisiensi, anggarannya menjadi Rp. 0,-.

**Program Nasional :**

- Penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM pada Satuan Kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat mendukung tercapainya program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 yang meliputi (1) pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan, (2) ekonomi biru berkelanjutan, (3) swasembada pangan, (4) peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan, dan (5) pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan; disamping itu juga dapat mendukung terwujudnya program nasional Asta Cita yang menjadi landasan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045;

**Aspek Pemanfaatan :**

- Penerapan nilai-nilai integritas menuju WBK/WBBM pada suatu unit kerja memiliki berbagai manfaat, yakni :
  - (a) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
  - (b) Mencegah terjadinya korupsi;
  - (c) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik;
  - (d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
  - (e) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat;
  - (f) Meningkatkan reputasi instansi pemerintah;

(g) Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024;

Target indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga pada triwulan I tahun 2025 belum dilakukan pengukuran;

**Akar Masalah (Mengapa Hal Tersebut Terjadi ?)**

Keterlambatan verifikasi dokumen implementasi zona integritas WBK menuju WBBM dikarenakan penanggung jawab unsur lambat menyampaikan dokumen tersebut ke Sekretariat WBK;

<b>Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan Berikutnya</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Masing-masing penanggung jawab unsur menyampaikan dokumen penerapan zona integritas WBK sesuai tanggung jawabnya melalui google sheet yang disediakan;</li><li>- Tim sekretariat melakukan verifikasi dokumen implementasi WBK sebelum divalidasi oleh Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar;</li></ul>	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

<b>Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan Sebelumnya</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Tidak ada indikator kinerja ini pada triwulan sebelumnya;	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Makassar, 10 April 2025  
Penanggung Jawab Indikator Kinerja,

Karwit

Dokumentasi Kegiatan :





**Lampiran 16. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA ( LCK ) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR  
TAHUN 2025**

Nama Indikator	:	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama Timja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan I 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggarannya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target							1		1
Realisasi									
% Capaian									

**Catatan :**

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw.2, Tw.3 dan Tw.4;

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2;

Sm II = Capaian Q3 + Capaian Q4;

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025;

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
<p>Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, sesuai Peraturan Menteri PANRB No.30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah secara kompetitif, adaptif, pertukaran pengalaman dan berkelanjutan melalui kompetisi, inovasi, system informasi inovasi, pemanfaatan dan pengembangan jaringan informasi, peningkatan kapasitas dan pemantauan berkelanjutan.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan K/L, Pemerintah Daerah, BMUN dan BUMD, Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun Kriteria Inovasi yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, untuk penyelenggaraan pelayanan publik;</li> <li>Efektif, yaitu memperlihatkan capaian yang nyata dan memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan;</li> <li>Bermanfaat, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik;</li> <li>Dapat ditransfer/ direplikasi, yaitu dapat dan/ atau telah dicontoh dan/ atau menjadi rujukan dan/ atau diterapkan oleh penyelenggara pelayanan publik lainnya;</li> <li>berkelanjutan, yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan yang diperlihatkan dalam bentuk dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan.</li> </ol>

Di dalam peraturan Menteri PANRB No.91 tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan :

- Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan berupa gagasan/ ide kreatif orisinal dan/ atau adaptasi/ modifikasi yang memberikan manfaat langsung atau tidak langsung bagi masyarakat.

Pengembangan Inovasi pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui berbagai cara seperti Penggunaan Teknologi, Pelatihan, dan Kolaborasi.

**a. Penggunaan teknologi**

1. Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam upaya untuk meningkatkan kegiatan pemerintah
2. Menggunakan teknologi mobile
3. Menggunakan e-meterai/ meterai digital dan tanda tangan elektronik
4. Menggunakan verifikasi biometrik dan SSO pada aplikasi SPBE.

Verifikasi biometrik dan Single Sign On (SSO) adalah teknologi yang digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna dan mengakses aplikasi SPBE.

- Verifikasi biometric
  - Teknologi yang memverifikasi identitas pengguna dengan menggunakan ciri fisik atau perilaku unik, seperti wajah, sidik jari, atau iris mata
  - Data biometrik disimpan dalam sistem sebagai template digital
  - Saat pengguna mencoba mengakses layanan, sistem membandingkan data biometrik baru dengan template yang sudah disimpan
  - Verifikasi biometrik lebih aman dibandingkan dengan metode tradisional seperti PIN atau kata sandi
- Single Sign On (SSO)
  - Sistem verifikasi yang memungkinkan pengguna hanya menggunakan satu username dan password saja untuk masuk ke semua aplikasi SPBE
  - SSO mengintegrasikan berbagai aplikasi administrasi ke dalam satu sistem
  - SSO meningkatkan efisiensi dan keterpaduan layanan digital pemerintah
  - Penerapan verifikasi biometrik dan SSO pada aplikasi SPBE diharapkan dapat meningkatkan keamanan data dan memberikan kemudahan bagi pengguna
- Aplikasi SPBE adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE sendiri adalah konsep dan upaya pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam memberikan pelayanan public

**b. Pelatihan**

1. Melakukan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk pegawai sektor publik
2. Meningkatkan kompetensi petugas pemberi pelayanan
3. Memfasilitasi pegawai untuk mengikuti kursus tentang kreativitas, teknologi, dan kepemimpinan inovatif

**c. Kolaborasi**

1. Memfasilitasi pegawai untuk mengikuti kursus tentang kreativitas, teknologi, dan kepemimpinan inovatif
2. Memfasilitasi kemitraan dengan pihak swasta

3. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses peningkatan kualitas pelayanan publik

Untuk mendukung kegiatan Pelayanan Publik, Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan beberapa kegiatan :

- a. Morning briefing petugas layanan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2025 yang disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- b. Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bpk Mohammad Zamrud, S.Pi., M.P menjadi nara sumber pada kegiatan Forum Peningkatan Kapasitas UMKM pengolahan hasil perikanan tanggal 3 Februari 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep. Hal ini mendukung implementasi/ inovasi layanan legal ekspor UMKM
- c. Penandatanganan pakta integritas seluruh pegawai (ASN, PPNN dan PJLP) tanggal 3 Februari 2025
- d. Rapat penyusunan proposal inovasi pelayanan publik tanggal 3 Februari 2025 dengan tema/kategori pemerataan ekonomi/ penguatan UMKM yang berfokus pada layanan legalitas ekspor UMKM lingkup Sulawesi Selatan.
- e. Bincang inspiratif pengendalian gratifikasi di lingkup Badan Mutu KKP Makassar pada tanggal 13 Maret 2025 dengan nara sumber Mohammad Zamrud, S.Pi., M.P yang diikuti oleh seluruh pegawai Balai Besar KIPM Makassar

Pelaksanaan kegiatan dengan metode pelatihan/ bincang inspiratif/ sharing session diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan serta mampu :

- Membentuk pegawai berintegritas:  
Pegawai menolak gratifikasi dan memahami bahaya penerimaan gratifikasi
- Membentuk citra positif instansi:  
Instansi bebas dari korupsi dan memiliki kredibilitas
- Mendukung lingkungan bebas korupsi:  
Instansi memiliki budaya anti gratifikasi dan lingkungan pengendalian yang kondusif
- Meningkatkan kepercayaan publik :  
Masyarakat memperoleh layanan tanpa gratifikasi, suap, dan pemerasan

Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam kegiatan inovasi pelayanan publik adalah seluruh pegawai Balai Besar KIPM Makassar sebanyak 60 pegawai, terdiri dari pegawai PNS sebanyak 36 pegawai dan pegawai PPNN/PJLP sebanyak 24 pegawai.

Untuk mendukung kegiatan Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025, anggaran tersedia pada Pagu awal sebesar Rp.33.777.000, menjadi sebesar Rp.3.600.000 Sampai dengan triwulan I tahun 2025, telah terealisasi sebesar Rp. 633.500,- atau sebesar 17,60%.

Didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 Balai Besar KIPM Makassar untuk Indikator Kinerja Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar tidak termasuk dalam kegiatan Program Nasional pada tahun 2025 namun Inovasi Pelayanan Publik umumnya tergolong sebagai kegiatan yang mendukung program nasional dalam reformasi birokrasi, transformasi digital pelayanan publik, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan daya saing dan kualitas SDM

Inovasi pelayanan publik bermanfaat untuk meningkatkan kualitas layanan, mempercepat kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Manfaat inovasi pelayanan publik yaitu :

- **Meningkatkan kualitas layanan**  
Inovasi dapat membuat pelayanan publik lebih efektif, efisien, dan mudah diakses sehingga mampu memberikan rasa kepuasan yang lebih tinggi.
- **Meningkatkan Citra dan Kepercayaan Publik**  
Kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat ketika layanan terasa lebih manusiawi, responsive dan pemberi layanan terpercaya.
- **Efisiensi Biaya dan Waktu**  
Proses yang tadinya lambat dan birokratis bisa dipangkas serta mampu menghemat anggaran operasional.
- **Mempersiapkan menghadapi perubahan**  
Inovasi dapat membantu pemerintah beradaptasi dengan perubahan dan tantangan di masa mendatang.
- **Menjawab kebutuhan masyarakat**  
Inovasi dapat membantu pemerintah mengembangkan pelayanan publik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

**Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)**

Petugas pelayanan kurang update pengetahuan, keterampilan dan sikap terhadap regulasi dan standar pelayanan publik terkini.

<b>Rekomendasi rencana aksi triwulan II 2025</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Agar seluruh pegawai dapat meningkatkan skill atau keterampilan dalam peningkatan pelayanan public dengan mengikuti pelatihan/ diklat / sharing session/ bincang inspiratif dibidang pelayanan publik dan peningkatan integritas pegawai	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

<b>Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan IV 2024</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik baru dilaksanakan di tahun 2025 sehingga belum ada rekomendasi rencana aksi sebelumnya di triwulan IV 2024	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Penanggung Jawab Indikator Kinerja

Karwit, S.Pi

## LAMPIRAN KEGIATAN

### Bincang Inspiratif Pengendalian Gratifikasi di Lingkup Badan Mutu KKP Makassar



Lampiran 17. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA ( LCK ) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR  
TAHUN 2025

Nama Indikator	:	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)
Nama Tim/ja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan I 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	88	88	88	88	88	88	88		88
Realisasi	93,32								
%Capaian	106,04								

**Catatan :**

Q1, Q2, Q3, Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

<b>Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)</b>
<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat : <a href="https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14">https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14</a>.</p> <p>Dimulai dari triwulan II tahun 2023, e-survey telah terintegrasi untuk seluruh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu menggunakan Aplikasi SUSAN (SURvey kepuasAN masyarakat) melalui link <a href="https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14">https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14</a>. Materi survey terdiri dari 9 unsur berupa U1. Persyaratan Layanan; U2. Kemudahan Prosedur; U3. Waktu Penyelesaian; U4. Kesesuaian Biaya; U5. Kesesuaian Produk; U6. Kecepatan Respon; U7. Kemudahan Fitur / Kemampuan Petugas; U8. Layanan Konsultasi; U9. Kualitas Isi / Sarana.</p> <p>Aplikasi SUSAN ini membagi survey berdasarkan jenis layanan. Untuk Balai Besar KIPM Makassar survey dilakukan terhadap 9 (Sembilan) jenis layanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPPMHKP nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)</i></li> <li>2. Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (<b>Ekspor</b>)</li> <li>3. <b>Jasa pengujian</b> hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air</li> <li>4. Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan</li> <li>5. Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan</li> <li>6. Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik</li> <li>7. Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik</li> <li>8. Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik</li> <li>9. Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik</li> </ol> <p>Survey juga dilakukan terhadap setiap pengguna jasa yang menerima layanan dengan jumlah sampel minimal mengacu pada formula Isaac &amp; Michael sebagai berikut:</p>

**Formula Isaac & Michael**  
 $S = X^2 NP / (1-P) / d^2 (N-1) + X^2 P / (1-P)$

$X^2 =$  Nilai chi square tabel = 3,841  
 dimana  $df = 1$  dan  $\alpha = 5\% = 0,05$   
 $P =$  Perkiraan proporsi populasi ( Jika tidak diketahui maka  $P = 0,5$ )  
 $N =$  Jumlah Populasi  
 $d =$  tingkat toleransi kesalahan (0,05)

$$S = \frac{3,841 \times 48 \times 0,5 \times 0,5}{(0,05^2 \times 47) + (3,841 \times 0,5 \times 0,5)}$$

$$S = \frac{46,092}{1,111} = 41,5 \approx 42$$

PUSKADATRA, KKP, 2022

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
41	14	220	140	1.000	200
43	14	230	144	1.000	207
45	14	240	148	1.000	214
47	14	250	152	1.000	221
49	14	260	156	1.000	228
51	14	270	160	1.000	235
53	14	280	164	1.000	242
55	14	290	168	1.000	249
57	14	300	172	1.000	256
59	14	310	176	1.000	263
61	14	320	180	1.000	270
63	14	330	184	1.000	277
65	14	340	188	1.000	284
67	14	350	192	1.000	291
69	14	360	196	1.000	298
71	14	370	200	1.000	305
73	14	380	204	1.000	312
75	14	390	208	1.000	319
77	14	400	212	1.000	326
79	14	410	216	1.000	333
81	14	420	220	1.000	340
83	14	430	224	1.000	347
85	14	440	228	1.000	354
87	14	450	232	1.000	361
89	14	460	236	1.000	368
91	14	470	240	1.000	375
93	14	480	244	1.000	382
95	14	490	248	1.000	389
97	14	500	252	1.000	396
99	14	510	256	1.000	403
101	14	520	260	1.000	410
103	14	530	264	1.000	417
105	14	540	268	1.000	424
107	14	550	272	1.000	431
109	14	560	276	1.000	438
111	14	570	280	1.000	445
113	14	580	284	1.000	452
115	14	590	288	1.000	459
117	14	600	292	1.000	466
119	14	610	296	1.000	473
121	14	620	300	1.000	480
123	14	630	304	1.000	487
125	14	640	308	1.000	494
127	14	650	312	1.000	501
129	14	660	316	1.000	508
131	14	670	320	1.000	515
133	14	680	324	1.000	522
135	14	690	328	1.000	529
137	14	700	332	1.000	536
139	14	710	336	1.000	543
141	14	720	340	1.000	550
143	14	730	344	1.000	557
145	14	740	348	1.000	564
147	14	750	352	1.000	571
149	14	760	356	1.000	578
151	14	770	360	1.000	585
153	14	780	364	1.000	592
155	14	790	368	1.000	599
157	14	800	372	1.000	606
159	14	810	376	1.000	613
161	14	820	380	1.000	620
163	14	830	384	1.000	627
165	14	840	388	1.000	634
167	14	850	392	1.000	641
169	14	860	396	1.000	648
171	14	870	400	1.000	655
173	14	880	404	1.000	662
175	14	890	408	1.000	669
177	14	900	412	1.000	676
179	14	910	416	1.000	683
181	14	920	420	1.000	690
183	14	930	424	1.000	697
185	14	940	428	1.000	704
187	14	950	432	1.000	711
189	14	960	436	1.000	718
191	14	970	440	1.000	725
193	14	980	444	1.000	732
195	14	990	448	1.000	739
197	14	1.000	452	1.000	746
199	14	1.000	456	1.000	753
201	14	1.000	460	1.000	760
203	14	1.000	464	1.000	767
205	14	1.000	468	1.000	774
207	14	1.000	472	1.000	781
209	14	1.000	476	1.000	788
211	14	1.000	480	1.000	795

Jumlah layanan yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 2.798 kali, maka berdasarkan tabel diatas jumlah populasi sebanyak 2.800 minimal sampel responden yang diambil adalah sebanyak 338 responden. Hasil survey kepuasan Masyarakat diketahui jumlah responden sebesar 197, hal ini tidak memenuhi jumlah minimal responden sesuai dengan formula Isaac dan Michael tersebut. Kurangnya jumlah responden di Balai Besar KIPM Makassar salah satunya disebabkan adanya kegiatan pelayanan secara virtual terkait kebijakan efisiensi anggaran sehingga penyampaian pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat tidak berjalan secara optimal. Serta pada aplikasi SUSAN KKP ada penambahan jenis layanan yang awalnya 4 pelayanan bertambah menjadi 9 pelayanan di Balai Besar KIPM Makassar. Ada beberapa jenis layanan yang belum diberikan ke pengguna jasa karena penambahan jenis pilihan layanan pada aplikasi tersebut.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di hitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitung Survei Kepuasan Masyarakat terdapat 9 unsur pelayanan yang di kaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,1111.$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi perunsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

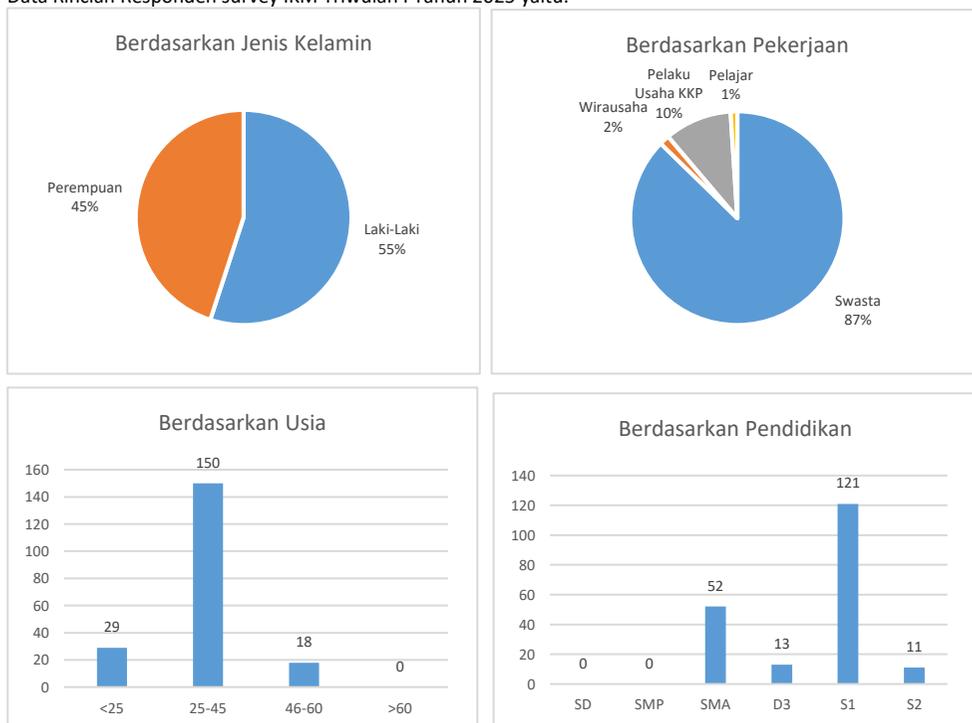
Sebagai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan MENPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka secara rutin Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sebanyak 4 kali dalam setahun untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Balai Besar KIPM Makassar.

Pada triwulan I Tahun 2025 Balai Besar KIPM Makassar telah melaksanakan survey terhadap 197 responden, dengan nilai Indeks Kepuasan IKM 3,72 atau sebesar 93,32 setelah dikonversi (**Sangat Baik**). Nilai IKM tersebut melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 88 atau capaian 106,04%. Apabila data Hasil IKM Triwulan IV Tahun 2024 dibandingkan dengan TW I Tahun 2025, maka nilai unsur pelayanan dapat dilihat sebagai berikut:

NO	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Perubahan
----	-----------------	-----------------------	-----------

		Triwulan IV - 2024	Triwulan I - 2025	
1	Kesesuaian persyaratan	3,750	3.733	↓
2	Kemudahan prosedur	3,757	3.731	↓
3	Kesesuaian jangka waktu penyelesaian	3,755	3.724	↓
4	Kesesuaian biaya	3,787	3.711	↓
5	Kesesuaian produk	3,755	3.741	↓
6	Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi	3,738	3.706	↓
7	Kemudahan dalam penggunaan fitur	3,775	3.716	↓
8	Layanan konsultasi dan pengaduan	3,812	3.746	↓
9	Kualitas isi/sarana	3,785	3.706	↓
	Nilai IKM	<b>94,20</b>	<b>93,32</b>	

Data Rincian Responden survey IKM Triwulan I Tahun 2025 yaitu:



Jika dilihat nilai perunsur, nilai unsur yang paling rendah adalah unsur kualitas isi/ sarana serta unsur kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi sistem pelayanan yang diberikan. Berdasarkan Peraturan MenPANRB nomor 14 tahun 2017, rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Untuk itu perlu dilakukan tindakan

perbaikan untuk unsur kualitas isi/ sarana serta unsur kecepatan respon walaupun nilai unsur tersebut sudah berada dalam kategori Sangat Baik.

Dalam pelayanan sertifikasi ekspor, Balai Besar KIPM Makassar menggunakan aplikasi PPK Online dan Aplikasi Sisterkaroline selanjutnya mengalami perubahan aplikasi menjadi Aplikasi SIAP Mutu (Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Mutu) dalam rangka penerbitan SMKHP digunakan pertanggal 1 Maret 2025 secara serentak semua UPT BPPMHKP yang dikembangkan oleh Sekretariat BPPMHKP. Namun dalam pelaksanaannya, aplikasi PPK Online dan Aplikasi Sisterkaroline ini kadang mengalami kendala. Serta aplikasi SIAP Mutu masih dalam tahap pengembangan, sehingga masih dirasakan cukup mengganggu bagi pengguna layanan.

Jika dibandingkan dengan indeks kepuasan masyarakat pada periode triwulan I pada tahun 2024, maka nilai IKM pada triwulan I 2025 mengalami peningkatan dari 91,60 menjadi 93,32. Hal ini menunjukkan upaya perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh Balai Besar KIPM Makassar memperoleh respon positif dari masyarakat.

Jika dibandingkan dengan indeks kepuasan masyarakat pada periode triwulan IV pada tahun 2024, maka nilai IKM pada triwulan I 2025 mengalami penurunan dari 94,20 menjadi 93,32. Menurunnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari Triwulan IV Tahun 2024 ke Triwulan I 2025 sejalan dengan layanan konsultasi petugas pelayanan pasca transisi penerapan regulasi ekspor komoditi perikanan. Selama masa transisi aplikasi ini petugas pelayanan memberikan informasi dan solusi terhadap kebingungan pelaku usaha tentang penerapan regulasi ekspor komoditi perikanan. Sehingga nilai IKM dapat ditingkatkan dari unsur Layanan konsultasi dan Pengaduan pada Triwulan I Tahun 2025.

Balai Besar KIPM Makassar berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat "INFORMATIF" kepada Balai Besar KIPM Makassar pada Tahun 2024 lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 6 Maret 2025. Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan Masyarakat adalah dengan mengikuti kegiatan Peningkatan Kompetensi Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Sekretariat BPPMHKP pada tanggal 10 s.d. 13 Maret 2025 secara daring.

#### Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya	4
2.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	9
3.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	2
4.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia	1
5.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	2
6.	PPNPN	12
7.	PJLP	12
	TOTAL	42

#### Anggaran

Pada tahun 2024 terjadi revisi anggaran dimana anggaran untuk Survei Kepuasan Masyarakat dihilangkan dan dialihkan dari kegiatan Standarisasi Sistem dan Kepatuhan (3990) ke kegiatan Dukungan Manajemen Internal (3987).

Alokasi anggaran awal kegiatan survey kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap pelayanan publik Tahun 2025 yaitu Rp. 1.292.244.000,- dan terjadi revisi anggaran awal menjadi Rp. 379.200.000,-. Hingga Triwulan I tahun 2025, anggaran yang sudah terealisasi sebanyak Rp. 92.578.921,- pada langganan daya dan jasa, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 286.621.079,-.

### Program Nasional

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu prioritas nasional karena dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah memberikan perhatian atas percepatan digitalisasi pelayanan publik sejalan dengan Asta Cita.

### Aspek Pemanfaatan

Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Balai Besar KIPM Makassar dapat mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/ pengguna jasa di Sulawesi Selatan untuk menyatakan persepsi atas kepuasaan layanan yang telah diperoleh oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Survey kepuasan Masyarakat ini sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

### Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Petugas layanan dan Inspektur Mutu/ Asisten Inspektur Mutu kurang konsisten menyampaikan aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat kepada pengguna jasa setelah memberikan layanan.

Pada aplikasi SUSAN KKP ada penambahan jenis layanan yang awalnya 4 pelayanan bertambah menjadi 9 pelayanan di Balai Besar KIPM Makassar. Petugas layanan dan Inspektur Mutu/ Asisten Inspektur Mutu belum memutakhirkan pengetahuan mengenai isi survey dan standar pelayanan terbaru Keputusan Kepala BPPMHKP nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Perlu dilakukan briefing/ sharing session kepada petugas pelayanan dan inspektur mutu untuk meningkatkan jumlah responden kepada pengguna layanan.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Sosialisasi Penerapan Aplikasi SIAPMutu dan PMK Nomor 1 Tahun 2025 kepada petugas layanan dan pengguna jasa.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen

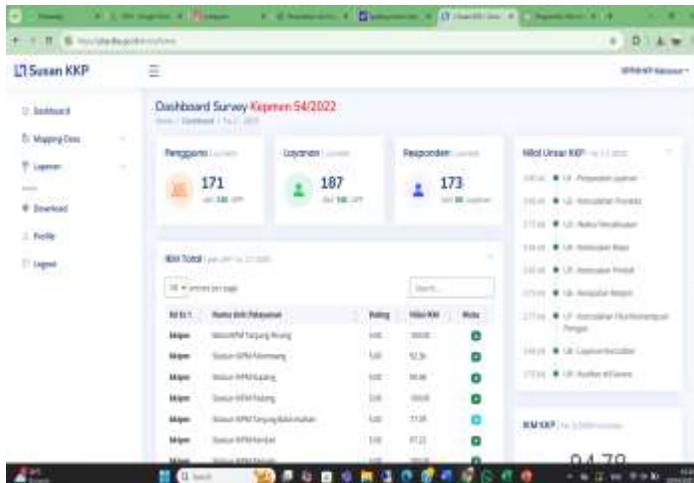
Makassar, 10 April 2025  
Penanggungjawab Indikator Kinerja

Karwit

DOKUMENTASI PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN I TAHUN 2025



Infografis Nilai IKM Triwulan I Tahun 2025



Screenshot Dashboard Aplikasi SUSAN KKP

Kategori	Nama SKM	Evaluasi	Tg	Keting	Nilai SKM	Jumlah Responden
Wegon	Skema KRM 1 Beras	0,00	1	4,07	10,00	7
Wegon	Skema KRM 2 Beras	0,00	1	4,00	10,00	40
Wegon	Skema KRM 3 Beras	0,00	1	4,06	10,00	111
Wegon	Skema KRM 4 Beras	0,00	1	4,00	10,00	20
Wegon	Skema KRM 5 Beras	0,00	1	4,00	10,00	29
Wegon	Skema KRM 6 Beras	0,00	1	4,00	10,00	24
Wegon	Skema KRM 7 Beras	0,00	1	4,00	10,00	36
Wegon	Skema KRM 8 Beras	0,00	1	4,07	10,00	107
Wegon	Skema KRM 9 Beras	0,00	1	4,00	10,00	144

Screenshot Aplikasi SUSAN KKP yang memperlihatkan nilai IKM Triwulan I Tahun 2025

**Survey Kepuasan Masyarakat**  
Unit : Balai Besar KPH Makassar

**Data Layakasan**

- 1. Bagaimana Pelayanan Program Manajemen Risiko (Risk Management) Analisis dan Tindakan Control Point (PMBM) KASZK?
- 2. Bagaimana Sistem Regulasi dan Pengawasan dan Pengendalian (APR) KPH Makassar?
- 3. Bagaimana Keterbacaan Baku, Buku, dan Instrumen Kerja per KPH dan/atau Layanan per KPH dan/atau Produk atau Penguasaan dan Kelempahan Regulasi Kelempahan Penguasaan (KPH) KPH Makassar?

**Data Responden**

Nama Responden: 18 Apr 2025 09:13

Screenshot tampilan isian survey kepuasan masyarakat pada aplikasi SUSAN KKP

**DOKUMENTASI PENGISIAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
TRIWULAN I TAHUN 2025**



**DOKUMENTASI BRIEFING PETUGAS PELAYANAN  
TRIWULAN I TAHUN 2025**



**DOKUMENTASI AKSELERASI LAYANAN SERTIFIKASI, BADAN MUTU KKP MAKASSAR SOSIALISASI APLIKASI  
SIAP MUTU KEPADA PELAKU USAHA**





## Peningkatan Kompetensi Petugas Pelayanan Publik lingkup Badan Mutu KKP

10-13 Maret 2025

### DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI PENERAPAN APLIKASI SIAP MUTU UNTUK NEGARA TUJUAN CHINA



### DOKUMENTASI PENDAMPINGAN PENGGUNA JASA MENGISI DATA EKSPOR PADA APLIKASI SIAP MUTU





**PENGHARGAAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KATEGORI INFORMATIF**



